



info indonesia

iNOVASI UNTUK NEGERI

EDISI #58 AGUSTUS 2025

<https://infoindonesia.id>

merdeka!



Rp75.000,-

TOM & HASTO DIMERDEKAKAN PRABOWO

JAWA BARAT
KEMBALI JADI
PRIMADONA
INVESTASI

SALAH
SASARAN
PENERIMA
BANSOS

MUTASI
BESAR-
BESARAN
LAGI DI TNI

HABIS
DORMANT
TERBITLAH
PAYMENT ID

LUNCURKAN
PROGRAM
PEMUTIHAN PAJAK
UNTUK RAKYAT

JAKARTA
SELATAN
SEBAGAI PUSAT
HIJAU ASEAN



info indonesia

www.infoindonesia.id

INOVASI UNTUK NEGERI

Network



INFO PASANG
NUR AISAH
+ 62 815-1157-6312
IKLAN



Lautan informasi di dunia maya melalui jaringan internet memberikan banyak referensi **INFO** kepada masyarakat

Koran Cetak Info Indonesia



www.infoindonesia.id

facebook @infoindonesia.id twitter @_infoindonesia

Instagram @info_indonesia.id

YouTube : infoindonesiatv

JAKARTA
JL. Raya Kalibata No. 8
Jakarta Selatan (12750)

Telp : 021-79196781
Email : redaksi@infoindonesia.id



iNOVASI UNTUK NEGERI

info indonesia

**DIRGAHAYU KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA**

80

**Bersatu Berdaulat
Rakyat Sejahtera
Indonesia Maju**

EDISI
BULAN
AGUSTUS
2025

DAFTAR ISI



7

INFO UTAMA

Menteri Perdagangan 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong mendapat abolisi. Sedangkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendapat amnesti. Demi rekonsiliasi.



22

INFO SUMSEL

Dalam suasana penuh khidmat, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru, didampingi Wakil Gubernur H. Cik Ujang, mengukuhkan 50 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Sumsel Tahun 2025 di Griya Agung.



32

INFO DAERAH

Jawa Barat kembali mencatatkan prestasi sebagai provinsi dengan nilai investasi tertinggi di Indonesia.



72

INFO NASIONAL

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sejumlah temuan anomali dalam rekening penerima bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, termasuk penerima yang masih bermain judi online hingga memiliki saldo puluhan juta rupiah.



50

INFO EKONOMI

Jagat maya kembali diramaikan oleh kebijakan menyangkut sistem keuangan. Setelah pemblokiran rekening dormant menimbulkan kegaduhan, kali ini giliran Payment ID yang dianggap terlalu mencampuri ranah privat warga.



68

INFO ISTANA

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 17 Agustus 2025. Momen bersejarah ini sekaligus menjadi peringatan ke-80 tahun kemerdekaan Indonesia yang tahun ini mengusung tema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju."



87

INFO KHUSUS

Pertumbuhan ekonomi tampak kian meningkat pada kuartal (triwulan) kedua (April-Juni) 2025. Kurang yakin? Silakan ajukan data perbandingan.

3 DARI REDAKSI

20 OPINI

44 INFO WISATA

46 INFO SELEBRITI

48 INFO OLAHRAGA

86 KAJI

34

INFO DAERAH

Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan sejarah gemilang dalam dunia pendidikan vokasi nasional. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, Jawa Timur berhasil keluar sebagai juara umum Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Nasional Pendidikan Menengah (Dikmen) ke-33 tahun 2025.



MISKIN

Baiklah, kita sudah menyimak informasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia yang tercatat pada Maret 2025. Ya, catatan kita, informasi tetaplah sebagaimana salah satu pengertiannya: sesuatu yang mengurangi ketidakpastian.

Paling tidak, kita lebih mungkin memastikan hitungan jumlah penduduk miskin pada satu titik waktu –dalam hal ini per Maret 2025. Selanjutnya, kita dapat menyusun berbagai rencana tindak lanjut berdasarkan data itu. Debat mengenai metodologi, kesahihan (validitas), dan keterandalan (reliabilitas) data BPS akan menguras energi. Sederhana saja alasannya: untuk urusan statistik (angka) di Indonesia, lembaga mana yang sanggup melampaui kompetensi BPS?

BPS juga sudah transparan mengenai pengertian penduduk miskin yang statistiknya diinformasikan pada Jumat, 25 Juli 2025. Penduduk digolongkan miskin apabila berada di bawah garis kemiskinan. BPS mencatat, garis kemiskinan pada Maret 2025 senilai Rp 609.160 per kapita atau meningkat dibandingkan Maret 2024 senilai Rp 562.932 per kapita. Jadi, pada Maret 2025, yang dianggap miskin adalah seseorang yang kemampuan belanjanya kurang dari Rp20 ribu per hari.

Nah, yang miskin per Maret 2025, menurut BPS tercatat 23,85 juta orang, menurun 0,21 juta orang dari catatan serupa per September 2024 dan menurun 1,37 juta orang dari angka pada Maret 2024. Informasi lainnya, angka 23,85 juta orang penduduk miskin per Maret 2025 itu setara dengan 8,47 persen total penduduk Indonesia. Pada September 2024, BPS mencatat, persentase penduduk miskin Indonesia masih sekitar 8,57 persen sehingga terjadi penurunan dari September ke Maret 2025 sekitar 0,10 persen.

Dengan informasi penduduk miskin dari BPS itu, kita bisa menghitung pula, jika sepasang suami-isteri berusia di kisaran 30 tahun memiliki satu anak balita, maka keluarga muda ini tergolong miskin jika pengeluarannya kurang dari Rp609.160 ribu dikalikan tiga orang atau setara dengan Rp1.827.480 per bulan. Selanjutnya kita bisa menghitung keluarga masing-masing. Tak perlu sungkan jika ternyata kita memang menjadi anggota sebuah keluarga miskin menurut BPS.

Lebih dari itu, bagaimana dengan penduduk yang mendekati miskin, misalnya, pengeluaran per kepala sekitar Rp22 hingga 25 ribu per hari? Pada titik inilah kita perlu pula melihat upaya penyelenggaraan negara dengan berbagai program semisal makan bergizi gratis (MBG), bantuan sosial tunai maupun non-tunai, juga pengembangan Koperasi Merah Putih di setiap desa dan kelurahan. Tambah pula sekolah rakyat. Program-program itu bagaikan katup pengaman untuk warga miskin dan mendekati miskin.

Kini, tinggal bagaimana penyelenggaraan MBG, bansos tunai dan non-tunai, pun sekolah rakyat akan lebih efektif dan lebih berdampak positif untuk menghindari kemiskinan. Selain itu, kita berharap juga pengembangan Koperasi Merah Putih dapat menjadi peluang menambah penghasilan dan manfaat bagi segenap warga miskin maupun yang mendekati miskin.

Hanya ada dua cara mengatasi kemiskinan dan menjadi kaya: Meningkatkan penghasilan dan menghemat pengeluaran. BPS pula yang kelak mencatat angkanya. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/ PEMASARAN:

Jl. Raya Kalibata No.8, Rawajati,
Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12750

- TELP 021-791 96781
- FAX 021-791 96786

Twitter : @Infoindonesia
Facebook : infoindonesia.id
Instagram : @infoindonesia.idn
Email : redaksi@infoindonesia.id

MANAGEMENT CETAK DI BAWAH
PT Wahana Multimedia
MANAGEMENT REDAKSI DI BAWAH
PT Dua Satu Pro

PENDIRI: Usman Rizal
DIREKTUR/PEMIMPIN UMUM: Rusdiyono
PEMIMPIN PERUSAHAAN: Nur Aisah
PEMIMPIN REDAKSI: Gunawan Effendi
WAKIL PEMIMPIN REDAKSI: Rahmad Romli
REDAKTUR PELAKSANA: Irma Yani
REDAKTUR : Melati Tagore, Nina Erlina, Ega Tri Gustina
REPORTER: Mario CH, Budi Prasetya, Indra Hadi, Muhammad Moeslim, Reno, Rasmiadi, Ida Iryani, Yadhi, Muhammad Fikri
EDITOR & GRAFIS: Al Amin, Achilles **TATA LETAK:** Sujatmiko **MEDIA SOSIAL:** Haidir Ali
KEUANGAN: Dra Hj Nurkhamida **SEKRETARIS REDAKSI :** Nur Aisah
PENGEMBANGAN BISNIS: Ega Tri Gustin, Nur Aisah **DISTRIBUSI:** Abdul Muchtar
BANK ACCOUNT: A/N PT. Wahana Multimedia, BCA No Rek: 553-041-4321, KCP Otista Jakarta Timur



Tom Lembong dan Haso Kristiyanto

DIMERDEKAKAN OLEH PRESIDEN PRABOWO SUBIANTO

Menteri Perdagangan 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong mendapat abolisi. Sedangkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Haso Kristiyanto mendapat amnesti. Demi rekonsiliasi.



• INFO UTAMA

Malam merambat lewat pukul 19.00 WIB. Beberapa menit kemudian, terpidana kasus suap, Hasto Kristiyanto, politisi PDI Perjuangan dengan jabatan terakhir Sekretaris Jenderal partai berlambang banteng itu tampak keluar dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi di Cipinang, Jakarta Timur.

Mengenakan kaus merah berlapis

mintaan pertimbangan DPR RI mengenai pemberian amnesti itu. "Pemberian persetujuan dan pertimbangan atas Surat Presiden Nomor 42 Pres 07 27 25 tanggal 30 Juli 2025 tentang amnesti terhadap 1.116 orang yang telah terpidana, diberikan amnesti, termasuk saudara Hasto Kristiyanto," ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen pada Kamis malam, 31 Juli 2025.

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis tiga tahun dan enam bulan penjara oleh dalam perkara suap Harun Masiku. Selain pidana badan, majelis hakim juga menjatuhkan hukuman denda Rp 250.000.000 subsidair tiga bulan kurungan.

Dalam perkara ini, majelis hakim menyatakan Hasto terbukti bersalah menyuap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) 2017-2022 Wahyu



jas hitam, selanjutnya ia mengangkat tangan kanan terkepal dan memekik: "Merdeka, Satyam Eva Jayate". Ya Hasto merdeka, bebas, pada Jumat malam, 1 Agustus 2025 setelah mendapat amnesti (pengampunan hukum) yang menjadi hak prerogatif Presiden.

Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melayangkan Surat Presiden tanggal 30 Juli 2025 tentang per-

Kemudian, Menteri Hukum (Menteri) Supratman Andi Agtas mengungkapkan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) pemberian amnesti untuk Hasto Kristiyanto telah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 1 Agustus 2025.

Sepekan sebelumnya, Jumat, 25 Juli 2025, Hasto menjadi terpidana setelah Majelis Hakim Pengadilan

Setiawan. Majelis hakim menyebutkan bahwa Hasto menyediakan uang suap senilai Rp 400 juta untuk menyuap Wahyu. Namun, hakim menyatakan dakwaan jaksa KPK bahwa Hasto merintangi penyidikan terhadap kasus Harun Masiku tidak terbukti.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasarakatan (Menko Kumham

Imipas), Yusril Ihza Mahendra, mengemukakan, Hasto Kristiyanto, tak perlu melakukan upaya banding atas vonis hukumannya. Alasannya, Hasto sudah mendapatkan amnesti sehingga proses hukumannya otomatis dihapus.

"Nah, dengan segala proses hukum yang dilakukan pada Pak Hasto itu otomatis dihapuskan. Jadi, beliau tak perlu banding atas putusan yang telah diberikan pada tingkat pertama,"

banding, maka dengan pemberian abolisi, segala proses penuntutan terhadap beliau dihapuskan, jadi dianggap tidak ada penuntutan terhadap beliau," ujar Menko Yusril.

Abolisi terhadap perkara Tom Lembong memang beriringan dengan amnesti untuk Hasto. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, permohonan abolisi itu disampaikan Presiden Prabowo ke DPR RI lewat Su-

bgnan dan persetujuan terhadap Surat Presiden Nomor R43/Pres/072025 tanggal 30 Juli tentang permintaan pertimbangan DPR RI atas pemberian abolisi atas nama Saudara Tom Lembong," kata Dasco.

Dengan abolisi itu, pengusutan perkara korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan (Kemendag) tahun 2015-2016 dengan terdakwa Tom Lembong dihentikan atau diti-



kata Yusril, dalam tayangan video yang diterima media pada Jumat, 1 Agustus 2025.

Yusril mengemukakan pula, abolisi yang diterima eks Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, atau Tom Lembong, sudah menghapus segala penuntutan terhadapnya. "Thomas Lembong sudah diputus, mungkin sudah proses mengajukan

rat Presiden Nomor R43 tertanggal 30 Juli 2025.

Pemberian abolisi merupakan hak yang dimiliki kepala negara untuk menghapuskan tuntutan pidana dan menghentikan proses hukum jika telah dijalankan. Hak abolisi diberikan presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPR.

"DPR RI telah memberikan pertima-

adakan. Sebelumnya, Tom Lembong sudah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan dijatuhi hukuman pidana 4,5 tahun penjara dan denda Rp 750 miliar subsidair enam bulan kurungan.

Menteri Yusril menegaskan amnesti dan abolisi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto sudah sesuai

• INFO UTAMA

dengan Undang-Undang (UU). "Pasal 14 UUD 1945 tegas menyatakan bahwa Presiden memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)," ungkapnya.

Dalam pemberian amnesti dan abolisi menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 RI, dia menjelaskan Presiden Prabowo Subianto sudah meminta pertimbangan kepada DPR melalui surat. Selain itu, kata dia, Presiden juga telah mengutus dua menteri, yaitu Menteri Hukum (Menkum) dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), untuk berkonsultasi dan meminta pendapat DPR atas rencana pemberian amnesti dan abolisi, yang antara lain diberikan

Agustus 2025. Ia menambahkan, dengan abolisi dan amnesti ini, Presiden Prabowo Subianto menginginkan semua komponen bangsa bersatu membangun Indonesia.

"Presiden ingin semua komponen bangsa berpartisipasi dan bersama-sama karena Presiden merasa 'semua anak negeri, ayo kita bersama-sama untuk membangun', apalagi dengan seluruh elemen kekuatan politik," katanya.

Menkum enggan menghubungkan pemberian abolisi dan amnesti ini dengan muatan politis sebab pengampunan diberikan murni atas dasar hak prerogatif Presiden. "Bahwa yang namanya grasi, kemudian amnesti,

berantasan korupsi itu tidak akan terpengaruh dengan pemberian amnesti dan abolisi hari ini," ucapnya.

Harap maklum, dari seribu lebih penerima abolisi dan amnesti kali ini, hanya Hasto dan Tom Lembong yang perkaranya terkait korupsi. "Iya, hanya ada dua orang terpidana korupsi di daftar ini. Tapi seperti yang disampaikan tadi, komitmen Presiden tetap pada pemberantasan korupsi," ungkapnya.

Toh Hasto juga berterima kasih atas amnesti yang ia terima. Hasto mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada sejumlah pihak, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto atas pemberian amnesti dan kepada Ketua Umum PDI



kepada Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Menteri Perdagangan (Mendag) periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong).

Nah, usai pembebasan Hasto dan Tom Lembong, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menggelar pertemuan dengan jajaran media. Dalam acara itu ia mengemukakan, pertimbangan untuk memberikan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dan amnesti kepada 1.178 orang, termasuk Hasto Kristiyanto, adalah demi rekonsiliasi dan persatuan.

"Ini adalah, sekali lagi, pertimbangannya rekonsiliasi, persatuan," kata Menkum Supratman, Jumat malam, 1

abolisi, dan rehabilitasi itu adalah hak prerogatif atau hak istimewa dari seorang presiden, siapa pun presiden-nya," katanya.

Supratman menegaskan pengampunan kepada Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto, yang keduanya merupakan terdakwa kasus korupsi, tidak akan mengurangi semangat pemberantasan korupsi ke depannya. Dia meminta publik untuk tidak khawatir karena Presiden Prabowo bersama dengan jajaran aparat penegak hukum tidak akan pernah gentar untuk memberantas tindak pidana korupsi.

"Tidak usah ragukan Presiden dan kami jajarannya semua akan tetap memastikan bahwa gerakan untuk pem-

Perjuangan Megawati Soekarnoputri atas dukungannya.

"Kepada yang terhormat Bapak Presiden Prabowo, atas keputusan yang memberikan amnesti tersebut, artinya apa yang kami suarakan di dalam pleidoi, di dalam duplik tentang keadilan yang hakiki, dijawab oleh beliau," ujar Hasto.

Ia menyebut amnesti ini merupakan buah dari hak prerogatif Presiden yang telah mendapat pertimbangan dari DPR. Hasto juga mengaku belajar banyak selama menjalani masa tahanan dan memutuskan untuk mengambil studi sarjana hukum di Universitas Terbuka.

"Saya masuk dengan kepala tegak dan akan keluar juga dengan kepala

tegak. Tetapi ternyata saya lebih merenduk karena saya begitu banyak belajar tentang kehidupan di sini," tandas Hasto.

Akan halnya Tom Lembong, Menteri Perdagangan 2015-2016 ini keluar dari Rutan Cipinang pada sekitar pukul 22.05 WIB, Jumat malam, 1 Agustus 2025. Mengenakan kemeja berwarna biru tua, tampak Tom didampingi sang istri, Fransisca Wihardja, para penasihat hukumnya, serta Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 Anies Baswedan.

"Saya kembali menghirup udara bebas. Kembali kepada keluarga tercinta dan kehidupan normal," ungkap Tom Lembong mengenai abolisi yang ia terima.

Tak lupa ia menyampaikan ucapan terima kasih atas pemberian abolisi untuknya. "Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto atas pemberian abolisi serta kepada pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya," kata Tom Lembong.

Toh ia mengaku abolisi yang ia terima tidak hanya membebaskannya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik dan kehormatan Tom Lembong sebagai seorang warga negara. "Saya tahu keputusan ini tidak mudah dan saya menghormatinya sebagai sebuah keputusan konstitusional yang lahir dari pertimbangan yang mendalam," ucapnya.

Ia menyadari terdapat banyak pertanyaan maupun kegelisahan yang menyertai pemberian abolisi dari Presiden Prabowo Subianto ini. Namun, Tom Lembong tetap akan menghormati berbagai pandangan tersebut karena sejak awal dirinya pun merasa yang ia alami bukan bagian dari proses hukum yang ideal.

Di sisi lain, dia mengaku tidak mau dan tidak akan melupakan orang-orang lain yang tidak seberuntung dirinya, yang tidak mempunyai sorotan maupun perlindungan. Dengan demikian, dia tidak ingin kemerdekaannya hari ini menjadi akhir cerita, tetapi harus menjadi awal dan tanggung jawab bersama.

"Saya ingin menyuarakan, mengin-

gatkan, dan bila mungkin membantu agar sistem hukum kita menjadi lebih adil, jernih, dan memihak kepada kebenaran, alih-alih pada kepentingan sempit tertentu," ungkapnya.

Tentu saja ucapan Tom Lembong ini menyangkut perkara hukum yang melilitnya sebelum pemberian abolisi. Yakni, kebijakan importasi gula di kementeriannya saat ia menjabat Menteri Perdagangan.

Dalam kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan pada

Atas perbuatannya, Tom Lembong juga dijatuhkan pidana denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama enam bulan. Dengan demikian, perbuatan Tom Lembong telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



tahun 2015-2016, Tom Lembong divonis pidana 4 tahun dan 6 bulan penjara setelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, yang merugikan keuangan negara sebesar Rp194,72 miliar. Tindak pidana korupsi yang dilakukan Tom Lembong, antara lain dengan menerbitkan surat pengajuan atau persetujuan impor gula kristal mentah periode 2015-2016 kepada 10 perusahaan tanpa didasarkan rapat koordinasi antarkementerian serta tanpa disertai rekomendasi dari Kementerian Perindustrian.

Vonis yang dijatuhkan Majelis Hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni pidana penjara selama 7 tahun. Namun pidana denda yang dijatuhkan tetap sama dengan tuntutan, yaitu Rp750 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan.

Toh semuanya telah terhapus oleh abolisi untuk Tom Lembong. Juga perkara Hasto yang terhapus oleh Amnesti. Alhasil, Tom Lembong dan Hasto Kristiyanto dimerdekakan oleh Presiden Prabowo Subianto. • Editor: GE



BELUM BERHENTI DI GRASI DAN ABOLISI

Grasi untuk Hasto Kristiyanto dan abolisi untuk Tom Lembong masih berlanjut dengan wacana, bahkan langkah hukum.

Keluar dari tahanan di Jakarta pada Jumat malam, 1 Agustus 2025, Hasto Kristiyanto langsung menghadiri Kongres ke-6 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali pada keesokan harinya.

Politisi dengan jabatan terakhir Sekretaris Jenderal PDIP itu tampak mengenakan kemeja merah seragam partai melangkah masuk ke arena kongres melewati tempat duduk para hadirin. Sedangkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang tengah berpidato langsung mengambil jeda dan berhenti berbicara di depan peserta Kongres.

Langkah Hasto berlanjut hingga naik ke panggung tempat Mega berpi-

dato. Ia lantas mencium tangan Megawati. Para kader pun langsung bersorak dan langsung meneriakkan kata "Merdeka".

Kemudian, keduanya tampak berbincang sebentar. Megawati pun meminta Hasto untuk duduk di barisan depan. Sedangkan Megawati tampak terdiam dan tak kuasa menahan air matanya.

"Saya tadinya berdoa tetapi saya tidak terlalu berharap, bahwa yang namanya Pak Hasto, berada kembali di kelilingi kita semua," kata Megawati setelah Hasto turun panggung.

Megawati pun melanjutkan pidatonya dan sesekali menyeka air mata menggunakan tisu. Dia mengatakan bahwa kehadiran Hasto adalah bukti bahwa kebenaran akan menang. Selu-

ruh kader PDIP yang ada di lokasi pun bertepuk tangan sambil meneriakan nama Megawati.

"Maka ingatlah apa yang tadi saya katakan, harus teguh, harus setia, karena itulah anugerah yang diberikan kepada manusia oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala," kata Presiden Ke-5 Republik Indonesia itu.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP demisioner Deddy Yevri Sitorus mengatakan kemungkinan besar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto akan datang ke Kongres Ke-6 PDIP di Bali Nusa Dua Convention Center setelah bebas dari tahanan karena diberi amnesti oleh Presiden. Menurut dia, Sekretaris Jenderal PDIP sudah demisioner itu sudah berkomunikasi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Besarnya kemungkinan akan ada hadir. Tetapi pasti atau tidaknya silahkan hubungi Mas Hasto," kata Deddy saat diwawancarai di sela-sela kongres, Sabtu, 2 Agustus 2025.

Dia mengungkapkan bahwa suasana kebatinan yang terjadi saat kongres itu mengharap agar Hasto bisa segera hadir di kongres. Sekaligus menjadi penanda bahwa kejahatan akan kalah melawan kebenaran.

Deddy mengatakan pula, Kongres PDIP itu bersifat internal dan hanya bisa dihadiri oleh kader PDIP, sehingga dia pun tidak mengkonfirmasi kehadiran pihak lainnya, termasuk tokoh-tokoh dari partai lain. "Kongres kali ini adalah Kongres yang memang kita buat dalam konteks tantangan-tantangan yang dihadapi partai pada waktu-waktu belakangan ini," ujarnya.

Ia menjelaskan, pada Sabtu pagi, 2 Agustus 2025, kongres telah menggelar rapat hasil sidang komisi-komisi yang terdiri dari komisi program, politik, hingga organisasi. Selanjutnya agenda penutupan diagendakan pada pukul 14.00 WITA. "Siang sampai sore ini sebenarnya agenda yang paling besar itu adalah pidato politik terutama hingga penutupan Kongres Ke-6 dari Ibu Ketua Umum," kata Deddy.

Dalam pidato politiknya, Megawati Soekarnoputri mengungkapkan setiap malam berzikir dan menyebut nama-nama orang yang mendapatkan

ketidakadilan, termasuk nama Hasto Kristiyanto. Dia pun meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk memberikan keadilan yang hakiki kepada banyak orang yang diperlakukan tidak adil dari sisi hukum. Dia menilai bahwa Hasto hanya merupakan salah satu contoh.

"Hai para ahli hukum, ingatlah kalian dewi keadilan matanya tertutup, dan ada yang namanya tempat untuk meli-

menang, sesuai dengan slogan "Satyam Eva Jayate".

Lebih dari itu, masih dalam pidatonya, Megawati mengaku sedih dengan kondisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini karena Presiden Prabowo Subianto sampai harus turun tangan.

Dia tidak menyebutkan secara rinci maksudnya itu. Namun, Mega menyampaikannya setelah menyebut bahwa Hasto adalah salah satu contoh



hat berat atau tidaknya. Tetapi selalu diusahakan supaya melihat keadilan itu tegak lurus," kata Megawati.

Dia menyampaikan hal itu setelah Hasto tiba di lokasi kongres. Ungkapan Megawati itu pun langsung disambut oleh ribuan kader yang hadir.

Mega pun berharap agar keadilan hukum di Indonesia bisa hadir kembali. Dia menegaskan keadilan pasti akan

orang yang mendapatkan perlakuan tidak adil.

"Saya merasa aneh loh, masa urusan begini saja Presiden harus turun tangan. Coba pikirkan," kata Megawati.

Dia mengaku mengetahui lika-liku terkait KPK karena pernah menjadi Presiden. Di samping itu, dia merupakan sosok Presiden yang mendirikan lembaga anti rasuah tersebut. Menurut

• INFO UTAMA

dia, keadilan hakiki harus diterapkan dengan tegak lurus.

"Apakah kalian tidak punya anak-anak? Tidak punya saudara? Kalau diperlakukan seperti itu, lalu bagaimana, di mana kalian mencari keadilan yang hakiki?" kata Presiden ke-5 Republik Indonesia itu.

Tak urung Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyo menanggapi pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan yang mengaku sedih dengan kondisi lembaga antirasuah tersebut. "Secara proses penegakan hukum, sudah ada putusan. Artinya, yang bersangkutan (Hasto, red.) dinyatakan terbukti melakukan kejahatan, dan status itu melekat," ujar Setyo saat menjawab pertanyaan awak media di Jakarta, Senin, 4 Agustus 2025.

Setyo mengatakan pula, bahwa pemberian amnesti tersebut merupakan hak atau kewenangan Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Hasto Kristiyanto resmi bebas dari Rumah Tahanan KPK setelah Keputusan Presiden keluar dan diserahkan kepada pimpinan KPK. Sebelumnya Hasto telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan suap oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta yang menyatakan politisi PDIP itu menyediakan dana suap sebesar Rp400 juta yang akan diberikan kepada anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI periode 2017-2022 Wahyu Setiawan untuk pengurusan pengganti antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif DPR RI terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Sedangkan Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengemukakan, masyarakat sudah cerdas dan paham terhadap perkara Hasto, "Kami kira masyarakat sudah cerdas dan memahami perjalanan perkara ini ya," ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Senin, 4 Agustus 2025.

Selain itu, Budi memandang masyarakat sudah cerdas dan paham karena semua proses yang dilakukan KPK terhadap perkara tersebut telah diuji, yakni mulai dari penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan. "Baik

di praperadilan maupun oleh Dewas (Dewan Pengawas KPK), ya secara etik semuanya dinyatakan bahwa proses yang dilakukan oleh KPK sudah tepat," ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa Hasto telah terbukti bersalah berbuat suap, sehingga divonis 3 tahun dan 6 bulan penjara. "Amnesti itu kan tidak meng-

Bagaimana kedudukan Hasto setelah amnesti dari Presiden? Ternyata Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri masih menunjuknya sebagai Sekjen. Megawati melantik Hasto bersama pengurus DPP PDIP lainnya pada Kamis, 14 Agustus 2025.

Pelantikan pengurus DPP PDIP kali ini bagi yang berhalangan hadir di



hapus atau menghilangkan tindakan yang sudah dilakukan. Jadi, tindakannya tetap ada, tetap terbukti bersalah, dan hakim juga menyatakan demikian, namun memang atas tindakan tersebut kemudian diberikan pengampunan," katanya.

Dengan demikian, kata dia, yang hilang karena amnesti adalah hukuman untuk Hasto Kristiyanto. Bukan tindakannya yang terbukti merupakan suap.

Kongres PDIP di Bali. "Untuk posisi Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, Ibu Megawati menunjuk kembali Mas Hasto Kristiyanto untuk periode 2025-2030," ujar Adian.

Menurut dia pelantikan Hasto sebagai Sekjen disambut hangat. "Semua tersenyum dan Mas Hasto pun naik ke panggung, diikuti gemuruh tepuk tangan dari yang ada dalam ruangan," ungkap Adian. ●

TOM LEMBONG MENYOAL HAKIM PERKARANYA

Sementara Hasto Kristiyanto langsung berpolitik dengan menghadiri Kongres PDIP usai menerima grasi, Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dengan nama ringkas Tom Lembong mengambil langkah hukum. Tom Lembong melaporkan tiga hakim, yang memutuskan perkara dengan vonis bersalah dalam kasus importasi gula, ke Mahkamah Agung (MA).

Anggota tim kuasa hukum Tom Lembong, Zaid Mushafi, mengatakan laporan tersebut adalah upaya Tom agar ada evaluasi dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Ketiga hakim yang dilaporkan tersebut yakni Hakim Ketua Dennie Arsan Fatrika dengan Hakim Anggota Alfis Setyawan dan Purwanto S Abdullah.

"Dia (Tom Lembong) ingin ada evaluasi, dia ingin ada koreksi. Agar apa? Agar keadilan dan kebenaran dalam proses penegakan hukum di Indonesia ini bisa dirasakan oleh semuanya," kata Zaid di gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta, Senin, 4 Agustus 2025.

Zaid mengatakan Tom tidak ingin abolisi yang diterimanya seolah-olah mengakhiri perjuangannya di jalur hukum. "Jadi Pak Tom ini tidak semata-mata setelah dia bebas ya udah, kita selesai. Enggak, dia komitmen dengan perjuangannya. Ada yang harus dikoreksi, ada yang harus dievaluasi," ujarnya.

Menurut Zaid laporan tersebut dibuat karena pihak Tom Lembong menilai hakim yang menyidangkan kliennya tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah. "Yang menjadi catatan adalah ada salah satu hakim anggota yang menurut kami selama proses persidangan itu tidak mengedepankan presumption of innocent," ungkapnya.

Zaid menjelaskan, hakim tadi tidak mengedepankan asas praduga tak bersalah, tapi mengedepankan asas presumption of guilty. "Jadi Pak Tom ini seolah-olah memang orang yang udah bersalah tinggal dicari aja alat buktinya. Padahal tidak boleh seperti itu proses peradilan," ujarnya.

Selain ke MA, Tom Lembong juga melapor ke Komisi Yudisial. KY pun menyatakan segera menganalisis laporan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh majelis hakim yang menjatuhkan vonis 4,5 tahun dalam kasus

ran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terhadap majelis hakim yang menjatuhkan pidana empat tahun dan enam bulan penjara serta denda Rp750 juta kepada Tom Lembong. Laporan disampaikan kuasa hukum Tom Lembong di Gedung KY, Jakarta, Senin, 4 Agustus 2025.

"KY telah mengawal kasus ini karena menarik perhatian publik melalui tugas pemantauan persidangan. Sesuai tugas dan fungsinya, KY akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan merespons cepat dengan memeriksa dan mempelajari laporannya terlebih dahulu," ujar Mukti Fajar.



korupsi importasi gula.

"KY segera memverifikasi dan menganalisis laporan. Oleh karena itu, kami berharap kuasa hukum TL (Tom Lembong) segera melengkapi persyaratan laporan," kata Anggota dan Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam keterangan resmi, Selasa, 5 Agustus 2025.

Mukti menjelaskan KY telah menerima laporan dugaan pelangga-

Selain pemeriksaan terhadap pelapor, Mukti Fajar mengatakan sangat memungkinkan bagi KY untuk memeriksa majelis hakim yang bersangkutan guna menggali informasi lebih lanjut terkait dugaan pelanggaran KEPPH. Dia juga menegaskan bahwa keadilan akan ditegakkan dan tidak ragu untuk merekomendasikan sanksi apabila terbukti adanya pelanggaran kode etik hakim. ●

ONGEN DI ANTARA JOKOWI DAN PRABOWO

Aktif di media sosial mengkritik Presiden Joko Widodo saat menjabat, Yulian Paongan (Ongen) tersandung Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Presiden Prabowo Subianto memberinya amnesti.

Yang aktif di media sosial semi-sal facebook dan X (twitter) membahas penyelenggaraan negara, ingat-ingat lagi sebutan kampret juga kampretos yang berseberangan dengan kecebong atau diringkas cebong saja.

Kampret sebutan untuk pendukung Prabowo Subianto, berasal dari salah satu ujaran spontannya dalam sesi debat capres. Sedangkan cebong adalah sebutan untuk pendukung Jokowi, diambil dari kegiatan Presiden Jokowi di Istana Bogor, mengamati kolam berisi katak dan cebong (berudu), anak hewan amfibi itu.

Nah, yang memviralkan sebutan cebong di media sosial awal-awalnya adalah Yulian alias Ongen itu. Namun, aktivitasnya di media sosial sempat menjadi

perkara hukum.

Harap maklum, di laman Facebook "Yulian Paongan" Ongen kerap menayangkan berbagai tautan berita dari media-media online terkait Presiden Joko Widodo plus komentar kritisnya.

Hingga pada 13 Desember 2015 lalu, Yulianus menampilkan sebuah foto Presiden Jokowi dengan artis Nikita Mirzani. Ia mencantumkan pula komentar "walah #PapaMintaPaha".. Sedangkan di akun twitternya, Ongen menampilkan foto serupa dengan tambahan tagar #papadoyanl***e.

Foto Jokowi dan Nikita itu sebenarnya jepretan lama saat mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah itu maju di pemilihan gubernur Jakarta berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada 2012.



Pada Kamis, 17 Desember 2015, Sub Direktorat Cyber Crime Bareskrim Polri menangkap Ongen karena diduga telah menyebarkan konten pornografi yang menghina Presiden Joko Widodo melalui akun media sosial Twitter @ypaongan. Polisi menyebutkan Ongen menyebarkan konten pornografi berupa tulisan yang secara eksplisit melanggar kesusilaan melalui akun Twitter @ypaongan.

Para penyidik menangkap Ongen di kediamannya di Jalan Rambutan, Jakarta Selatan. Seiring itu penyidik menyita barang bukti berupa laptop, telepon seluler dan kartu identitas Ongen sebagai tersangka.

Atas perbuatannya, tersangka dikenakan pelanggaran Pasal 4 Ayat (1) Huruf a dan Huruf e Jo Pasal 29 UU Nomor 44



Memang itu, kan, tindak pidana terkait politik, ya, seperti kita ketahui pidana seperti itu memang menjadi subjek amnesti dan abolisi. Jadi, Pak Ongen (Yulianus Paongan) itu sudah divonis, tetapi sekian lama tidak dieksekusi putusannya.

Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan ancaman pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp250 juta dan paling banyak Rp6 miliar, serta Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp1 miliar.

Ongen mengaku sama sekali tak menyangka unggahan yang dibuatnya menarik perhatian. Dalam persidangan, dia mengaku tidak berniat menghina Presiden dengan unggahannya. Tapi, materi yang diunggah Ongen dinilai se-

bagai ujaran kebencian.

Polisi sempat memeriksa empat saksi, yakni dua pelapor dan dua saksi ahli dari hukum pidana dan bahasa. Ongen pun dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) UU ITE.

Dia juga dianggap menyebarkan konten pornografi, sehingga polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Pornografi. Polisi menilai secara eksplisit memuat tentang persenggamaan dan

Informasi Transaksi Elektronik.

Dalam menghadapi proses hukum Ongen mendapat pendampingan dari Yusril Ihza Mahendra sebagai advokat. Diketahui, kini Yusril menjabat sebagai Menteri Koordinator bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Masyarakat (Menko Kumhamimipas).

Dalam persidangan 10 Mei 2016, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta



alat kelamin. Itu sebabnya dia disangka melanggar Pasal 4 ayat (1) huruf a dan e UU Pornografi, sehingga terancam hukuman hingga 12 tahun.

Selanjutnya polisi melimpahkan berkas perkara tersangka Ongen, penyebar konten pornografi yang menghina Presiden Joko Widodo melalui akun Twitternya @ypaongan, ke Kejaksaan. Ongen dijerat dengan Pasal 4 ayat (1) huruf a dan e Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dia juga dijerat Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Selatan Nursiyam mengatakan, majelis hakim menerima keberatan penasihat hukum terdakwa, Sehingga, saat itu Yulianus diputus bebas dari tuntutan.

Namun, pengadilan kembali menggelar sidang Ongen dengan berkas perkara baru dan diputus bersalah. Ia sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta, namun putusan pengadilan tetap menguatkan putusan tingkat pertama.

Toh pada Jumat, 1 Agustus 2025 Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti kepada Ongen dalam rang-

• INFO UTAMA

ka HUT ke-80 Kemerdekaan RI. "Amnesti ini diberikan kepada 1.178 orang. Salah satunya adalah Pak Hasto Kristiyanto. Yang lainnya adalah Yulius Paongan an atas kasus ITE terkait penghinaan terhadap kepala negara," ujar Supratman.

Sedangkan Menko Yusril Yusril menyebutkan, kasus terpidana Yulianus Paongan an alias Ongen terkait dengan politik sehingga diberi amnesti oleh Presiden Prabowo Subianto. Ongen divonis penjara sejak Desember 2015 karena menghina Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). "Memang itu, kan, tindak pidana terkait politik, ya, seperti kita ketahui pidana seperti itu memang menjadi subjek amnesti dan abolisi. Jadi, Pak

mengembangkan aneka gagasan terkait drone yang menjadi salah satu bidang keahliannya. Malah minat politiknya pun dapat dikombinasikan dengan drone jenis Balon Zeppelin.

Misalnya, untuk kampanye politik terkait pemilihan umum (Pemilu) maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak. "Balon Zeppelin bisa terbang autonomous dengan jangkauan yang relatif lebih jauh," kata Ongen

la mengatakan teknologi drone berkembang pesat untuk dimanfaatkan pada segala bidang seperti dunia militer, rescue, kepolisian, kedokteran, pertanian, perkebunan, kelautan dan lainnya.

Awalnya, Ongen mengembang-

Untuk drone penyelamat, Ongen membuat "Marine Rescue Drone" "Wahana tanpa awak ini dirancang untuk bisa memberikan 'lifebuoy' (pelampung keselamatan) kepada korban kecelakaan di laut dalam waktu yang sangat cepat sebelum mendapatkan pertolongan dari alat penyelamat lainnya seperti rescue boat," kata Ongen yang rescue drone-nya pernah diuji coba di Waduk Jatiluhur, Purwakarta Jawa Barat.

Dalam uji coba atau simulasi, "rescue drone" tersebut berhasil memberikan pelampung kepada korban tenggelam di Waduk Jatiluhur, dalam waktu 20 detik korban sudah mendapatkan 'life-



Ongen (Yulianus Paongan an) itu sudah divonis, tetapi sekian lama tidak dieksekusi putusannya," kata Yusril, Senin, 4 Agustus 2025.

Dia menjelaskan, setelah Presiden Prabowo memberikan amnesti kepada terpidana kasus penghinaan kepala negara itu, hukuman terhadap yang bersangkutan otomatis dihapuskan. "Jadi enggak akan ada eksekusi, enggak akan ada tuntutan baru, persoalannya menjadi selesai," jelas Yusril.

Karena tidak dieksekusi, Ongen pun masih bisa beraktivitas termasuk

kan pesawat tanpa awak untuk militer dan rescue kemudian mengembangkan Zeppelin Balloon menggunakan teknologi UAV. Ongen membuat Zeppelin Balloon Drone berukuran panjang sembilan meter dan diameter dua meter dengan durasi penerbangan selama 4-5 jam sekali terbang.

"Radius terbang bisa mencapai 10 km pada ketinggian 50-100 meter," ungkap Ongen. Ia menambahkan Zeppelin Balloon juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan promosi yang membutuhkan kamera tanpa awak.

buoy' tersebut. "Uji coba atau simulasi ini merupakan finalisasi dari riset pembuatan "Marine Rescue Drone" yang kami lakukan melalui Indonesia Maritime Institute dan tahun ini sudah bisa diproduksi massal untuk kepentingan rescue di laut," kata Ongen.

Gagasan lainnya adalah membuat drone kargo yang bisa mengangkat barang yang beratnya mencapai 80 kg dan mampu terbang selama 25 menit dalam jarak 5-7 km. "Indonesia negara besar saya kira membutuhkan drone seperti ini," katanya.

Menurut Ongen, drone jenis multitor itu memiliki diameter 200 cm dan cocok untuk mengirim logistik dari satu titik ke titik lain karena hambatan medan. "Bagi daerah yang tidak memiliki pelabuhan sangat cocok, kapal yang lego jangkar bisa mengirim atau mengambil logistik dari darat atau pulau kecil," ujarnya.

Selain itu, kata Ongen, drone itu juga bisa digunakan di kawasan pegunungan atau daerah bencana yang akses jalannya terputus. "Drone ini juga bisa untuk mengirim logistik pemilu di daerah yang medan jalannya sangat sulit," katanya.

Toh Ongen mengaku amnesti ini

ini sangat melelahkan dan menguras energi saya selama hampir 10 tahun. Tapi pada hari ini, 1 Agustus 2025, saya mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo. Sekali lagi, terima kasih, Bapak Presiden. Tuhan memberkati," ungkap Ongen.

Ongen mengatakan, pemberian amnesti yang diterimanya, yang termasuk dalam 1.178 narapidana merupakan gambaran bahwa Prabowo mengedepankan prinsip persatuan bangsa. Terlebih, sambung dia, saat Prabowo memberikan amnesti dan abolisi kepada dua tokoh politik, yakni Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong.

"Ini bukan hanya langkah hukum,

sa.

Salah caranya dengan memberikan amnesti dan abolisi kepada dua tokoh tersebut. Sikap kenegarawanan tersebut, lanjut Ongen, yang membuat Prabowo layak disebut sebagai Bapak Demokrasi.

"Menurut saya, Prabowo layak disebut Bapak Demokrasi. Bayangkan saja, beliau adalah jenderal jebolan Orde Baru, bahkan menantu dari Presiden Soeharto tetapi dalam perjalanan politiknya, beliau menunjukkan dedikasi luar biasa pada prinsip-prinsip demokrasi," kata Ongen.

Ia berharap seluruh pihak yang mendapatkan pengampunan dari Prabowo



sangat berarti bagi dirinya dan keluarga setelah melewati masa-masa sulit. "Kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih dan sangat tulus serta mendalam kepada Presiden Prabowo Subianto, atas pemberian amnesti terhadap kasus UU ITE yang menimpa saya sejak akhir 2015," kata Ongen, doktor kelautan lulusan IPB, dosen perguruan tinggi, dan memiliki keterampilan membuat pesawat terbang tanpa awak (drone).

Ia mengaku perkara hukum yang menjeratnya memang mengganggu perjalanan hidupnya. "Perjalanan kasus

ini adalah sejarah baru dalam wajah demokrasi kita. Meski masih ada saja yang nyinyir, rakyat yang jernih akan tahu bahwa ini bukti seorang pemimpin yang memikirkan rekonsiliasi, bukan rivalitas," kata Ongen.

Menurut dia, Prabowo menyadari adanya potensi perpecahan bangsa jika dua tokoh tersebut masuk ke dalam tahanan menjalankan masa hukuman. Oleh karena itu, lanjut Ongen, Prabowo memutuskan untuk meredam potensi tersebut dan menggandeng semua pihak untuk bersatu membangun bang-

dapat mempertanggungjawabkan dengan memberikan kontribusi terbaik terhadap pembangunan bangsa.

Lantas, apa ucapan untuk Jokowi? "Untuk Pak Jokowi, saya ucapkan selamat menjalani hidup sebagai warga negara biasa pasca lengser. Saya berharap beliau tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan dalam setiap langkah hidupnya," sambung Ongen.

Nah, usai menerima amnesti, seharusnya Ongen sudah bisa mengembangkan drone jenis lain lagi. Boleh jadi drone rekonsiliasi. ●

NALAR KEBIJAKAN DI HADAPAN PENGADILAN

Pada 18 Juli 2025, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menjatuhkan vonis 4,5 tahun penjara kepada Thomas Lembong, mantan Menteri Perdagangan, atas kebijakan impor 105.000 ton gula mentah tahun 2015.

Kebijakan itu diambil untuk menstabilkan pasokan dan harga saat produksi nasional tidak merata mencukupi. Tak ada bukti Tom menerima gratifikasi atau memperkaya diri.

Bahkan, dalam amar putusan, pengadilan mengakui Tom bertindak tanpa motif pribadi. Namun, karena dianggap melanggar prosedur administratif dan menyebabkan kerugian negara, Tom tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.

Pada 31 Juli 2025, Presiden Prabowo Subianto dengan persetujuan DPR memberikan abolisi (penghapusan pidana) kepada Tom. Banyak yang menyambut positif meski ada yang menilai sekadar strategi merebut simpati publik atau manuver politik.

Meski sudah mendapatkan abolisi, kasus Tom tetap penting sebagai pelajaran publik, terutama saat logika kebijakan berhadapan dengan tafsir hukum pengadilan.

Putusan ini menandai babak baru relasi kebijakan dan hukum di Indonesia, saat kebijakan publik yang sah dalam konteks kebutuhan negara bisa dihukum layaknya kejahatan. Terjadi pergeseran: dari ruang debat rasional berbasis argumen dan data ke arena penghukuman berbasis tafsir hukum yang sempit.

Pertanyaannya: apakah pejabat publik yang membuat kebijakan demi mengatasi persoalan nyata kini mesti siap dipenjara jika hasilnya tak sesuai dengan harapan?

Jika kasus ini berhenti pada abolisi dan preseden ini dibiarkan tanpa kajian, konsekuensinya serius bagi tata kelola pemerintahan. Ini bukan sekadar soal hukuman pada satu orang, melainkan soal keberanian birokrasi mengambil keputusan strategis. Jika dibiarkan, nalar kebijakan akan mati pelan-pelan: kemampuan

OLEH: YANUAR NUGROHO

-Dosen STF Driyarkara

-Pendiri dan Penasihat Nalar Institute dan Centre for

- Innovation Policy and Governance (CIPG)

-Deputi II Kepala Staf Kepresidenan RI 2015-2019

menimbang, memilih, dan bertindak di tengah ketidakpastian, yang justru jadi syarat pemerintahan yang waras.

Kebijakan yang dipakai menjerat Tom bukan tanpa dasar. Ia diambil secara resmi melalui instrumen Kementerian Perdagangan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga gula nasional. Saat itu, konsumsi domestik sekitar 2,12 juta ton per tahun, sementara produksi dalam negeri, meski tampak surplus secara agregat, mengalami ketimpangan distribusi dan kualitas di tingkat daerah.

Dalam situasi itu, impor gula mentah 105.000 ton melalui swasta diputuskan sebagai langkah menjaga buffer stock dan menstabilkan harga. Kebijakan ini pun bukan hal baru. Indonesia sejak lama mengandalkan impor untuk menutup celah pasokan komoditas strategis.

Namun, keputusan itu kemudian dijera hukum karena dinilai melanggar prosedur dan menyebabkan kerugian negara Rp578 miliar, angka yang dihitung dari selisih harga impor terhadap harga

patokan dan potensi pendapatan negara, bukan dari kerugian aktual. Padahal, ini murni perhitungan hypothetical loss.

Bahkan, dalam amar putusan, hakim mengakui tak ada keuntungan pribadi yang diperoleh Tom, dan kebijakan itu diambil dalam kapasitasnya sebagai pejabat negara. Kerugian yang dibangun dari asumsi dijadikan dasar penghukuman, mengabaikan konteks kebijakan, tujuan intervensi pasar, dan prinsip dasar bahwa kebijakan publik kerap harus diambil sebelum risiko jadi kenyataan.

Logika hukum dalam kasus ini mengaburkan batas kesalahan administratif, keputusan kebijakan, dan tindak pidana. Padahal, dalam pemerintahan yang sehat, kebijakan selalu punya ruang diskresi, khususnya saat kondisi darurat atau saat tiadanya opsi ideal. Jika setiap diskresi diperlakukan sebagai delik pidana, seluruh proses pengambilan keputusan yang mengandung risiko akan berubah jadi ladang jebak hukum.

Dalam konteks ini, bukan hanya keberanian birokrasi membuat kebijakan yang terancam mati, melainkan juga nalar kebijakan itu sendiri.

Robert Behn (1995) bilang, akuntabilitas yang menghindari risiko (risk-averse accountability) mendorong birokrasi bermain aman, menghindari inovasi, dan membiarkan masalah membusuk karena takut dipersalahkan.

Ini juga ditegaskan OECD (2018) yang mengingatkan bahaya "kriminalisasi kesalahan kebijakan yang beritikad baik" karena melumpuhkan kapasitas negara untuk belajar dari kesalahan dan bertindak cepat dalam situasi darurat.

Lebih problematik lagi, perhitungan kerugian negara yang jadi dasar vonis itu spekulatif, bukan aktual. Tak ada dana publik yang sungguh hilang atau disalahgunakan. Pendekatan hypothetical loss ini lama dikritik karena kerugian negara dalam konteks pidana harus nyata dan terukur.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, pendekatan kuantitatif yang mengabaikan proses kebijakan dan niat pejabat justru berpotensi mereduksi keadilan substantif.

Berbagai literatur kebijakan seperti ditulis Paul 't Hart dan Karen Tindall (2009) juga membedakan kegagalan kebijakan (policy fiasco) dari tindakan kriminal: tak semua hasil buruk kebijakan bisa dijadikan obyek penghukuman. Jika hukum tak mampu membedakan antara kesalahan niat dan kesalahan akibat kompleksitas sistem, kita tak sedang menegakkan keadilan, tapi membungkam kemampuan negara untuk bertindak.

Matinya nalar kebijakan

Mereka yang paham kebijakan publik tahu, tak ada kebijakan yang hitam-putih, sepenuhnya benar atau salah. Kebijakan selalu lahir dari rangkaian pertimbangan dengan data yang tak pernah lengkap, sumber daya terbatas, desakan waktu, dan tuntutan politik.

Karena itu, kualitas kebijakan publik diukur bukan dari kesempurnaan hasilnya, melainkan kemampuan pengambil kebijakan menimbang trade-offs dan memilih opsi yang paling mungkin membawa manfaat optimal dalam kondisi serba terbatas. Proses kebijakan itu soal mengelola ketidakpastian, bukan menghindarinya (Pearson dan Crewe, 2002).

Saat kebijakan dinilai hanya dari hasil akhirnya, apalagi dengan

kriteria legalistik sempit, logika dasar kebijakan dibelokkan. Mengapa? Setiap kebijakan, sebaik apapun proses pembuatannya, pasti punya konsekuensi-tak-termaksud (unintended consequences). Ini prinsip klasik sejak Merton menulis tentang fenomena *unanticipated consequences of purposive action* (1936).

Dalam pemerintahan, konsekuensi ini bukan berarti kesalahan, melainkan bagian tak terhindarkan dari kompleksitas sistem sosial dan ekonomi. Sunstein (2005) menekankan, dalam pembuatan kebijakan, terutama dalam situasi yang perlu kehati-hatian, unintended consequences itu wajar dan seharusnya dikelola, bukan dihukum. Maka, jika ia mulai diperlakukan sebagai delik hukum, kita tengah menuju rezim tak rasional, dengan ketakutan mendominasi penalaran.

Konsekuensinya serius. Satu, takkan ada lagi ruang aman bagi inovasi kebijakan. Setiap kebijakan baru, terutama yang transformatif, pasti menantang status quo dan berisiko. Jika risiko disamakan dengan kesalahan hukum, pejabat publik akan memilih diam tak bertindak.

Dua, ini menciptakan kelumpuhan kebijakan (*policy paralysis*) di birokrasi: pembuat kebijakan lebih memilih diam atau menjalankan prosedur secara mekanistik tanpa substansi, demi menghindari kemungkinan kriminalisasi. Ini disebut *technocratic defensiveness*, saat aktor kebijakan lebih sibuk melindungi diri ketimbang menyelesaikan masalah (Fischer dan Forester, 1993).

Tiga, matinya kepemimpinan teknokratis. Mereka yang kompeten dan berintegritas akan enggan mengambil posisi strategis di sektor publik jika setiap kebijakan bisa dibawa ke pengadilan.

Apa yang tersisa? Para pembuat kebijakan yang hanya main aman: tidak ambil risiko, tidak membuat keputusan substantif, dan tidak mengubah situasi. Dalam jangka panjang, negara kehilangan kemampuan berpikir strategis dan publik kehilangan kepercayaan.

Implikasi

Jika saja tak ada abolisi, vonis terhadap Tom jadi preseden, yang menciutkan nyali birokrasi. Karena yang sedang dibangun adalah sebuah rezim ketakutan: di mana setiap kebijakan, seberapa pun masuk akal dan baik itikadnya, dapat dijerat hukum jika hasilnya tak sesuai harapan.

Dalam situasi ini, pejabat publik akan lebih takut salah daripada terdorong untuk benar. Ini menciptakan *administrative chilling effect*: birokrasi beku bukan karena tidak tahu, tapi karena tidak berani (Hood, 2010).

Kriminalisasi kebijakan juga melumpuhkan pengambilan keputusan (Lipsky, 1980)—dari tingkat operasional hingga tingkat strategis. Pejabat-teknokrat akan menghindari keputusan yang berdampak besar, memilih jadi pelaksana aturan ketimbang

penggerak perubahan. Mereka hanya pandai bertahan, bukan memimpin. Akibatnya negara jadi otopilot—bergerak tanpa arah, hidup tanpa visi.

Selain itu, kerusakan struktural: legitimasi kepemimpinan tergerus, regenerasi teknokrasi macet. Jangka panjang, talenta terbaik hilang karena sistem lebih suka menghukum keberanian ketimbang memberi ruang bagi integritas.

Yang lebih mengkhawatirkan, relasi eksekutif dan yudikatif jadi timpang. Saat semua kebijakan publik bisa diuji lewat tafsir hukum yang mengabaikan konteks dan kompleksitas, proses pembuatan kebijakan tunduk pada mekanisme hukum yang prosedural: kering, dangkal, dan tercerabut dari kenyataan. Akibatnya, negara tak lagi jadi ruang deliberasi kebijakan, tapi ladang penghukuman para teknokrat.

Kita mesti apa?

Jangan biarkan kasus ini berlalu begitu saja. Ke depan, negara harus didesak mengambil sikap tegas dan rasional menyelamatkan nalar kebijakan publik dari kepongungan legalisme prosedural yang membutakan.

Pertama, tegas bedakan malaadministrasi, kegagalan kebijakan, dan tindak pidana korupsi. Perlu mekanisme evaluasi kebijakan berbasis konteks, akuntabilitas, dan pembelajaran, bukan sekadar penghukuman yang membabi buta.

Kedua, sistem peradilan harus punya kapasitas memahami proses kebijakan. Aparat penegak hukum tak cukup hanya tahu hukum, tapi juga harus punya literasi kebijakan. Tanpa itu, pengadilan jadi arena pembantaian logika kebijakan oleh tafsir hukum sempit dan prosedural.

Dan yang paling penting, membangun kembali keberanian di tengah ketakutan. Bagi para teknokrat dan profesional muda yang mulai ragu masuk atau bertahan di ruang publik karena kasus seperti ini, saya hanya mau bilang: jangan pergi. Negeri ini butuh Anda. Justru karena ruangnyanya sempit dan mungkin menakutkan,

kehadiran Anda yang waras, jujur, dan berani jadi makin penting.

Kita tak bisa menyerahkan negeri ini hanya kepada mereka yang kebal tak tersentuh. Kita butuh orang-orang yang meski tahu risikonya, tetap memilih bertindak demi kepentingan publik.

Akhirnya, vonis terhadap Tom Lembong bukan hanya ketidakadilan pada satu orang, tapi pengkhianatan terhadap prinsip akal sehat dalam pemerintahan.

Kita saksikan bagaimana hukum kehilangan kebijaksanaan, dan negara sempat kehilangan keberpihakan pada keberanian. Meski kini dikoreksi lewat abolisi, keberpihakan ini tak boleh berhenti hanya pada kasus ini.

Ketika pejabat dihukum bukan karena mencuri, melainkan karena berpikir dan bertindak, yang sedang dihukum sesungguhnya adalah keberanian itu sendiri. Jika ini dibiarkan, negeri ini akan dipimpin oleh mereka yang tak pernah mencoba, tak pernah berpikir, dan tak pernah mengambil risiko.

Kebijakan takkan lagi lahir dari nalar dan keberpihakan, tapi ketakutan dan ketakberdayaan. ●





Kukuhkan 50 Paskibraka Sumsel

TEKANKAN SEMANGAT SATRIA DAN TELADAN BANGSA

Dalam suasana penuh khidmat, Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru, didampingi Wakil Gubernur H. Cik Ujang, mengukuhkan 50 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Sumsel Tahun 2025 di Griya Agung.

Momen ini menjadi tonggak penting bagi para pemuda pilihan yang akan bertugas mengibarkan Duplikat Bendera Pusaka pada peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI.

Prosesi pengukuhan diawali dengan laporan dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumsel. Ia menyampaikan bahwa para calon Paskibraka telah melalui proses seleksi ketat dan pembinaan intensif, meliputi latihan kepemimpinan, baris-berbaris, hingga tata cara mengibarkan, menurunkan, serta menyimpan bendera secara benar.

Sebanyak 25 putra dan 25 putri terbaik yang mewakili seluruh kabupaten/kota di Sumsel secara resmi dikukuhkan. Dalam prosesi tersebut, atribut Paskibraka dipasangkan secara simbolis oleh Gubernur Herman

Deru selaku pembina upacara.

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa menjadi Paskibraka bukan hanya tentang tugas mengibarkan bendera, tetapi juga tentang menjaga kehormatan diri dan nama baik daerah.

"Pengukuhan ini menandai kesiapan kalian untuk bertugas sekaligus menjadi teladan bangsa. Junjung tinggi nilai Pancasila dan jadikan pengabdian ini sebagai bekal untuk masa depan," tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa semangat satria dan rela berkorban harus tercermin dalam sikap sehari-hari para anggota Paskibraka, baik di lingkungan sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Gubernur berharap pengalaman ini akan membentuk karakter unggul para pemuda.

Pengukuhan Paskibraka menjadi bagian penting dari rangkaian peringatan HUT RI ke-80 di tingkat Provinsi



Sumsel. Mereka akan menjadi garda utama dalam prosesi pengibarannya merah putih pada upacara kenegaraan di halaman Griya Agung, 17 Agustus mendatang.

Usai prosesi, yel-yel penuh semangat dari para anggota Paskibraka menggema di seluruh ruangan. Sorak sorai itu disambut tepuk tangan para tamu undangan, menandai kebanggaan yang terpancar dari wajah para anggota.

Momen haru tak terelakkan ketika para anggota Paskibraka dipertemukan dengan keluarga masing-masing. Banyak di antara mereka yang menitikkan air mata bahagia sambil memeluk orang tua.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel Dr. Yulianto para kepala OPD, serta tokoh masyarakat yang memberikan dukungan moral bagi para anggota Paskibraka.

Dengan pengukuhan ini, Sumsel kembali menunjukkan komitmennya dalam membentuk generasi muda yang disiplin, berkarakter, dan memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Para anggota Paskibraka diharapkan menjadi inspirasi bagi pemuda lainnya untuk terus berkarya bagi bangsa. ●





Perayaan HUT ke-80 Republik Indonesia TEKANKAN ARTI PERJUANGAN DAN WARISAN BUDAYA

Halaman Griya Agung Palembang menjadi pusat peringatan detik-detik Proklamasi HUT ke-80 Kemerdekaan RI, Minggu (17/8/2025). Gubernur Sumsel Dr. H. Herman Deru, MM memimpin upacara sebagai Inspektur Upacara dengan penuh khidmat.

Upacara berlangsung dengan tertib, dimulai pengibaran bendera oleh Paskibraka. Suasana hening menyelimuti halaman ketika Sang Saka Merah Putih berkibar gagah di langit Palembang.

Pembacaan teks UUD 1945 dilakukan Ketua DPRD Sumsel, Andie Dinialdie. Sementara itu, AKBP Irfan Abdul Gofar bertindak sebagai Komandan Upacara.

Fanesa Tri Margareta, pelajar asal Muara Enim, mendapat kehormatan sebagai pembawa bendera. Sedangkan tiga pengibar bendera berasal dari Muba, OKU, dan OKU Timur.

Komandan Paskibraka, Letda Adm Inisenius Karel Yoga Purwanto, sukses memimpin jalannya pasukan. Generasi muda ini memperlihatkan kedisiplinan yang patut diteladani.

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa kemerdekaan harus dimaknai lebih dari sekadar seremoni.

"Hari ini kita memperingati perjuangan para pahlawan. Tugas kita adalah melanjutkannya dengan cara membangun bangsa," ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya melestarikan budaya daerah. Menurutnya, penggunaan pakaian adat Sumsel dalam upacara adalah bentuk nyata menjaga warisan leluhur.

"Ini cara kita menjaga jati diri bangsa. Budaya lokal adalah bagian dari kekayaan nasional yang tidak boleh hilang," tegasnya.

Deru mengajak seluruh masyarakat Sumsel agar menjadikan momentum HUT RI sebagai motivasi berkarya dan

berinovasi. "Semangat ini harus menggerakkan kita semua," katanya.

Selepas upacara, Forkopimda melanjutkan agenda menyaksikan upacara kenegaraan dari Istana Negara secara virtual.

Peringatan HUT ke-80 RI di Griya Agung pun menjadi bukti bahwa nilai perjuangan dan pelestarian budaya bisa berpadu menjadi satu, menguatkan nasionalisme masyarakat Sumsel.

Kemerdekaan Bukan Hadiah, Tapi Hasil Perjuangan

Sementara sebelumnya, Taman Makam Pahlawan Ksatria Ksetra Siguntang Palembang menjadi tempat apel kehormatan dan renungan suci digelar untuk memperingati HUT ke-80 Republik Indonesia.

Gubernur Sumsel H. Herman Deru bersama Wakil Gubernur H. Cik Ujang hadir dalam upacara tersebut, didampingi Forkopimda Sumsel. Apel dipimpin Pangdam II/Sriwijaya Mayjen TNI Ujang Darwis sebagai inspektur upacara.

Lampu dipadamkan, obor dinyalakan, dan naskah apel kehormatan dibacakan. Suasana hening seakan membawa seluruh peserta kembali pada masa perjuangan, mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur.

Sebanyak 1.468 anggota TNI, 77 anggota Polri, 32 pegawai sipil, 150 pejuang rakyat, serta 43 pahlawan tak dikenal tercatat dimakamkan di TMP tersebut. Mereka adalah saksi sejarah sekaligus simbol pengorbanan demi tegaknya NKRI.

Pangdam II/Sriwijaya dalam amanatnya menegaskan bahwa pengorbanan para pahlawan adalah jalan kebaktian yang harus dilanjutkan oleh generasi penerus.

"Kami bersumpah, perjuangan saudara adalah perjuangan kami juga," katanya dengan tegas.

Herman Deru menekankan bahwa kemerdekaan bangsa ini tidak datang begitu saja.

"Kemerdekaan bukan hadiah, melainkan hasil pengorbanan jiwa dan raga para pejuang. Kita wajib menjaga dan mengisinya dengan pembangunan," ujarnya.

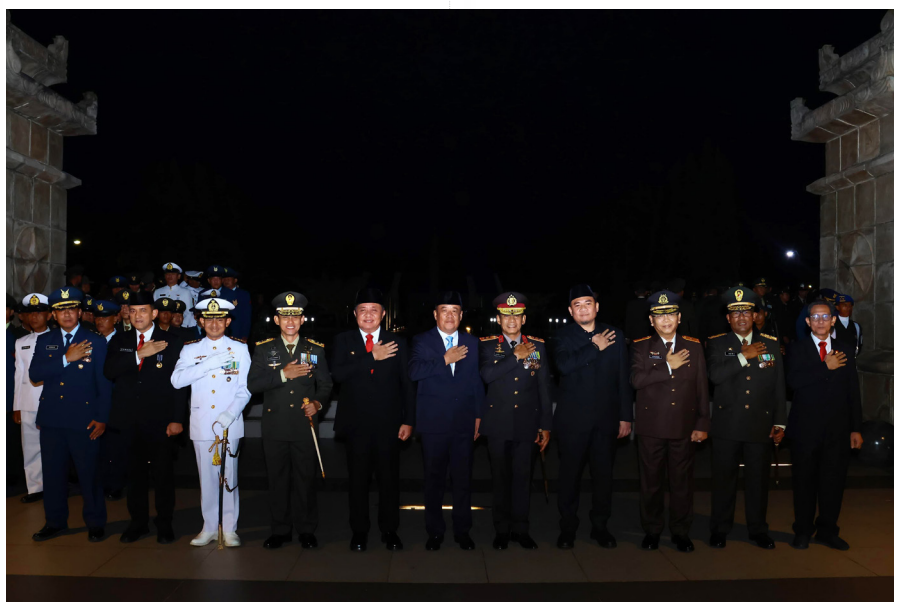
Menurutnya, renungan suci tidak boleh dipandang sebagai kegiatan rutin belaka, melainkan momen yang mengingatkan masyarakat pada nilai luhur perjuangan.

Cik Ujang menambahkan bahwa upacara ini menjadi refleksi untuk menguatkan persatuan bangsa.

"Kemerdekaan bisa bertahan 80 tahun karena kita bersatu. Persatuan itulah yang harus terus dijaga," katanya.

Forkopimda Sumsel juga menegaskan komitmen menjaga amanah perjuangan para pahlawan melalui kerja nyata di bidang masing-masing. Mereka sepakat bahwa semangat pahlawan harus hadir dalam setiap langkah pembangunan daerah.

Peserta apel tampak terharu mengikuti prosesi. Cahaya obor yang menyala di tengah kegelapan malam menjadi simbol pengabdian dan pengorbanan yang tidak akan pernah padam.



Renungan suci ini menjadi pengingat bahwa setiap tetes darah para pahlawan adalah pondasi berdirinya bangsa. Gen-

erasi kini dan mendatang wajib menjaga kemerdekaan dengan dedikasi dan kerja nyata untuk Indonesia. • ADV



LUNCURKAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK UNTUK RAKYAT

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) resmi launching program Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor. Program ini dicanangkan langsung oleh Gubernur Sumsel H. Herman Deru didampingi Wakil Gubernur H. Cik Ujang di Atrium PTC Mall Palembang.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 27 Tahun 2025. Tujuannya adalah meringankan beban masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan administrasi pembayaran pajak. Program ini berlaku selama 80 hari penuh, dimulai pada 17 Agustus 2025.

Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumsel sebagian besar bersumber dari pajak yang dibayarkan masyarakat. Karena itu, masyarakat berperan penting dalam pembangunan infrastruktur.

"Pajak yang dibayarkan langsung kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan. Jalan, jembatan, hingga fasilitas umum lainnya, semuanya bersumber dari partisipasi masyarakat. Jadi mari manfaatkan mo-

mentum ini," ujarnya.

Herman Deru menambahkan, pemutihan ini bukan hanya hadiah bagi rakyat Sumsel, melainkan juga dorongan agar semua masyarakat tertib pajak. Ia berharap kesadaran itu terus berlanjut

meski program berakhir.

Menurutnya, pajak adalah bentuk hubungan timbal balik antara masyarakat dan pemerintah. Ketika masyarakat taat membayar pajak, pemerintah dapat memperbaiki in-



frastruktur sehingga kenyamanan berkendara meningkat.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa setelah masa pemutihan berakhir, aparat kepolisian bersama instansi terkait akan melakukan penertiban lebih ketat. Hologram khusus akan dipasang pada kendaraan yang telah memenuhi kewajiban pajak.

“Sumsel berbeda dengan daerah lain. Saat yang lain menaikkan tarif, kita justru memberikan keringanan. Saya ingin setelah 80 hari ini, semua kendaraan di Sumsel tertib administrasi,” tegasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel, H. Achmad Rizwan, menambahkan, kebijakan ini sekaligus menjadi stimulus agar realisasi PAD semakin meningkat. Hingga 15 Agustus 2025, sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sudah mencapai 57,45 persen, sementara Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terealisasi 48,40 persen.

“Pembayaran pajak bisa dilakukan di seluruh layanan, mulai dari Samsat Mall, Samsat Drive Thru, hingga Samsat Desa. Dengan begitu masyarakat bisa mudah mengakses layanan ini,” ungkapnya.

Peluncuran program tersebut dihadiri Kapolda Sumsel Irjen Pol Andi Rian Ryacudu, Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumsel Hj. Melinda, serta sejumlah kepala OPD. Acara berlangsung meriah dengan semangat perayaan ke-



merdekaan.

Herman Deru pun menutup sambutannya dengan mengajak seluruh kepala daerah di kabupaten/kota untuk ikut

mensosialisasikan kebijakan ini.

“Semakin banyak yang tahu, semakin besar manfaatnya bagi pembangunan di Sumsel,” pungkasnya. • ADV





SATYALANCANA KARYA SATYA PADA 321 ASN SIMBOL LOYALITAS DAN INTEGRITAS PEGAWAI

Sebanyak 321 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menerima tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden RI Prabowo Subianto. Penyematan tanda kehormatan ini dilakukan langsung oleh Gubernur Sumsel, H. Herman Deru, dalam upacara di Griya Agung Palembang, Rabu (13/8/2025).

Penghargaan bergensi ini diberikan sebagai bentuk apresiasi negara kepada ASN yang telah menunjukkan dedikasi, loyalitas, dan integritas tinggi dalam menjalankan tugas, baik di tingkat pimpinan maupun staf.

Gubernur Herman Deru menjelaskan, Satyalancana Karya Satya tidak dibedakan berdasarkan pangkat atau golongan, melainkan masa kerja dan pengabdian kepada negara.

"Yang menjadi dasar adalah lamanya pengabdian, kecakapan, kejujuran, dan disiplin dalam bekerja," ujarnya.

Menurut Herman Deru, penganugerahan ini adalah kebanggaan tersendiri bagi Sumsel. Meski seluruh pemerintah daerah di Indonesia melaksanakannya, tidak semua ASN berkesempatan men-

erima penghargaan ini.

"Artinya, ini adalah tanda bahwa bapak/ibu telah memberikan kontribusi nyata bagi daerah," katanya.

Ia menambahkan, kemajuan Sumsel tidak lepas dari keterlibatan ASN.

"Saya ucapkan terima kasih atas masa pengabdian bapak/ibu. Saya sendiri pernah menerima Satya Lencana 10 tahun, jadi saya tahu bagaimana rasa bangga ini," ungkapnya.

Gubernur juga mengingatkan bahwa





dari hampir 300 juta penduduk Indonesia, hanya sekitar 4 juta yang berstatus ASN.

“Bapak/ibu telah melewati berbagai fase, baik itu pergantian presiden maupun dinamika kebijakan,” ujarnya.

Herman Deru menekankan pentingnya fokus pada pekerjaan, menjaga marwah ASN, disiplin waktu, dan keberanian mental.

“Gaji kita berasal dari rakyat, maka integritas adalah harga mati,” tegasnya.

Ia pun mengimbau para pimpinan memberi kesempatan staf untuk berkembang.

“Staf harus cepat, tajam, pintar, tapi jangan mendahului pimpinan,” pesannya.

Pada kesempatan itu, Satyalancana Karya Satya 30 tahun diberikan kepada 52 ASN, diwakili Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumsel, Bambang Pramono.

Untuk kategori 20 tahun, penghargaan diterima 56 ASN, diwakili Kepala Bappeda Sumsel, Regina Aryanti. Sedangkan Satya Lencana 10 tahun disematkan kepada 213 ASN, diwakili Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UKM Sumsel, Morena Suci Basmark.

Acara ini turut dihadiri Wakil Gubernur Sumsel, H. Cik Ujang, unsur Forkopimda, dan para kepala Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumsel.

Penyematan ini diharapkan menjadi

pemacu semangat ASN untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sumatera Selatan. • ADV



Wujud Sinergi Antarlembaga HIBAHKAN GEDUNG UNTUK DITLANTAS POLDA SUMSEL

Dalam wujud nyata sinergi antarlembaga, Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru secara resmi menyerahkan hibah gedung eks Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Palembang I kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sumsel. Serah terima dilakukan di Auditorium Bina Praja..

Penyerahan aset tersebut ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima Sertifikat Nomor 402 Tahun 1996 atas nama Pemerintah Provinsi Sumsel kepada institusi kepolisian, khususnya Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sumsel

Herman Deru menyampaikan rasa harunya dalam sambutan. Ia mengenang masa awal kariernya sebagai PNS di kantor tersebut, yang kini resmi diserahkan sebagai dukungan terhadap tugas Ditlantas Polda Sumsel.

"Saya haru karena ini adalah kantor pertama saya sebagai pegawai negeri. Maka dari itu, saya ingin penyerahan ini tidak dihambat agar gedung ini tidak dialihfungsikan ke hal yang tidak sesuai," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa penyerahan hibah ini telah sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 390/BP-KAD/2025. Adapun luas tanah yang diserahkan mencapai 4.625 meter persegi.

Menurut Herman Deru, hibah ini bukan sekadar pemindahan aset, melainkan simbol sinergi antara Pemprov dan Polda dalam mendukung pelayanan masyarakat.

"Nilainya mungkin tidak besar, tapi maknanya sangat dalam. Ini bentuk nyata dari sinergitas," tegasnya.

Ia menambahkan, dinamika pelayanan publik terutama di bidang lalu lintas membutuhkan sarana dan prasarana yang memadai. Ia mencontohkan perubahan dari sistem tilang manual ke sistem tilang elektronik (ETLE) yang menuntut kesiapan infrastruktur.

"Kita sangat bergantung pada peran kepolisian dalam pengaturan lalu lintas. Namun sayangnya, jumlah personel masih belum seimbang dengan kebutuhan di lapangan, terutama di beberapa kecamatan," ujarnya.

Selain nilai historisnya, Deru juga menyebut lokasi gedung sangat strategis. Terletak berdampingan dengan



kantor Bapenda Sumsel, bangunan ini menjadi titik sentral aktivitas pelayanan publik di Palembang.

"Saya titip gedung ini kepada Ditlantas untuk dirawat. Bila perlu, tambahkan ornamen khas Sumsel seperti songket dan tanjak agar identitas daerah tetap melekat," pesan Deru.

Ia juga menyebut, kontribusi sektor kendaraan bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat signifikan.

"Sekitar 50 persen APBD Sumsel bersumber dari pengelolaan kendaraan, maka kolaborasi ini harus dijaga," katanya.

Kapolda Sumsel Irjen Pol. Andi Rian R. Djajadi turut menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan Pemprov Sumsel. Menurutnya, penyerahan ini merupakan representasi dari komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan keamanan



Nilainya mungkin tidak besar, tapi maknanya sangat dalam. Ini bentuk nyata dari sinergitas.

masyarakat.

"Gedung ini nantinya akan menjadi kantor Ditlantas yang lebih representatif, responsif, dan terintegrasi. Kami akan mengelola hibah ini secara bertanggung jawab sesuai aturan yang berlaku," tegas Kapolda.

Terima Tiga Aset dari Kejati

Sementara Gubernur Herman Deru menyambut penuh rasa syukur dan apresiasi atas keberhasilan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam mengembalikan tiga aset strategis milik daerah yang sempat dikuasai pihak ketiga selama bertahun-tahun.

Herman Deru menerima secara simbolis penyerahan aset perkara tindak pidana korupsi Batanghari Sembilan dari Kepala Kejati Sumsel, Yulianto. Aset tersebut tersebar di tiga kota besar yakni Yogyakarta, Bandung, dan

Palembang.

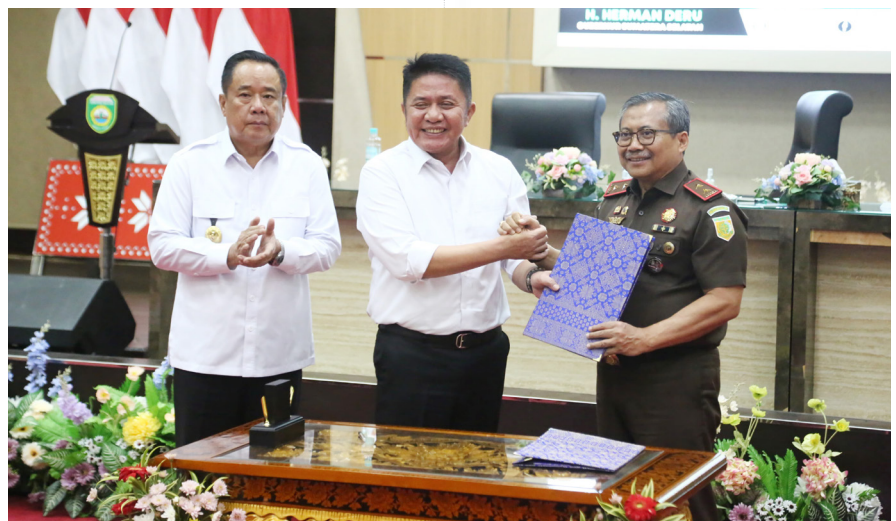
Aset pertama berupa asrama mahasiswa milik Pemprov Sumsel yang terletak di Jalan Puntodewo No. 9, Yogyakarta, berdiri di atas tanah seluas 1.942 m². Aset tersebut sempat dikuasai Yayasan Batanghari Sembilan sejak 1954 dan pada 2020 berpindah ke Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Di Bandung, aset yang dikembalikan berupa bangunan di atas lahan seluas 1.717 m² di Jalan Purnawar-

man No. 57.

Sedangkan aset ketiga berada di Palembang, berupa bangunan dengan luas lahan 2.800 m² di Jalan Mayor Ruslan, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II.

Gubernur menilai keberhasilan pengembalian aset ini bukan sekadar kemenangan hukum, tetapi juga pemulihan harga diri Sumsel sebagai provinsi yang punya sejarah dan martabat.



man No. 57.

Sedangkan aset ketiga berada di Palembang, berupa bangunan dengan luas lahan 2.800 m² di Jalan Mayor Ruslan, Kelurahan Duku, Kecamatan Ilir Timur II.

Gubernur menilai keberhasilan pengembalian aset ini bukan sekadar kemenangan hukum, tetapi juga pemulihan harga diri Sumsel sebagai provinsi yang punya sejarah dan martabat.

"Nilai aset ini mungkin bisa dihitung, tapi sejarahnya tidak ternilai.

"Permasalahan aset adalah salah satu fokus kami. Kami akan terus mengambil tindakan tegas terhadap oknum-oknum yang merugikan keuangan dan kekayaan negara," ujar Yulianto.

Ia juga mengimbau agar penataan aset dilakukan dengan sistematis agar tidak terulang sengketa kepemilikan.

"Penataan aset yang baik adalah kunci pencegahan pelanggaran di masa mendatang," tegasnya. ●



JAWA BARAT KEMBALI JADI PRIMADONA INVESTASI NASIONAL

Rp 72,5 Triliun Mengalir Hingga Pertengahan 2025

Jawa Barat kembali mencatatkan prestasi sebagai provinsi dengan nilai investasi tertinggi di Indonesia.

Hingga Juli 2025, total realisasi investasi yang masuk telah menembus angka fantastis yakni Rp 72,5 triliun, berdasarkan laporan resmi Kementerian Investasi/BKPM RI.

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyambut capaian ini dengan penuh apresiasi. Ia menyebut keberhasilan ini sebagai buah dari kerja kolektif yang solid mulai dari level pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga masyarakat akar rumput dalam menciptakan ekosistem investasi yang aman, nyaman, dan berdaya saing.

"Saya berterima kasih kepada seluruh pihak dari RT, RW, kepala desa, camat, hingga OPD yang telah menjaga stabilitas dan menghapus berbagai hambatan infrastruktur maupun non-

teknis. Hasilnya, Jawa Barat tetap menjadi tujuan utama para investor," ujar Dedi, Senin 4 Agustus 2025.

Dedi Mulyadi menjelaskan, angka investasi dipengaruhi juga dengan upaya mendekatkan industri pada masyarakat.

Ia menjabarkan soal masalah investasi yang terkait dengan perizinan dan rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup.

"Diperlukan kecerdasan kepala daerah, bagaimana gubernur bupati berkoordinasi agar ini tidak terhambat," jelas Gubernur Jawa Barat.

Mantan Bupati Purwakarta ini membeberkan soal progres pembangunan fisik yang harus cepat. "Yang kedua misalnya tanah. Waktu awal pembebasan misalnya cuma Rp200 ribu atau

Rp300 ribu," sebutnya.

Dia juga menceritakan, saat perusahaan dikejar waktu, harga yang ditawarkan masyarakat langsung naik.

"Nah, itu biasanya loncat tuh angkanya Rp3 juta, Rp4 juta. Nah, yang seperti itu perlu pendekatan," ungkapnya.

Dedi Mulyadi mengaku kerap mengirim surat pada masyarakat untuk bertemu.

"Masalahnya apa, nanti orientasinya apa, dikasih penjelasan, win-win selesai. Nah, itu kan yang termasuk BYD seperti itu. Kemudian di Indramayu seperti itu," ceritanya.

Gubernur Jawa Barat menyebutkan, perkembangan industri yang sudah lebih baik.

"Industri yang padat karya hari ini sudah bergeser ke Indramayu, sebagian



Kuningan, sebagian lagi Cirebon, mudah-mudahan sebagian Majalengka," jelasnya.

Dari Investasi Menuju Lapangan Kerja

Namun, Pemprov Jabar tidak berpuas diri hanya menjadi magnet investasi. Langkah berikutnya adalah memastikan bahwa aliran modal ini berdampak nyata bagi rakyat, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja.

Untuk mewujudkan hal tersebut, mulai Agustus 2025, Jawa Barat akan mengimplementasikan sistem digital terpadu untuk proses rekrutmen tenaga kerja. Sistem ini akan menggantikan metode lamaran manual yang selama ini menyita waktu dan biaya.

"Dengan sistem digital yang terintegrasi, perusahaan bisa langsung mengakses database pencari kerja berdasarkan keahlian dan kualifikasi yang dibutuhkan. Administrasi baru dilakukan setelah ada kepastian diterima," jelas Dedi.

Langkah ini diharapkan tak hanya mempercepat proses perekrutan, tetapi juga mengurangi beban pencari kerja yang selama ini kerap harus berpindah dari satu lokasi ke lokasi lain hanya untuk sekadar melamar.

Dedi juga menyoroti sejumlah hambatan yang sering mengganggu kelancaran investasi, mulai dari persoalan izin lokasi, IUP, UKL-UPL, hingga persoalan teknis dalam sistem Online Single Submission (OSS).

Ia mengungkapkan perlunya kecermatan kepala daerah dalam mengelola antrian rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup. "Kalau kepala daerah tidak cerdas menyikapi itu, investor bisa mundur," katanya.

Dedi juga menyoroti pergeseran industri padat karya ke wilayah seperti Indramayu, Cirebon, Kuningan, dan Majalengka, sementara industri padat modal mulai tumbuh di Subang. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa distribusi pusat industri di Jawa Barat semakin merata.

Namun, masih ada kendala teknis seperti aturan alih fungsi lahan pertanian di tengah kawasan industri, yang membutuhkan negosiasi dan keberanian kepala daerah dalam membuat

keputusan yang berpihak pada solusi.

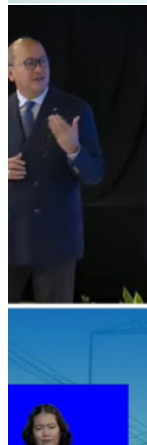
Salah satu poin penting yang disorot Dedi adalah ketidaksesuaian kualifikasi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri. Ia mencontohkan masih banyak masyarakat yang gagal seleksi kerja hanya karena lemah dalam matematika dasar.

"Kalau begitu, kita siapkan pelatihan dasar. Kursus hitung, kali, tambah. Pendidikan harus mengarah ke kebutuhan industri, bukan sekadar teori," tegasnya.

kan iklim investasi yang profesional dan transparan.

"Tingginya minat investor merupakan sinyal bahwa regulasi, infrastruktur, dan layanan perizinan di Jabar berjalan efektif. Kami terus berkomitmen mempercepat proses perizinan dan menjaga keterbukaan agar investor merasa nyaman menanamkan modalnya di sini," ujar Dedi Taufik.

Melihat tren positif ini, Pemprov Jawa Barat menargetkan nilai investasi akan terus melonjak hingga akhir tahun. Tidak



Ia juga menuntut adanya rencana rekrutmen industri secara terbuka dari tahun ke tahun, agar daerah bisa menyiapkan tenaga kerja secara tepat waktu.

Regulasi dan Layanan Kelas Dunia

Menurut Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jabar Dedi Taufik, kesuksesan ini mencerminkan keseriusan Pemprov Jabar dalam mencipta-

hanya dari sektor industri besar, tetapi juga dari UMKM dan proyek-proyek berbasis ekonomi hijau serta teknologi.

Dengan fondasi yang kuat, pelayanan yang adaptif, dan kerja sama lintas sektor yang solid, Jawa Barat optimistis akan tetap menjadi jantung pertumbuhan ekonomi nasional tak hanya sebagai tujuan investasi, tetapi juga sebagai motor penciptaan peluang kerja dan kesejahteraan rakyat. ●

JATIM JUARA UMUM LKS NASIONAL 3 KALI BERTURUT-TURUT

Provinsi Jawa Timur kembali mencatatkan sejarah gemilang dalam dunia pendidikan vokasi nasional. Untuk ketiga kalinya secara berturut-turut, Jawa Timur berhasil keluar sebagai juara umum Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Nasional Pendidikan Menengah (Dikmen) ke-33 2025.

Jatim berhasil menorehkan prestasi yang luar biasa, yakni 29 medali dari 37 bidang lomba, termasuk peringkat pertama dalam kategori eksibisi.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menggelar jamuan khusus untuk menyambut para pahlawan muda yakni siswa dan guru pembimbing kontingen LKS Jatim di Gedung Negara Graha di Surabaya, Jumat malam 1 Agustus 2025.

Dalam suasana penuh apresiasi, Khofifah mengumumkan tambahan bonus tunai tidak hanya bagi peraih medali, tetapi juga kepada seluruh peserta dan guru pembimbing, sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras dan dedikasi mereka.

Khofifah menegaskan bahwa semua peserta patut diapresiasi, termasuk mereka yang belum berhasil membawa pulang medali.

"Capaian ini adalah hasil gotong royong dan sinergi luar biasa antara siswa, guru pembimbing, dan seluruh pihak yang terlibat. Semua anak-anak kontingen LKS adalah anak-anak hebat," ungkapnya.

Berikut rincian bonus tunai yang disampaikan Gubernur Khofifah:

- * Medali Emas: Rp10 juta per siswa
- * Medali Perak: Rp7,5 juta per siswa
- * Medali Perunggu: Rp5 juta per siswa
- * Peserta non-medali: Rp3 juta per

siswa

- * Guru pembimbing emas: Rp5 juta
- * Guru pembimbing perak: Rp3 juta
- * Guru pembimbing perunggu: Rp2 juta

Selain itu, para peserta juga berhak atas beasiswa rata-rata senilai Rp385 juta, yang dapat digunakan untuk melanjutkan pendidikan tinggi maupun pengembangan keahlian lanjutan. Beasiswa ini berasal dari kombinasi sponsor, donatur, serta insentif dari pemerintah pusat.

Prestasi Spektakuler: 20 Emas, 6 Perak, 2 Perunggu

Jatim tampil mendominasi dengan

perolehan 20 medali emas pada berbagai bidang keahlian unggulan, seperti:

- * Teknologi dan Rekayasa: Autobody Repair, CAD-BIM, Electronics, Cyber Security, Welding, Mechatronics, dan Robot Manufacturing System
- * Manufaktur dan Konstruksi: Bricklaying, Mechanical Engineering CAD, Refrigeration and Air Conditioning
- * Layanan dan Pariwisata: Hotel Reception, Restaurant Service,



Fashion Technology

- * Teknologi Informasi dan Bisnis: Digital Marketing, IT Software Solutions for Business
- * Bidang lainnya: Fishery, Pharmacy, Motorcycle Repair & Maintenance, Health and Social Care

Jawa Timur juga meraih peringkat pertama di kategori pameran melalui lomba Welding Robot.

Sedangkan 6 medali perak diraih di bidang 3D Game Art, Automobile Technology, Cloud Computing, Heavy Equipment, Industrial Control, dan Metrology dan 2 medali perunggu diperoleh dari Hairdressing dan Nautica.

Komitmen Penguatan Kompetensi Global

Gubernur Khofifah turut menyampaikan pesan strategis kepada para siswa agar tidak berpuas diri dengan capaian saat ini. Ia menekankan pentingnya pendampingan berkelanjutan dan penguatan kompetensi ke tingkat ASEAN bahkan dunia.

"Kalau ingin menjaga prestasi, maka harus terus menempa diri. Saya mendorong agar ke depan ada penguatan pelatihan lanjutan untuk menyiapkan adik-adik menghadapi kompetisi di level internasional," jelasnya.

Di akhir sambutannya, Khofifah menyampaikan harapan agar semangat juang kontingen LKS dapat menular ke seluruh pelajar di Jawa Timur.

"Tunjukkan bahwa SMK Jatim mampu bersaing, unggul, dan berdaya saing global. Ayo, semangat berprestasi terus dikobarkan di sekolah masing-masing," pungkasnya.

Dinas Pendidikan: Hat trick yang Mengbanggakan

Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur, Aries Agung Paewai mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian ini. Ia menyebut dukungan penuh Gubernur Khofifah sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan.

"Tidak banyak gubernur di Indonesia yang begitu peduli dan hadir secara langsung mendampingi kontingen. Ibu Gubernur sejak awal pelepasan, sampai kami kembali, selalu ada. Itu memberi semangat luar



biasa bagi anak-anak dan guru pembimbing," ucap Aries.

Ia juga menyampaikan bahwa capaian ini bukan hanya soal medali, tetapi tentang keberhasilan membangun ekosistem pendidikan vokasi yang kompetitif dan relevan dengan kebutuhan industri masa depan.

Persaingan Ketat LKS Nasional 2025

Dalam LKS Nasional 2025, Jawa

Timur menempati posisi puncak, disusul oleh Jawa Tengah dengan 7 emas, 8 perak, dan 10 perunggu dan DKI Jakarta di posisi ketiga dengan 4 emas, 8 perak, dan 13 perunggu

Keberhasilan hat trick ini menegaskan posisi Jawa Timur sebagai barometer pendidikan vokasi di Indonesia, serta memperkuat tekad untuk menjadikan SMK sebagai motor penggerak ekonomi berbasis keahlian. ●

GURU SEKOLAH RAKYAT DIMINTA MENGAJAR DENGAN HATI DAN DEDIKASI

Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, mengajak seluruh tenaga pengajar di Sekolah Rakyat Provinsi Sumatera Barat menjalankan tugasnya dengan ketulusan dan dedikasi tinggi.

Seruan ini disampaikan saat meninjau langsung kegiatan belajar mengajar di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang yang berlokasi di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kementerian Sosial RI, Rabu, 30 Juli 2025.

Dalam peninjauan tersebut, Gibran didampingi Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, Wakil Guber-

dukungan dari seluruh jenjang pemerintahan mulai dari pusat hingga ke daerah.

"Sekolah Rakyat bukan sekadar sarana pendidikan alternatif, melainkan bentuk nyata dari keberpihakan negara terhadap anak-anak yang membutuhkan," ujar Wapres.

Sebagai bentuk kepedulian langsung, Gibran membagikan perlengkapan sekolah berupa sepatu dan kaus

kebijakan lokal untuk aktif mengevaluasi serta mengidentifikasi kekurangan yang ada di Sekolah Rakyat.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dan pengelola BBPPKS untuk mendukung visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pendidikan.

Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa Wapres memberikan pesan mendalam kepada para pendidik.



nur Vasko Ruseimy, serta Kepala Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Kementerian Sosial, Nuryadi.

Gibran menekankan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program strategis nasional yang harus dijalankan secara optimal dan inklusif, serta mendapat

kaki kepada seluruh siswa.

Ia menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik, termasuk perlengkapan belajar, merupakan bagian penting dari menciptakan ekosistem pendidikan yang adil.

Lebih lanjut, Wapres juga mendorong kepala daerah dan pemangku

"Beliau mengingatkan agar para guru bekerja dengan penuh keikhlasan. Mengabdikan untuk masa depan anak-anak bangsa harus dilakukan dengan hati," ujar Mahyeldi.

Lebih lanjut, Wapres juga menitipkan harapan kepada pemerintah daerah untuk terus bersinergi dengan Kemen-

sos melalui BBPPKS, demi memastikan keberhasilan Sekolah Rakyat sebagai bagian dari program strategis nasional.

“Pak Wapres meminta kami di daerah untuk aktif berkolaborasi dengan Kemensos. Sekolah Rakyat bukan sekadar program pendidikan, tetapi bagian dari misi besar menuju Indonesia Emas 2045,” tambah Mahyeldi.

Program Sekolah Rakyat memang dirancang sebagai solusi inklusif untuk memperluas kesempatan belajar, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok rentan. Dengan pendekatan pendidikan yang berpihak pada kebutuhan siswa, program ini diharapkan menjadi motor penggerak transformasi sosial melalui jalur pendidikan.

Kepala BBPPKS Kemensos RI, Nuryadi menyampaikan bahwa guru-guru Sekolah Rakyat memiliki peran sentral dalam membentuk generasi masa depan.

“Bapak Wapres mengingatkan bahwa menjadi guru di Sekolah Rakyat adalah tugas yang luhur, karena mereka mengajar anak-anak yang sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang,” katanya.

Ia juga menambahkan, dalam waktu dekat pemerintah pusat akan mengirimkan berbagai kebutuhan tambahan untuk mendukung operasional Sekolah Rakyat di Sumatera Barat. Seluruh bantuan tersebut akan diberikan tanpa biaya, memastikan tidak ada beban tambahan bagi keluarga siswa.

“Sekolah Rakyat adalah bagian dari jalan panjang menuju Indonesia Emas 2045. Maka dari itu, seluruh elemen bangsa dari guru, orang tua, masyarakat hingga pemerintah harus terlibat aktif agar cita-cita besar ini terwujud,” jelasnya.

Diketahui Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mulai mengoperasikan tiga Sekolah Rakyat pada Senin, 14 Juli 2025 dengan total 250 peserta didik telah terdaftar dalam gelombang awal ini.

Dua dari tiga sekolah tersebut berlokasi di Kota Padang, masing-masing berada di BBPPKS untuk jenjang SMP, serta di Universitas Negeri Padang (UNP) yang membuka kelas tingkat SMA. Sementara satu sekolah lainnya

beroperasi di Balai Latihan Kerja (BLK) Lubuk Selasih, Kabupaten Solok.

Adapun jumlah peserta terbagi atas 200 siswa untuk jenjang SMP dan 50 siswa untuk SMA. Satu rombongan belajar (rombel) menampung 25 siswa, sehingga di BBPPKS dan BLK Solok masing-masing terdapat empat rombel, sedangkan UNP membuka dua

pada tahun 2026 mendatang. Usulan lainnya berasal dari institusi keagamaan dan sektor ketenagakerjaan.

Dalam fase awal ini, pemerintah telah menyiapkan 29 guru untuk mengajar di ketiga sekolah tersebut. Sementara itu, percepatan pembukaan Sekolah Rakyat juga ditargetkan di delapan kabupaten dan kota lainnya, termasuk



rombel untuk tingkat SMA.

“Jumlah peserta didik ini masih akan terus bertambah, mengingat saat ini sedang dalam tahap perencanaan pembukaan lokasi baru, termasuk yang berada di lingkungan pesantren maupun pusat pelatihan kerja,” jelas Kepala Dinas Sosial Sumbar, Syaifullah

Ia juga menyebutkan bahwa saat ini terdapat 11 titik usulan baru dari berbagai daerah di Sumbar untuk pembukaan Sekolah Rakyat, dengan tiga di antaranya direncanakan mulai berjalan

Dharmasraya, Sijunjung, Tanah Datar, Limapuluh Kota, Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai. Targetnya, seluruh lokasi ini bisa mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026.

Program Sekolah Rakyat di Sumatera Barat menjadi bagian dari upaya strategis untuk menyediakan akses pendidikan alternatif yang inklusif dan berbasis penguatan karakter serta keterampilan sosial, terutama bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu atau rentan secara sosial. ●

JAKARTA SELATAN SEBAGAI PUSAT HIJAU ASEAN

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, pembangunan Taman Bendera Pusaka yang mengintegrasikan tiga taman di Jakarta Selatan, yakni Taman Langsung, Taman Ayodya, dan Taman Leuser, dilakukan untuk kepentingan publik.

Pramono sendiri sebelumnya telah melakukan peninjauan Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 7 Agustus 2025.

“Karena ini bukan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan Balai Kota, ini untuk kepentingan publik,” tegas Pramono di gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Pramono mengatakan, pembangunan Taman Bendera Pusaka akan menghadirkan berbagai fasilitas publik dan sarana olahraga gratis, seperti lapangan tenis, padel, jogging track, dan lain sebagainya.

Pramono menyampaikan, biaya

yang dibutuhkan untuk membangun dan mempercantik tiga taman di Jakarta Selatan itu cukup besar.

Meskipun begitu, ia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap akan melanjutkan rencana pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

“Ini kan harus dilakukan untuk kebaikan membangun Jakarta dan taman-tamannya kita namakan Taman Bendera Pusaka,” katanya.

Pramono pun menjelaskan alasan pemberian nama Taman Bendera Pusaka. Nama ini dipilih untuk mengingatkan masyarakat, khususnya generasi muda, bahwa kemerdekaan bangsa ini tidak diraih dengan mudah.

“Saya menginginkan ada taman

yang tematik. Yang ada pesan sejarahnya, historisnya ini taman betul-betul kalau orang datang ke tempat itu mengingatkan kemerdekaan bangsa ini tidak datang tiba-tiba,” jelas Pramono.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyusun desain Taman Bendera Pusaka secara kolaboratif dengan melibatkan arsitek, akademisi, komunitas warga, hingga pegiat lingkungan. Taman ini dirancang tidak hanya sebagai ruang hijau, tetapi juga sebagai simbol kebangsaan dan ruang publik modern yang mengakomodasi kebutuhan sosial, ekologis, dan budaya.

Penataan akan mengintegrasikan sistem drainase cerdas dan infrastruk-



tur hijau guna mengoptimalkan daya serap air dan meningkatkan sirkulasi udara. Ini sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota yang tangguh menghadapi perubahan iklim dan ramah lingkungan.

Dalam kerangka kebijakan taman 24 jam, kawasan Taman Bendera Pusaka nantinya akan dibuka sepanjang hari dan malam, menyediakan akses yang lebih luas dan merata bagi masyarakat lintas usia dan kelompok sosial.

“Ke depan, Taman Langsung akan dilengkapi berbagai fasilitas olahraga gratis serta sarana yang dapat diakses oleh berbagai kelompok masyarakat,” kata Gubernur Pramono.

Jakarta Selatan Sebagai Pusat Hijau ASEAN

Terletak strategis di kawasan Blok M yang menjadi pusat kawasan ASEAN di Jakarta, Taman Bendera Pusaka juga disiapkan sebagai ruang representatif dalam menyambut tamu dari negara-negara tetangga.

Revitalisasi ini ditargetkan rampung secara bertahap dan diharapkan menjadi model taman kota masa depan yang dapat direplikasi di wilayah lain di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia.

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengapresiasi ambisi Pramono yang mempercepat pembangunan ruang terbuka hijau di Jakarta.

Trubus menyatakan, Jakarta sangat membutuhkan penanganan cepat untuk membenahi berbagai infrastruktur, termasuk pembangunan ruang terbuka hijau secara masif.

“Sebab taman-taman memiliki multifungsi, selain memproduksi oksigen, keindahan dan resapan air yang menjadi salah satu fungsi pengendalian banjir,” kata Trubus kepada Info Indonesia, Kamis 7 Agustus 2025.

Dia memberikan pandangan soal obsesi bahwa taman-taman yang nantinya akan dibuka 24 jam jangan dijadikan alasan pembenar. Pasalnya, sekalipun puluhan taman dibuka 24 jam, tidak berdampak luas untuk interaksi sosial yang selalu positif.

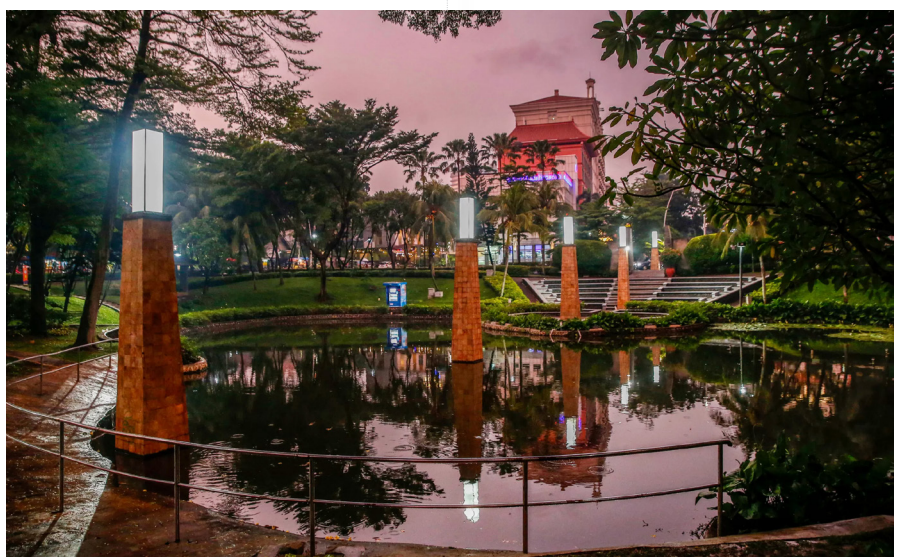
Begitu juga dari sektor geliat pariwisata, dia tidak yakin hal ini akan mendorong pertumbuhan kunjungan

wisatawan yang signifikan.

Malah sebaliknya, gagasan buka taman 24 jam itu justru cenderung menggerus anggaran yang tidak terlalu penting di saat ekonomi negara tidak baik baik saja.

“Misalkan untuk penambahan fasili-

tas penunjang keamanan, seperti cctv dan operasional petugas keamanan yang kontinu, tentu menyedot anggaran yang lumayan banyak, dan sejatinya bisa dialihkan untuk program lain yang menjadi skala prioritas di sektor lain,” pungkas Trubus. ●



Bantuan Pendidikan Program Prestasi WUJUD SINERGI DUNIA USAHA DAN PEMERINTAH

Sebanyak 80 pelajar tingkat SMA dan SMK di Kabupaten Musi Banyuasin menerima bantuan pendidikan melalui Program Edukasi untuk Anak Negeri (Prestasi) yang diselenggarakan PT Baturona Adimulya dan PT Astaka Dodol.

Penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara simbolis oleh Bupati Muba H M Toha SH di Auditorium Pemerintah Kabupaten Muba.

dua perusahaan atas komitmen dan kepedulian terhadap dunia pendidikan di Bumi Serasan Sekate.

"Atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada PT Baturona Adimulya dan PT Astaka Dodol yang telah menunjukkan kepedulian luar biasa terhadap kemajuan pendidikan di daerah ini," ujar Bupati Toha.

Bantuan pendidikan ini menyasar para pelajar berprestasi dari enam kecamatan, yakni Sekayu, Lais, Babat Toman, Sanga Desa, Keluang, dan Babat Supat. Program Prestasi diyakini sebagai langkah konkret dalam memperkuat kolaborasi antara sektor

"Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang hasilnya tidak langsung tampak, namun akan menentukan arah dan kualitas masa depan generasi kita, dan pada akhirnya masa depan Kabupaten Musi Banyuasin," tambah Toha.

Ia juga berharap program ini menjadi awal dari kolaborasi jangka panjang, tidak hanya terbatas pada sektor pendidikan, tetapi juga merambah bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat.

"Saya yakin, dengan dukungan seperti ini, semangat belajar anak-anak kita akan semakin tumbuh. Mereka akan merasa diperhatikan dan didorong untuk terus berprestasi. Kita semua bertanggung jawab mencetak



Dalam kesempatan tersebut, Bupati Toha menyampaikan apresiasi dan penghargaan tinggi kepada ke-

swasta dan pemerintah daerah demi mencetak sumber daya manusia yang unggul.

generasi yang cerdas, berkarakter, dan mampu bersaing ditingkat global," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Ucoal Sumberdaya, Dr Prastiyo Diatmono menegaskan bahwa program Prestasi merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam pembangunan masyarakat, khususnya pada bidang pendidikan.

"Kami ingin berkontribusi dalam mencetak generasi terbaik sejak dini. Program ini menjadi pondasi awal agar para siswa berprestasi bisa terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ini juga bentuk tanggung jawab perusahaan yang beroperasi di Muba," kata Prastiyo.

la menambahkan bahwa program Prestasi akan dilanjutkan dengan berbagai upaya lain, termasuk fasilitasi UMKM dan pengembangan lima produk kuliner lokal yang berpotensi dipasarkan secara nasional.

"Kami berkomitmen tidak hanya mengambil dari daerah tempat kami beroperasi, tapi juga membangun masyarakat di dalamnya. Ini adalah bentuk partisipasi aktif kami demi kemajuan Muba yang kita cintai," ujarnya.

Adapun penyerahan bantuan secara simbolis diberikan kepada enam pelajar, di antaranya Erni Lestari (SMA Negeri 3 Sanga Desa), Mutiana (SMA Negeri 1 Sanga Desa), Kurnia Delvina (SMA Negeri 1 Babat Toman), Fita Kartini (SMA Babat Supat), Aditya (SMK Negeri 1 Keluang), dan Fitriana Zulfia (SMA Negeri 1 Lais).

Salurkan Beasiswa dan Bantuan Sosial

Pemkab Musi Banyuasin juga terus memperkuat langkah nyata dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Hal ini tercermin dalam kegiatan pendistribusian bantuan pendidikan (beasiswa) dan bantuan sosial lainnya yang disalurkan Pemkab Muba melalui sinergi bersama BAZNAS Muba, sebagai upaya mendukung peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.

Penyaluran bantuan pendidikan (beasiswa) bagi siswa jenjang SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA se-Kabupaten Muba tersebut secara resmi dilakukan oleh Wakil Bupati Muba

Rohman di Kantor Camat Babat Supat.

Wakil Bupati Rohman menyampaikan apresiasi atas kontribusi dan kerja nyata BAZNAS Kabupaten Muba yang secara konsisten bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan program-program yang berdampak langsung kepada masyarakat.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada BAZNAS Muba atas kinerja luar

"Dengan dukungan seluruh elemen, termasuk ASN yang rutin menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS, kita optimistis program seperti ini akan terus berlanjut dan semakin luas manfaatnya," tambahnya.

la menegaskan bahwa program-program BAZNAS sejalan dengan visi Pemkab Muba dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. la juga men-



biasa dalam membantu masyarakat. Program-program ini sangat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya para mustahik," ujar Rohman.

la berharap kegiatan ini menjadi pemicu semangat bagi seluruh pihak untuk terus memperkuat sinergi dalam menjalankan program sosial ke depan.

doakan para muzakki agar diberi keberkahan.

"Semoga semua yang kita lakukan hari ini menjadi amal jariyah dan dicatat sebagai pahala di akhirat kelak. Terima kasih kepada seluruh muzakki yang telah menunaikan kewajiban melalui BAZNAS Muba," tuturnya. ●

WUJUDKAN HUNIAN LAYAK WARGA

Senyum haru dan penuh syukur tampak menghiasi wajah puluhan warga di Rusunawa Kecamatan Serasan Jaya, Sekayu. Hari itu menjadi penting bagi mereka, momen yang telah lama dinanti yakni menerima kunci rumah baru dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.

Bupati Musi Banyuasin H M Toha SH bersama Wakil Bupati Rohman, didampingi jajaran DPRD serta Forkopimda, secara resmi launching Program Rumah Relokasi, Bedah Rumah, dan Sanitasi Sehat Tahun 2025.

Inisiatif ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian Pemkab Muba terhadap masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), terutama yang selama ini tinggal di kawasan rawan seperti bantaran Sungai Musi.

Aji Jiad, warga Kelurahan Balai Agung, tak kuasa menyembunyikan rasa sukurnya. Ia bersama keluarganya yang sebelumnya tinggal di tepian Sungai Musi dalam kondisi rumah yang jauh dari layak, dan Ketika musim hujan tiba, cemas selalu menyelimuti.

"Setiap musim hujan kami takut. Rumah kami sudah rapuh, tidak layak huni. Tapi hari ini kami menerima kunci rumah baru. Alhamdulillah, akhirnya punya rumah yang aman dan layak, untuk itu kami sangat berterima kasih Pak Bupati, Wakil Bupati dan jajaran Pemerintah Kabupaten Muba," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Muba HM Toha SH menyampaikan bahwa perumahan adalah salah satu prioritas utama pembangunan. Menurutnya, rumah yang layak bukan hanya tempat berlindung, tetapi juga pondasi bagi keluarga yang sehat, sejahtera, dan produktif.

"Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin berkomitmen untuk membangun rumah yang bukan sekadar bangunan, tapi juga membangun kehidupan. Ini sejalan dengan nawacita Presiden RI

membangun 3 juta rumah per tahun demi pemerataan kesejahteraan," ujar Bupati Toha.

Sementara itu Plt Kepala Dinas PU Perkim Muba, M Ridho ST MSi, dalam laporannya mengungkapkan bahwa kawasan relokasi yang dibangun berada di atas lahan seluas 10 hektare dan dirancang menampung 480 unit rumah. Hingga 2024, sebanyak 138 unit telah selesai dibangun. Tahun ini, 24 rumah telah rampung dan langsung diserahkan kepada warga.

Program Bedah Rumah juga berjalan paralel. Tahun 2024 mencatatkan 723 unit rumah berhasil dibedah, 590 unit bersumber dari APBD dan 133 unit dari APBN. Pada 2025, ditargetkan penambahan 376 unit rumah bedah dari APBD.

Kemudian program sanitasi atau jamban sehat, realisasi di tahun 2024 tersebar di 40 desa penerima manfaat melalui dana APBD. Sementara Tahun 2025 Tersebar di 14 Desa (sumber dana DAK) dan 27 Desa (dana APBD) dengan Total Penerima Manfaat 971 KK.

"Kita fokus pada kawasan pinggir sungai. Selain rumah, sanitasi dan kolam



retensi juga sangat penting. Kita juga tengah berupaya membangun masjid melalui sumber pendanaan lainnya,” ungkap Ridho.

Gencarkan Gerakan Pangan Murah

Sementara menghadapi potensi lonjakan harga pangan, Pemkab Muba melalui Dinas Ketahanan Pangan kembali menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi.

Kegiatan yang digelar atas kerja sama Dinas Ketahanan Pangan Muba dan Perum Bulog Karwil Sumsel-Babel ini merupakan bagian dari upaya konkret pengendalian inflasi dan menjaga ketersediaan pasokan serta keterjangkauan harga pangan di tengah potensi lonjakan harga sejumlah komoditas pokok, khususnya beras.

“Kesiapan dan respons cepat pemerintah daerah sangat dibutuhkan untuk menghadapi gejala inflasi 2025. Maka dari itu, sinergi lintas sektor, terutama TPID dengan berbagai pihak, menjadi kunci utama dalam menjaga kestabilan harga, distribusi, dan ketersediaan bahan pokok,” ujar Wabup Rohman dalam sambutannya.

la juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan momen GPM sebagai alternatif memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau di tengah kondisi ekonomi yang dinamis.

GPM kali ini menyediakan 1.600 paket bahan pokok, masing-masing berisi beras SPHP 5 kg dan minyak goreng 1 liter, dengan harga Rp75.000 per paket lebih rendah dari harga pasar. Bahan pangan tersebut disuplai langsung oleh Bulog Karwil Sumsel-Babel dan difasilitasi oleh Pemkab Muba melalui Dinas Ketahanan Pangan.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Muba Alibadri, mengatakan GPM menjadi langkah strategis dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan laju inflasi daerah.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat mengakses bahan pokok dengan harga terjangkau, serta menjaga agar pasokan tetap stabil. Ini adalah bagian dari program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP),” ungkapnya.

Dia juga menyinggung peran penting dukungan dari pihak ketiga. Tahun sebelumnya, kegiatan GPM mendapat



subsidi dana CSR dari PT Petro Muba, sehingga harga jual ke masyarakat bisa ditekan lebih murah.

“Dengan adanya dukungan sub-

sidi CSR, harga bisa lebih murah dan masyarakat makin terbantu. Kami sangat berharap sinergi ini bisa terus berlanjut,” tandasnya. ●



Pesona Air Terjun Tumpak Sewu Jawa Timur

JATUH CINTA PADA PANDANGAN PERTAMA

Jawa Timur memang tidak pernah kehabisan destinasi wisata menakjubkan buat dikunjungi. Di balik pesona pantainya yang eksotis dan pegunungannya yang menyejukkan, ada satu tempat tersembunyi yang bisa bikin siapapun jatuh cinta pada pandangan pertama yakni air terjun Tumpak Sewu.

Jika kamu sedang mencari destinasi wisata yang alam di wilayah selatan Jawa Timur, tepatnya di perbatasan antara Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Air Terjun Tumpak Sewu bisa jadi pilihan.

Dikenal sebagai "Niagara-nya Indonesia," Air Terjun Tumpak Sewu menawarkan pemandangan spektakuler yang tidak akan kamu temukan di tempat lain.

Ratusan aliran air terjun tumpah dari tebing-tebing tinggi membentuk tirai air raksasa.

Untuk mencapai dasarnya, kamu harus menuruni tangga bambu yang cukup menantang, namun pemandangan yang disajikan akan sepadan den-

gan usaha kamu.

Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur mencatat jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke provinsi tersebut pada Mei 2025 melonjak hingga 34,71 persen dibandingkan bulan sebelumnya, yakni menjadi 33.409 kunjungan.

Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan nusantara pada periode yang sama justru turun sebesar 32,68 persen menjadi 16,98 juta perjalanan.

Seperti dilansir dari laman Disbudpar Pemprov Jawa Timur, air terjun Tumpak Sewu berlokasi di antara Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, dan Desa Sidorenggo Kabupaten Malang.

Objek wisata alam itu berada di dalam sebuah lembah curam yang memanjang dengan posisi 500 meter di atas permukaan laut. Air terjun ini juga berada di lereng Gunung Semeru.

Dikenal juga dengan nama lain Coban Sewu, objek wisata satu ini memiliki ketinggian air sekitar 120 meter. Dengan ketinggian tersebut, ditambah formasinya yang unik serta aliran air melebar serupa tirai raksasa, membuat Air Terjun Tumpak Sewu banyak dianggap sebagai air terjun terindah di Pulau Jawa.

Keunikan air terjun Tumpak Sewu tidak hanya pada ukurannya yang megah, tapi juga dari struktur geografisnya.

Air terjun ini mengalir dari tebing setengah lingkaran, menciptakan pemandangan simetris yang sangat estetis dan cocok buat jadi latar foto.

Kalau kamu cukup berani dan mau merasakan petualangan yang sesungguhnya, kamu bisa turun ke dasar air terjun. Trekking ke bawah memang butuh usaha ekstra karena harus melewati anak tangga yang licin, dengan tali sebagai pegangannya.

Tapi jangan khawatir, semua perjuangan itu bakal terbayar lunas saat tiba di dasar dan berdiri tepat di bawah guyuran air yang deras dan menyegarkan.

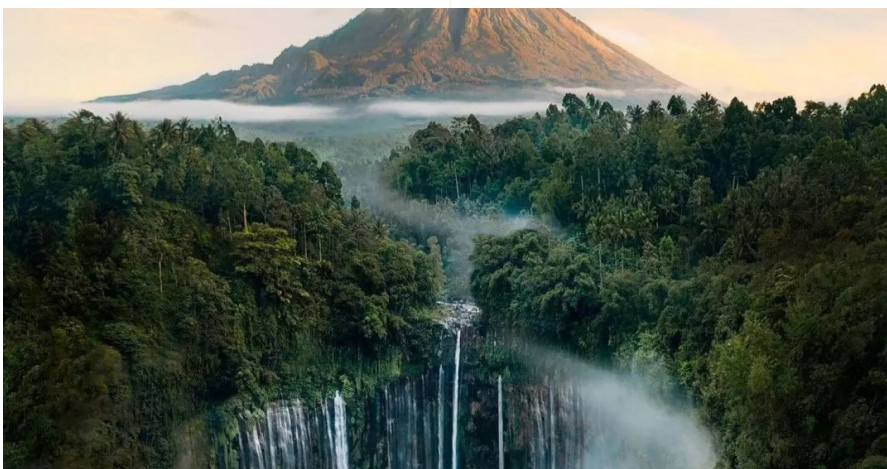
Mengenai asal-usul aliran airnya, Tumpak Sewu terbentuk di aliran Sungai Glidih yang kemudian berhulu di Gunung Semeru. Sedangkan asal-usul penamaannya dari bahasa Jawa Kuno, di mana tumpak artinya 'sabu' dan sewu memiliki makna 'seribu'.

Penamaan sewu dimiliki lantaran aliran air di Tumpak Sewu terdiri dari beberapa bagian dan tidak berkurang walau musim kemarau.

Tak hanya itu, karena keindahannya, Tumpak Sewu juga kerap disebut-sebut sebagai Niagara Falls-nya Indonesia. Niagara Falls atau Air Terjun Niagara adalah salah satu air terjun terbesar dan terkemuka yang terletak di Amerika Utara. Hal ini karena formasi mata air yang mengalir dari kedua air terjun tersebut adalah sama-sama menyerupai tirai.

Apabila beruntung, para pengunjung dapat menyaksikan fenomena pelangi yang terjadi akibat membiasnya cahaya matahari saat berpadu dengan air terjun. Kombinasi keduanya semakin menambah pesona pada destinasi wisata tersebut.

Bagi pelancong yang ingin ke lokasi, jarak dari pintu masuk sekitar 400 meter sehingga kurang lebih akan menempuh jarak waktu 10-15 menit dengan berjalan kaki. Pengunjung dianjurkan memakai sepatu khusus untuk mendaki, seperti sepatu gunung atau sepatu hiking. Hal



ini bertujuan agar pijakan kaki lebih kuat dan tidak mudah terpeleset.

Saat menuju titik air terjun, para pengunjung akan melewati jalan setapak dengan pemandangan perkebunan milik warga setempat dan deretan warung. Setelah sampai di titik air terjun Tumpak Sewu, pengunjung mendapat dua pilihan spot, yaitu di spot Panorama Tumpak Sewu atau menuruni tebing ke



bawah.

Spot Panorama Tumpak Sewu merupakan titik termudah untuk menyaksikan air terjun ini. Sedangkan spot ke bawah dengan menuruni tebing cukup susah dilalui karena jalurnya licin dan curam.

Namun, tak sedikit wisatawan yang mencoba jalur ini karena penasaran akan keindahan Air Terjun Tumpak Sewu dari bawah.

Bagi yang ingin melihat Tumpak Sewu dari bawah, disarankan untuk menyewa pemandu wisata lokal, meski ini sifatnya hanya pilihan. Mereka tersebut bukan hanya memandu wisatawan menuju Tumpak Sewu, melainkan juga ke titik lokasi di sekitarnya seperti Telaga Biru, Tebing Nirwana, dan Goa Tetes.

Destinasi wisata Air Terjun Tumpak Sewu dibuka setiap hari mulai dari pukul 07.00 WIB-17.00 WIB.

Bagaimana caranya menuju ke sana? Meski berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, wisatawan lebih memilih jalur Kabupaten Lumajang melalui Jalan Nasional rute 3 lintas selatan Jawa Timur, untuk menuju lokasi air terjun Tumpak Sewu.

Jika berangkat dari Malang, wisa-

tawan bisa memilih rute perjalanan Bululawang-Dampit-Tirtomoyo-Pronojiwo-perbatasan Lumajang dan Malang. Menempuh waktu sekitar dua jam. Setelah sampai di Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo, wisatawan akan melihat pintu masuk objek wisata Air Terjun Tumpak Sewu. Pelancong bisa langsung parkir di tempat wisata. Air terjun Tumpak Sewu mudah dijangkau den-

gan kendaraan pribadi maupun angkutan umum berupa minibus dari Malang atau Lumajang.

Informasi Tiket dan Jam Buka

- Harga tiket terbaru Tumpak Sewu adalah Rp20.000 untuk wisatawan lokal.
- Tumpak Sewu buka Setiap hari pukul 07.00 – 16.00 WIB tapi kalau kamu masuk di atas jam 15.00, maka sudah tidak boleh turun ke tepian air terjun .

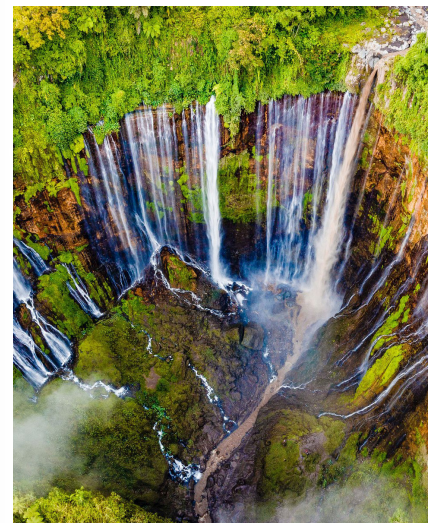
Rute perjalanan menuju Tumpak Sewu dari Kota Malang cukup mudah. Kamu bisa menggunakan kendaraan pribadi atau rental mobil Malang untuk kenyamanan maksimal.

Jalannya sudah beraspal dan dapat dilalui oleh kendaraan roda empat, tapi tetap disarankan untuk berhati-hati karena beberapa bagian jalan cukup berkelok dan menurun.

Tips Aman dan Nyaman ke Air Tumpak Sewu

Biar petuangan ke air terjun Tumpak Sewu semakin menyenangkan, perhatikan beberapa tips berikut:

- Waktu terbaik berkunjung adalah pagi hari biar bisa menikmati keindahan air terjun sebelum kabut atau hujan turun.
- Gunakan alas kaki yang nyaman seperti sandal gunung atau sepatu



anti-selip karena jalur trekking cukup licin, terutama saat musim hujan.

- Bawa pakaian ganti dan pelindung air untuk gadget dan barang elektronik.
- Bawa bekal makanan dan air minum, terutama kalau berencana menjelajahi hingga ke dasar air terjun.
- Gunakan jasa pemandu lokal, terutama kalau baru pertama kali berkunjung dan ingin turun ke area bawah air terjun.

Meski fasilitas di area wisata sudah berkembang, kondisi alam yang masih liar dan alami membuat tempat ini cocok buat wisatawan yang menyukai tantangan dan eksplorasi. ●

Resepsi Elegan Luna Maya dan Maxime Bouttier

PERAYAAN CINTA MODERN

Setelah merayakan pernikahan intim yang digelar di Bali pada Mei lalu, pasangan selebritas Luna Maya dan Maxime Bouttier menutup rangkaian momen sakral mereka dengan resepsi megah di Jakarta, pada Rabu malam, 30 Juli 2025.

Bertempat di Hotel Four Seasons Jakarta, acara ini menjadi rangkaian kelima dari perjalanan cinta mereka dan tak kalah mencuri perhatian publik.

Dengan mengangkat tema *The Sun and The Moon*, pasangan ini membawa tamu undangan dalam suasana malam penuh kemilau, elegan, dan berkelas seolah membawa cerita cinta mereka ke dimensi yang lain.

Diakui Luna Maya, tujuan resepsi pernikahannya di Jakarta untuk memberikan kesempatan bagi para sahabat dan kolega yang tak sempat hadir di Bali untuk ikut merayakan kebahagiaan mereka.

"Kita pengen celebrate sama teman-teman yang ada di Jakarta," ungkap Luna Maya.

Bukan tanpa alasan, acara di Bali memiliki keterbatasan tempat dan waktu. Kini, dengan lokasi dan kapasitas yang lebih besar, Jakarta menjadi tuan rumah pesta puncak di mana energi cinta dan persahabatan menyatu dalam satu malam yang tak terlupakan.

Resepsi pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier ini mengangkat konsep langit malam dan matahari, menghadirkan dekorasi berwarna hitam, putih, dan perak, ditambah sentuhan kristal yang memancarkan cahaya layaknya bintang.

Setiap sudut ruangan terasa seperti semesta kecil yang diciptakan khusus untuk pasangan ini.

Alih-alih pelaminan, Luna dan Maxime memilih untuk berdiri di tengah venue, menyambut para tamu dengan senyum tulus dan pelukan hangat. Interaksi langsung dan gaya pesta tanpa batas formalitas ini memberi kesan akrab dan kontemporer, sangat berbeda dari resepsi konvensional.

Para tamu hadir dalam balutan hitam putih formal yang mendukung tema "*The Sun and The Moon*". Gaun panjang hitam dan tuxedo klasik menciptakan atmosfer yang begitu sinematik bak premier film papan atas.

Salah satu pemandangan utama di venue adalah kue putih setinggi sembilan tingkat rancangan *LeNouvelle Cake*. Bertema klasik-modern, kue ini melambangkan sembilan fase cinta yang mengantarkan Maxime dan Luna menuju kehidupan baru.

Namun yang paling mencengang-



kan adalah adanya replika lapangan tenis lengkap dengan net dari kristal dan raket berhiaskan ornamen cantik. Elemen ini bukan hanya hiasan, melainkan spot favorit untuk foto dan konten media sosial. Sebuah detail simbolik dan unik, mengingat keduanya menyukai olahraga dan aktivitas luar ruang.

Bukan bunga konvensional, Luna memilih midnight calla lily sebagai buket. Bunga berwarna ungu kehitaman ini bukan hanya langka, tetapi juga melambangkan kekuatan, misteri, dan keindahan yang tak biasa refleksi sempurna dari karakter Luna Maya sendiri.

Untuk resepsi Jakarta, Luna mempercayakan penampilannya pada sang maestro fashion tanah air Sebastian Gunawan. Gaun berwarna silver ini menjuntai anggun dengan detail one shoulder, drapery, dan tile bertabur kristal. Sang desainer

awan sutra. Penampilan Luna Maya malam itu semakin berkilau dengan rangkaian aksesoris mewah dari BVLGARI. Ia dikenal sebagai salah satu muse jenama perhiasan dari Indonesia, bersama Raline Shah, hingga diundang ke berbagai acara mereka, termasuk yang dihadiri Lisa BLACKPINK di Thailand, beberapa waktu lalu.

Menurut akun IG @fashion_seleb-riti, nilai kalung emas putih 18 karat berhias berlian pave itu sekitar 159 ribu dolar AS atau sekitar Rp2,6 miliar.

Untuk melengkapi kalung Serpenti Viper, Luna Maya juga mengenakan gelang dari seri yang sama. Aktris 41 tahun ini mengenakan dua gelang. Pertama, BVLGARI Serpenti Viper one-coil dari emas putih 18 karat dan dihiasi berlian pave di kedua ujungnya yang berharga sekitar Rp224,6 juta.

Yogie Pratama. Gaun itu memeluk tubuh Luna yang menonjolkan femininitas modern.

Mengutip akun Instagram @mryogiepratama, gaun tanpa lengan rancangannya sengaja mengaplikasikan buga 3D yang rumit dan hiasan kristal berkilauan agar bisa terlihat hidup saat Luna Maya bergerak. Ia menyebut setiap detail dijahit dengan cermat untuk merayakan seni sekaligus 'membentuk sosok Luna dengan presisi yang elegan'.

"Di setiap gerakannya, ia memancarkan kepercayaan diri yang tenang, kehadirannya merupakan perpaduan yang memikat antara kelembutan dan kekuatan," kata Yogie.

Gaun tersebut dipadukan Luna dengan sepatu hak tinggi dari Christian Louboutin yang terkenal dengan sol merahnya. Luna menggerai ram-



menyebut gaun ini bukan hanya dirancang, tetapi "ditakdirkan" untuk Luna.

"Untuk Luna Maya, gaun tak hanya dirancang, tapi ditakdirkan. Proses fitting menjadi momen keheningan, keindahan, dan terungkapnya keabadian," tulis Seba di akun Instagram resminya.

Garis leher gaun Luna Maya dibuat melengkung yang menyimbolkan bentuk bulan sabit. Itu karena Luna dalam bahasa Italia berarti bulan. Sang desainer sengaja menjahit kristal satu per satu ke badan gaun untuk membentuk siluet menyerupai cahaya dan air saat pemakainya bergerak.

Gaun tersebut dipadukan dengan bolero yang dibentuk menyerupai



Kemudian, gelang BVLGARI Serpenti Viper one-coil dari emas putih 18 karat dengan dihiasi full berlian pave. Gelang menawan ini bernilai fantastis, yaitu Rp1,5 miliar.

Luna menutup acara dengan gaun pesta rancangan desainer



but panjangnya dengan sedikit dicurl untuk menciptakan ombak yang menawan.

"Second celebration, second look. Still celebrating love," tulis Luna.

Ia terekam berdansa dibalut gaun tersebut. Perhiasannya juga relatif lebih simpel dibandingkan tampilan pertama.

Tamu yang hadir tak hanya membawa kenangan, tetapi juga tas souvenir berisi mesin kopi, kopi pilihan, gelas kaca edisi khusus, suplemen kesehatan, makanan ringan, hingga voucher perawatan wajah. Souvenir ini membuat heboh media sosial karena dinilai 'lebih mewah dari mahar.' ●



MASIH BERGANTUNG PADA KEKUATAN ASING

Adanya regulasi baru membuat Indonesia Super League 2025/26 kebanjiran skuad asing mulai dari pelatih, pemain hingga kiper serta staf kepelatihan. Namun secara kualitas sempat diragukan kemampuannya meski kontribusi nyata terlihat cukup besar. Di sisi lain pemain lokal juga harus meningkatkan kemampuannya agar bisa bersaing dan tidak terlalu bergantung dengan kekuatan pemain asing.

Belanja besar-besaran klub Indonesia Super League membuat pemain asing memenuhi lapangan kompetisi. Tercatat ada 158 pemain asing yang tersebar di 18 klub Indonesia Super League 2025/26 saat ini.

Dari jumlah itu ternyata hanya ada 14 yang menyandang status skuad Timnas untuk negaranya masing-masing. Bahkan selama ini mereka banyak bermain di kasta rendah dan belum diketahui rekam jeaknya.

Minimnya penjabaran soal kualitas dan rekam jejak pemain asing membuka celah bagi klub mendatangkan pemain tanpa standar kompetitif yang jelas. Sehingga tidak jarang mereka hanya menjadi bangku cadangan termasuk di Indonesia Super League.

Seperti diketahui pemain asing yang didaftarkan bisa maksimum 11 pemain ke I League (PT LIB) dan wajib daftarkan pemain U23 minimal 5 pemain untuk berkompetisi di Indonesia Super League..

Kemudian hanya ada 23 pemain yang

dimasukkan dalam Daftar Susunan Pemain (DSP) per laga. Tetapi di dalamnya hanya maksimum 9 pemain asing yang bisa masuk DSP. Sehingga akan ada dua legiun asing lainnya di tribun stadion.

Selanjutnya maksimum hanya 7 pemain asing yang bisa bermain bersama di lapangan sementara 2 pemain sisa dalam daftar DSP duduk di bangku cadangan.

yang bisa main bersama.

Fakta di lapangan kontribusi skuad asing di klub-klub Indonesia Super League memang sangat besar bahkan mendominasi.

Kini setidaknya ada 11 klub yang menggunakan kiper asing. PSBS menjadi klub terbaru yang mendaftarkan legiun asing dengan salah satunya adalah berposisi sebagai penjaga gawang



Pergantian pemain dalam satu pertandingan tetap mengacu regulasi FIFA, maksimal 5 kali.

Jadi dalam satu pertandingan, klub bisa memainkan 9 pemain asing dalam 2x45 menit. Tapi ke-9 pemain itu tak bisa bermain bersama, hanya maksimal 7

(kiper).

Menggunakan kiper asing sekarang sepertinya seakan menjadi sebuah kebutuhan, sehingga banyak klub yang mulai berbondong-bondong merekrut kiper asing terbaik.

Sedangkan kontribusi pemain asing

nyatanya sangat besar. Di pekan pertama Indonesia Super League misalnya, sebagian besar pencetak gol didominasi pemain asing.

Kemenangan Persija 4-0 atas Persita Tangerang dicetak dua pemain asingnya yakni Allano Lima (69, 90+) dan Maxwell Souza (72) serta Rizky Ridho (31).

Sedangkan laga Bali United versus Persik Kediri yang berakhir imbang 1-1 semua gol dicetak pemain asing yakni Boris Koptivoc (Bali United, 90+5) dan Telmo Castanheira (Persik Kediri, 78).

Persis Solo menuai hasil gemilang lewat dua pemain Jepang, Sho Yamamoto dan Kodai Tanaka usai menekuk tuan

Saat ini lebih dari 60 pemain asing Brasil yang merumput. Jumlah itu lebih besar lagi bila ditambah pemain di Liga 2. Dari 18 klub ISL, semua memakai pemain asal Brasil.

Peringkat kedua diduduki pemain asing asal Portugal yang mencapai 15 orang dan ketiga diduduki Argentina yakni hanya ada 8 orang saja, jauh di bawah Brasil.

Persija Jakarta menjadi klub terbanyak yang menggunakan pemain asing yakni 9 orang dengan masuknya Maxwell Souza serta satu pemain asal Jepang. Kini Persija diperkuat 10 pemain asing.

Dewa United menjadi tim dengan total

Skuad Dewa United tahun ini sangat mendalam, dengan mendatangkan beberapa pemain top tahun lalu diantaranya Nick Kuipers center bek tangguh yang juara dua kali bersama Persib Bandung, dan Edo Febriansyah salah satu pemain cepat yang membela Persib Bandung musim lalu.

Klub promosi yang sedang naik daun, Persija Jepara merekrut Carlos Franca, tercatat memiliki nilai pasar sekitar Rp9,56 miliar, langsung menempatkannya di antara pemain top.

Kemudian nama Jordi Amat muncul sebagai bek yang kembali mencuri perhatian. Meski sudah berusia 33 tahun,



rumah Madura United 2-1. Gol MU juga dicetak pemain asing Kerim Palic.

Demikian juga Persib Bandung yang menang 2-0 atas Semen Padang lewat duet gol Uliam Baros (40) dan Febri Hariyadi (90).

Pemain Brasil Jadi Favorit

Dari banyaknya pemain asing yang merumput di Liga Indonesia, sebagian besar barasal dari Brasil. Pemain asing asal Brasi memang menjadi pemain favorit klub-klub Indonesia Super League.

pemain termahal di BRI Super League 2025/2026. Sementara PSIM Yogyakarta juga punya ambisi yang sama meski berstatus tim debutan dengan banyak belanja pemain mengalahkan klub-klub besar.

Juara BRI Liga 1 Indonesia, Persib Bandung di tempat kedua agar bisa mempertahankan posisinya. Persaingan juga semakin ketat dengan adanya penambahan pemain asing di musim ini dari 8 menjadi 11 orang. Sehingga banyak klub yang menggunakan kiper asing di BRI Super League musim ini.

pengalamannya di kompetisi top Eropa menjadikan ia berharga Rp 11,3 miliar di musim ini.

Posisi teratas diisi oleh gelandang anyar Bali United, Thijmen Goppel. Berbekal statistik impresif dari Liga Belanda dan masih dalam usia produktif (28 tahun), nilainya diperkirakan mencapai Rp 12,17 miliar.

Sementara kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, menduduki peringkat tertinggi dengan nilai setara Carlos Franca, yakni Rp 9,56 miliar. ●



Pemerintah Terus Resahkan Rakyatnya HABIS DORMANT, TERBITLAH PAYMENT ID

Jagat maya kembali diramaikan oleh kebijakan menyangkut sistem keuangan. Setelah pemblokiran rekening dormant menimbulkan kegaduhan, giliran Payment ID yang dianggap terlalu mencampuri ranah privat warga.

Dari pantauan di media sosial X, Rabu (6/8/2025), sejumlah warganet mengomentari Payment ID yang rencananya akan mulai diuji coba pada 17 Agustus 2025. Ada yang merasa takut, ada pula yang mempertanyakan tujuan di balik kebijakan tersebut.

Pemilik akun @liaasister di X, misalnya,

lain-lain. Mereka juga bisa memblokir rekening bankmu kapan saja kalau mereka punya alasan tertentu untuk melakukannya. Uangmu masih ada, tetapi aksesnya bukan 100 persen milikmu. Negara juga bisa mengaksesnya. Ngeri enggak nih," tulisnya.

Keluhan serupa juga disampaikan oleh pemilik akun @rtndw. Ia mempertanyakan tujuan di balik peluncuran dan peruntukan Payment ID.

"Tujuannya apa sih Payment ID ini? Kalau kita ada transaksi digital, kan, semuanya juga sudah kena pajak, belanja di e-commerce ada pajaknya, makan di resto juga bayar pajak, bayar listrik, Wi-Fi, pulsa via e-commerce juga ada pajaknya. Kepo banget sama transaksi keuangan rakyatnya atau apa sih?" tulis dia.

Payment ID layaknya nomor induk kependudukan (NIK) dalam sistem pembayaran digital atau satu identitas tunggal yang terstandarisasi. Teknologi ini berbentuk kode pengenalan unik yang

Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025-2030, BI memandang kebutuhan data granular dalam sistem pembayaran terus meningkat seiring perkembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital.

Ini menuntut mekanisme dan infrastruktur perolehan data sebagai barang publik. Infrastruktur penunjang tersebut dibuat melalui pengembangan Payment ID sebagai pengidentifikasi unik (unique identifier), pengembangan sistem capturing untuk perolehan data granular, dan pengembangan BI-Payment.

Masih merujuk BSPI 2025-2030, pengembangan Payment ID akan mencakup tiga fungsi. Pertama, kunci identifikasi pembentukan data profil pelaku sistem pembayaran. Kedua, kunci otentikasi data dalam pemrosesan transaksi. Ketiga, kunci unik dalam proses agregasi antara data profil individu dan data transaksional yang granular.

Perolehan data profil dan transaksi tersebut dilakukan melalui sistem capturing, yang akan dibangun dengan dua mekanisme, yakni push untuk data periodik dan pull untuk data insidental (on demand). Rancangan metadata dalam perolehan data sistem pembayaran akan mengacu pada standar ISO 20022.

Secara teknis, Payment ID akan dikembangkan secara bertahap, dengan tahap pertama melalui pendekatan BI-led dengan target implementasi pada 2027. Berikutnya, Payment ID akan dikembangkan melalui pendekatan integrated dengan target implementasi pada 2029.

Masih Uji Coba

Bank Indonesia menegaskan penerapan Payment ID yang diagendakan meluncur pada 17 Agustus 2025 masih dalam tahapan uji coba. Kebijakan yang bakal diimplementasikan pada 2029 tersebut masih membutuhkan payung hukum.



menganggap dengan adanya Payment ID, seluruh transaksi keuangan warga berada di bawah kendali pemerintah.

"Jadi negara akan bisa tahu uangmu dipakai untuk apa, transfer ke siapa, dan

diberikan kepada setiap pelaku dalam ekosistem pembayaran, baik individu maupun organisasi atau korporasi.

Inisiatif kebijakan Payment ID datang dari Bank Indonesia. Dalam dokumen

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Dicky Kartikoyono, mengatakan, penerapan Payment ID sepenuhnya berpegang pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Saat ini, Payment ID masih dalam tahap uji coba.

“Kita itu masih tahap eksperimen. Uji coba. Piloting. Datanya ini bagaimana yang paling pas untuk digunakan karena uji coba. Sembari uji coba, yang paling penting lagi, semuanya harus diatur dalam PBI (Peraturan BI), dalam PDG (Peraturan Dewan Gubernur). Semuanya itu harus ada kejelasan,” tuturnya, Rabu, 6 Agustus 2025.

Adapun tahapan uji coba tersebut akan dilakukan di Banyuwangi, Jawa Timur, bertepatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI pada 17 Agustus 2025 mendatang. Proyek percontohan ini terutama berfokus pada digitalisasi penyaluran bantuan sosial yang dicanangkan oleh Dewan Ekonomi Nasional (DEN).

Tanpa adanya kejelasan aturan turunan dari UU PDP sebagai payung hukum, ia melanjutkan, Payment ID akan sulit untuk diterapkan. Aturan turunan tersebut, antara lain, akan memberikan kepastian perlindungan data pribadi serta keamanan transaksi.

Selain itu, akan diatur juga mengenai penggunaan data dalam ranah publik dan ranah privat, serta aspek perizinan dari individu. Artinya, penerapan Payment ID akan benar-benar merujuk kepada aspek privasi dan keamanan data masyarakat sebagaimana diatur dalam UU PDP.

Dicky menambahkan, sistem keuangan merupakan ekosistem yang paling sensitif, kerahasiaan dan privasi nasabah harus benar-benar dijaga. Maka, penerapan Payment ID pun harus memilah-milah dan mempelajari data yang akan digunakan, serta tujuan penggunaannya dalam ekosistem.

“Tanpa uji coba, bagaimana kita akan mengatur dan bagaimana kita tahu benchmarking-nya. Apalagi, dunia sekarang sudah mengarah ke situ semua. Ada yang namanya General Data Protection Regulation (GDPR). Semua harus ada kejelasannya. Penggunaan data itu harus ada aturannya,” ujarnya.

Dengan demikian, menurut Dicky,

berbagai kekhawatiran di media sosial terkait penerapan Payment ID yang akan merekam seluruh transaksi masyarakat belum tentu terjadi. Sebab, masih dibutuhkan kajian dan aturan teknis yang akan menjadi payung hukum bagi penerapan Payment ID.

Di sisi lain, Sekretaris Eksekutif Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Rio Priambodo, menyampaikan, peme-

uk ke ranah privat konsumen, apalagi kalau tidak ada indikasi pidana karena membuat konsumen terganggu. Oleh karena itu, YLKI meminta kebijakan tersebut dibatalkan karena terlalu dalam masuk ke privasi konsumen.

Rio menambahkan, negara perlu memperhatikan juga UU Perlindungan Konsumen dan UU PDP. Sebab, pengawasan ke individu berpotensi rentan



rintah mesti buka suara dan memberikan penjelasan terkait urgensi dari kebijakan Payment ID kepada konsumen. Dengan demikian, kebijakan tersebut tidak membuat konsumen resah.

“YLKI melihat negara terlalu jauh melakukan pengawasan hingga ke konsumen individual yang mana hal ini sangat mengganggu kenyamanan konsumen sebagai pengguna,” katanya.

YLKI meminta pemerintah tidak mas-

disalahkan jika tidak ada pihak independen yang mengawasinya.

Selain itu, pemerintah juga harus belajar dari kasus pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPATK) yang sempat membuat gaduh konsumen. Ke depan, pemerintah harus berhati-hati dalam membuat kebijakan, apalagi sektor keuangan sangat sensitif terhadap konsumen.

• INFO EKONOMI

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda, berpendapat, dalam waktu dekat akan diluncurkan Payment ID. Ini dapat melihat arus transaksi keuangan masyarakat.

"Saya rasa lebih baik pemerintah menggunakan Payment ID untuk membuktikan dugaan terjadi penyimpangan oleh pemilik rekening tertentu. Itu dulu yang dilakukan baru bisa menyimpulkan rekeningnya digunakan untuk hal yang baik atau tidak," ujarnya secara tertulis, Kamis, 31 Juli 2025.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshory Yusuf, menyatakan, BI sudah berencana melakukan uji coba skala kecil (piloting) Payment ID pada 17 Agustus 2025. Uji coba ini akan diterapkan pada pegawai BI dan penerima bantuan sosial.

"Itu akan dirilis pilot dulu untuk pegawai BI dan penerimaan bansos, berarti sudah siap. Nah, ini akan transformatif. Kenapa? Karena pembayaran kita di QRIS atau di apa pun juga bentuk pembayaran yang terkait BI itu akan tagging dengan NIK," katanya, Jumat, 25 Juli 2025.

Salah satu penerapannya, ia mencontohkan, dalam pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikecualikan untuk barang-barang kebutuhan pokok. Ketika ada orang kelas menengah atas yang membeli minyak goreng, secara otomatis tetap akan dikenakan PPN.

Sebaliknya, kelompok miskin yang masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai penerima bansos, ketika membeli minyak goreng PPN-nya akan dikecualikan. Skema tersebut telah diusulkan Arief kepada para pemangku kepentingan di sektor keuangan.

"Hal ini bisa membuat anggaran lebih efisien, sehingga bisa dialokasikan ke yang lebih growth promoting," ujar Arief.

Lunturnya Kepercayaan Publik

Ibarat membakar lumbung padi



demasi membasmi tikus. Barangkali itu peribahasa yang pas untuk menggambarkan langkah pemblokiran rekening dormant oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Keuangan (PPTAK) akhir-akhir ini.

Publik sontak dibuat heboh nan gerah oleh tindakan yang dianggap serampangan itu. Alih-alih mencegah segala risiko bentuk tindak pidana, pemblokiran rekening dormant justru menimbulkan keaduan dan menggerus kepercayaan warga. IM (41), ibu rumah tangga di Jakarta Selatan, Kamis, 7 Agustus 2025, masih menunggu kabar baik atas rekeningnya yang telah diblokir oleh PPATK karena dicap dormant. Ia pun diminta mendatangi kantor cabang bank bersangkutan untuk mendapatkan kepastian dari rekeningnya.

"Jadi, aku enggak terpikir (rekening tabungan) akan diblokir. Itu, kan, namanya tabungan ya, pasti dong aku enggak akan bertransaksi di situ, aku enggak akan otak-atik, aku enggak akan ambil. Namanya juga tabungan," katanya dikutip dari Kompas.

Bukan dari surat pemberitahuan ataupun notifikasi dari perbankan, ia baru mengetahui rekeningnya terblokir setelah ramai diberitakan oleh media. Begitu

mengetahui kabar tersebut, IM segera mengecek rekeningnya lewat aplikasi dan benar, ia tidak bisa melakukan transaksi.

Selang beberapa hari, IM pun mendatangi kantor cabang bank terdekat guna memastikan status rekeningnya. Di situlah, ia baru mengetahui bahwa rekeningnya terblokir oleh PPATK karena dianggap dormant.

Dokumen seperti KTP dan kartu ATM pun diserahkan untuk memproses aktivasi kembali rekeningnya. Kendati demikian, pihak bank belum bisa memastikan kapan rekening itu bisa kembali aktif dan hanya memintanya untuk menunggu kabar terbaru.

Selama ini, ibu dua anak itu memang memiliki tiga rekening bank yang berbeda sebagai cara mengelola keuangan rumah tangganya. Salah satunya digunakan sebagai rekening tabungan jangka panjang sekaligus dana darurat, yang telah ada sejak delapan tahun silam.

Sebagai nasabah, IM merasa kecewa atas tindakan pemblokiran rekening dormant oleh pemerintah. Oleh sebab itu, ia berharap ke depan kejadian seperti ini tidak terulang kembali dan pemerintah dapat lebih selektif untuk mencegah tindak kejahatan keuangan di ranah digital.

"Kenapa enggak yang suspicious saja yang transaksinya gede, yang sering, terus yang enggak normal itu loh yang diblock? Kenapa semua? Malas atau apa itu pemerintahnya? Atau memang enggak punya skill? Kan, pasti kelihatan tuh transaksi yang suspicious," ujarnya.



Di luar kewenangan PPATK

Sebelumnya, Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengklaim telah membuka seluruh akses pemblokiran rekening dormant sebanyak 122 juta rekening. Seluruh proses aktivasi kembali rekening dormant yang terblokir pun dikembalikan kepada mekanisme setiap bank.

Ia menjelaskan, seluruh rekening dormant itu didapatkan berdasarkan data yang diserahkan oleh para pelaku industri perbankan. Sejak Mei 2025, PPATK secara bertahap telah menganalisis dan membuka kembali pemblokiran rekening tersebut.

"Ada yang benar-benar sudah selesai (dibuka kembali). Ini yang sebagian, yang masih belum, itu sudah ada di perbankan. Tapi, overall, 122 juta (rekening dormant) tadi sudah selesai di PPATK," ujar Ivan dalam diskusi bertajuk Strategi Nasional Memerangi Kejahatan Finansial yang diselenggarakan Katadata di Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025.

Menurut ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, masalah yang paling mendasar dari kebijakan tersebut terletak pada pemahaman PPATK atas perannya sendiri. Sebagai unit intelijen keuangan (financial intelligence unit), PPATK memiliki tugas mulia mengendus dan menganalisis transaksi mencurigakan.

Namun, dengan dalih Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindakan Pidana Pencucian Uang, PPATK justru mengambil peran sebagai eksekutor dan memerintahkan pemblokiran massal.

Di sisi lain, kewenangan pemblokiran rekening secara hukum berada di tangan aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan penetapan pengadilan. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki kewenangan administratif sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

"Dengan melangkahi prosedur ini, PPATK tidak hanya bertindak di luar kewenangannya (*ultra vires*), tetapi juga mengabaikan prinsip dasar negara hukum, yaitu *due process* atau proses hukum yang adil," kata Achmad.

Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sektor keuangan pun tergerus. Ketika masyarakat merasa dana mereka di bank dapat dibekukan kapan saja secara sewenang-wenang oleh otoritas, mereka akan mulai mencari alternatif lain.

Risiko penarikan dana massal (bank run) dalam skala kecil mungkin tidak terjadi, tetapi pergeseran perilaku jangka panjang sangat mungkin muncul. Masyarakat pun bisa jadi lebih memilih

intelijen dengan mempertajam analisis, meningkatkan kualitas data, dan menghasilkan rekomendasi yang akurat serta dapat ditindaklanjuti.

"Biarkan PPATK menjadi komposer yang membaca partitur data dengan brilian. Lalu, perkuat peran OJK sebagai konduktor. OJK harus segera mengambil alih kepemimpinan dalam merumuskan regulasi yang jelas, adil, dan transparan mengenai pengelolaan rekening pasif," ujar Achmad.



menyimpan uang tunainya "di bawah bantal" atau beralih ke instrumen keuangan informal yang tidak terawasi.

Achmad berpendapat, langkah mundur PPATK yang pada akhirnya mengembalikan 122 juta rekening kepada bank adalah pengakuan diam-diam atas kegagalan pendekatan "tembak sapu jagat". Namun, itu tidak serta-merta memulihkan kepercayaan dan justru menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan konsumen di sektor keuangan.

Oleh sebab itu, PPATK harus kembali pada khitahnya sebagai lembaga

Pada akhirnya, tindakan gebyah uyah atau generalisasi oleh PPATK dalam memblokir rekening dormant telah meresahkan publik. Kepercayaan kepada pemerintah dan sektor keuangan pun kini terancam luntur.

Kondisi ini tidak hanya menyadarkan soal pentingnya PPATK kembali ke khittah. Namun, juga memberikan pelajaran akan pentingnya sosialisasi dan transparansi informasi oleh pejabat pemerintahan sebelum menerapkan suatu kebijakan yang berdampak pada orang banyak. ●

SIAPA BERMAIN DI ISU BANK BCA

Beredar gagasan, bahkan dorongan agar pemerintah mengambil alih Bank BCA. Menggoyahkan kepastian hukum pastinya.

Semakin tinggi batang pohon, kian kencang angin menerpa. Kiasan itu bolehlah melekat pada Bank BCA.

Soalnya, muncul ide agar pemerintah mengambil alih bank swasta terbesar di Indonesia, bahkan Asia Tenggara itu. Namun, bukan jajaran pemerintah yang menggagasnya.

Entah bagaimana awalnya, Ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Sasmito Hadinegoro mendorong Presiden Prabowo Subianto menyelamatkan uang negara yang terkait megaskandal BLBI. Termasuk mengambil-alih 51 persen saham BCA.

"Angin kencang beberapa kali telah kita tiupkan untuk mengusut kembali

menyelesaikan masalah tersebut. Langkah Jokowi itu, seharusnya dilanjutkan Presiden Prabowo, sehingga seluruh dugaan permainan dalam megaskandal BLBI bisa dibongkar tuntas.

Sasmito menduga terjadi rekayasa dalam akuisisi 51 persen saham BCA oleh Djarum Grup, kerajaan bisnis milik Budi Hartono di era Megawati. "Pada waktu itu, pada Desember 2002, nilai sahamnya (BCA) Rp117 triliun. Dalam buku, BCA mempunyai utang ke negara Rp60 triliun, diangsur Rp7 triliun setiap tahunnya," sebut Sasmito.

la juga mengaku pernah dikonfrontasi dengan pihak BCA oleh Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko, pada 4 September 2018. "Saat itu, saya dipanggil



kasus BLBI-BCA. Pemerintah punya hak untuk mengambil kembali 51 persen saham BCA, tanpa harus bayar," ujar Sasmito yang juga Ketua LPEKN (Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Keuangan Negara), sebagaimana dikutip inilah.com pada Selasa, 12 Agustus 2025.

Ketika Jokowi masih berkuasa, kata Sasmito, dibentuklah tim keppres untuk

KSP, Pak Moeldoko untuk dikonfrontasi dengan Direktur BCA. Saya jelaskan semuanya. Mereka (BCA) tak bisa membantah. Kita tidak mempermasalahkan BCA-nya, karena sudah berjalan. Tapi, jika kasus ini diusut tuntas, maka aset senilai Rp700 triliun bisa masuk ke Danantara Indonesia," ujarnya.

Toh tanggapan kritis datang dari

pengamat perbankan Infobank Institute Eko B Supriyanto. Menurut dia, urusan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan divestasi BCA telah selesai secara hukum. Menurut catatan Infobank Institute, sambungnya, Pemerintah saat Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI, telah menjual 51 persen saham BCA ke Konsorsium Farallon (2001) melalui strategic sale sesuai PP No. 17/1999 dan UU No. 25/2000.

“Tidak hanya itu, audit BPK (2006) menegaskan: penyelesaian kewajiban pemegang saham lama (Salim Group) sudah final dan sesuai dengan regulasi. Jadi, mengutak-atik sejarah BLBI BCA dengan dalih BLBI belum selesai adalah kebohongan publik!” tandasnya.

Riwayat menjulang Bank BCA memang sulit terpisahkan dengan berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada 1998. Sepekan setelah Soeharto menyatakan mundur, pada 28 Mei 1998, BCA yang kala itu dimiliki Salim Group, diambil alih oleh pemerintah karena kondisi keuangannya semakin berdarah-darah. Antara lain karena terjadi rush pengambilan dana simpanan nasabah sebagaimana antrean di anjungan tunai mandiri (ATM) kala itu.

Selanjutnya, Pemerintah lewat Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) resmi menjadikan BCA sebagai B T O (Bank Take over).

Over). Pengambilalihan ini bertujuan untuk menolong BCA agar tidak jatuh terlalu dalam. Hingga beberapa tahun sesudahnya, status BTO ini melekat.

Namun, untuk meringkas cerita, di awal 2002 Presiden Megawati sepakat menjual 51 persen saham BCA kepada investor lokal maupun asing. Pada Februari 2002, persaingan merebut BCA dimenangi oleh investor Farallon yang membeli BCA senilai US\$ 530 juta. Sejak saat itu, keluarga Salim tak lagi memiliki

Usai dari BPPN, Lembong mendirikan Farindo Investment -- perusahaan joint venture dengan Farallon Capital asal Amerika dengan grup Djarum-- yang bergerak di bidang private equity.

Melalui Farindo, Lembong berhasil mengambil alih 51 persen saham PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dari BPPN melalui proses strategic private placement pada 2002 dengan harga Rp1.775 per saham atau senilai total Rp5,3 triliun seperti dikutip dari laporan pemegang



BCA sepenuhnya.

Yang perlu diingat pula, ada nama Tom Lembong yang mengetahui banyak soal ini. Alasannya, ia pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Asset Management Investment di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Tom ikut membantu BPPN menjual saham INTP-- diserahkan Grup Salim kepada pemerintah Indonesia sebagian bagian dari kucuran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)—kepada Heidelberg AG (Jerman).

saham BCA.

Awalnya Farallon menguasai 90,64 persen saham Farindo, sedangkan grup Djarum hanya 9,36 persen. Tetapi setelah 2006, grup Djarum menguasai 92,18 persen saham Farindo. Praktis kepemilikan BCA mayoritas beralih ke tangan grup Djarum.

Bahwa BCA makin menjulang, tampak dari laba bersih sebesar Rp25,16 triliun pada Mei 2025, tumbuh 16,31 persen secara tahunan dari tahun sebelumnya di periode yang sama sebesar Rp21,63 triliun. Laporan keuangan BCA, Selasa, 17 Juni 2025 menyebutkan, pertumbuhan laba bank yang kini dipimpin oleh Hendra Lembong sebagai Presiden Direktur ini, ditopang oleh pos pendapatan bunga bersih.

Per Mei 2025, bunga bersih BCA tumbuh 6,84 persen menjadi Rp33,12 miliar. Sebagai gambaran, pada tahun sebelumnya bunga bersih di periode yang sama sebesar Rp30,99 miliar.

Toh, masih banyak kisah dan fakta tak hanya soal uang terkait dengan Bank BCA. Akan kita simak pada saatnya. •



FENOMENA ROJALI DAN ROHANA KELAS MENENGAH TIDAK BAIK SAJA

Ramainya pusat perbelanjaan di kota-kota besar tak selalu sejalan dengan tingginya transaksi. Fenomena menjamurnya Rojali (Rombongan Jarang Beli) dan Rohana (Rombongan Hanya Nanya) di berbagai pusat perbelanjaan menjadi potret paling mutakhir dari kondisi kelas menengah Indonesia.

Di tengah meriahnya aktivitas konsumsi, kenyataan di baliknya adalah stagnasi daya beli, keresahan ekonomi, dan gejala konsumsi semu yang berakar dari pertumbuhan yang belum inklusif dan berkeadilan.

Banyak yang jalan-jalan di mal, tetapi tidak semua mampu bertransaksi. Banyak yang hanya datang untuk cuci mata, mencari hiburan gratis, hingga sekadar

mencari udara sejuk dari pendingin ruangan pusat perbelanjaan.

Rojali dan Rohana bukan sekadar istilah viral, tetapi menjadi representasi dari kelas menengah yang rentan: seolah-olah konsumtif, padahal sesungguhnya defisit daya beli.

Di balik fenomena ini, ada ancaman ekonomi serius yang mengintai: middle income trap. Negara-negara yang ter-

jebak dalam jebakan pendapatan menengah cenderung mengalami stagnasi pertumbuhan setelah mencapai pendapatan menengah, tetapi gagal bertransformasi menjadi negara berpendapatan tinggi.

Indonesia termasuk negara yang rentan terhadap jebakan ini. Pertumbuhan ekonomi rata-rata sekitar 5 persen dalam satu dekade terakhir belum cukup mem-



bawa lompatan struktural yang signifikan. Masih dominannya sektor informal, ketimpangan kualitas pendidikan, hingga rendahnya produktivitas menjadi penyebab utama.

Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia secara angka memang mengesankan. Menurut data Bappenas, jumlahnya mencapai lebih dari 130 juta jiwa. Namun, secara kualitas, tantangannya masih besar.

Banyak dari kelompok ini bekerja di sektor informal atau di industri dengan produktivitas rendah. Literasi finansial mereka terbatas, dan pola konsumsi mereka masih berorientasi pada tampilan sosial, bukan efisiensi atau produktivitas.

Di sisi lain, gaya hidup konsumtif yang menjamur tidak diimbangi dengan transformasi ke arah ekonomi produktif. Mereka lebih banyak menjadi konsumen daripada produsen.

Perubahan Perilaku Belanja

Wakil Menteri Perdagangan, Dyah Roro Esti, menepis hadirnya fenomena Rojali dan Rohana bukan disebabkan oleh penurunan daya beli. Perubahan perilaku berbelanja dari luring atau di toko fisik menjadi berbelanja daring melalui niaga elektronik (e-commerce) bukanlah hal baru dan konsumen memiliki karakter yang berbeda-beda.

Ia menjelaskan, saat ini, masyarakat datang ke pusat perbelanjaan hanya untuk menonton bioskop, mencari makan atau sekadar berkumpul dengan orang-orang terdekat.

Di sisi lain, ada juga tipe konsumen yang lebih memilih untuk berbelanja secara daring, apalagi saat ini banyak bermunculan platform niaga elektronik. Kementerian Perdagangan pun terus mempelajari perubahan gaya hidup di konsumen.

Menurutnya, konsumen masih banyak yang berbelanja secara luring, khususnya saat periode Idulfitri, Natal dan Tahun Baru, dan libur sekolah.

"Karakter konsumen itu berbeda-beda, ada yang memang belanjanya langsung di mal, selagi makan mungkin, tapi ada juga di mana masyarakat untuk memilih untuk berbelanja online," ucapnya.

Hal senada disampaikan Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga

Hartarto, yang menyatakan data transaksi belanja daring yang terus meningkat menunjukkan bahwa tidak ada pelemahan daya beli di tengah masyarakat.

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), transaksi di online retail dan marketplace meningkat 7,55 persen secara kuartalan (quarter-to-quarter/qttq) pada triwulan II 2025.

dibandingkan pada 2018 yang tercatat sebesar 80 juta kali transaksi.

Peningkatan jumlah transaksi tersebut terutama disebabkan oleh pertumbuhan pembelian produk perawatan pribadi (personal care) dan kosmetik serta produk rumah tangga dan kantor.

Pada 2024, nilai transaksi pembelian produk perawatan pribadi dan kosmetik



Peningkatan tersebut sejalan dengan kondisi perekonomian Indonesia yang mampu tumbuh 5,12 persen secara tahunan (yoy) pada triwulan II 2025. Meskipun demikian, ia tidak menyebutkan berapa transaksi yang tercatat pada triwulan I dan triwulan II tahun ini.

Namun, Airlangga merinci pertumbuhan jumlah transaksi online shopping pada tahun lalu tercatat sebesar 3,24 miliar kali, meningkat lebih dari 11 kali lipat

tercatat sebesar Rp67,6 triliun, meningkat 16,95 persen. Sementara, nilai transaksi produk rumah tangga dan kantor melonjak 29,38 persen menjadi Rp72,8 triliun.

Airlangga menyatakan data tersebut menunjukkan adanya fenomena pergeseran perilaku masyarakat dalam berbelanja dengan memilih platform daring.

"Kita lihat konsumsi daripada

• INFO EKONOMI

masyarakat, ini terlihat shifting (pergeseran) belanjanya lari ke belanja online," ujarnya.

Ia juga menyoroti data kinerja keuangan tiga perusahaan ritel besar di Indonesia yang mengalami pertumbuhan laba dan pendapatan lebih dari 5 persen sepanjang semester I 2025.

Ketiga perusahaan tersebut adalah PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT) atau pengelola Alfamart, PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI) yang mengelola penjualan brand internasional seperti SOGO hingga ZARA, serta PT MAP Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA) yang mengelola toko ritel Sports Station hingga Kidz Station.

Pada semester I 2025, pertumbuhan pendapatan dan laba bersih AMRT, MAPI, serta MAPA masing-masing mencapai 7,76 persen dan 4,99 persen; 8,72 persen dan 6,85 persen; serta 11,51 persen dan 12,87 persen.

Melihat data tersebut, Airlangga pun menyatakan isu Rohana dan Rojali yang seringkali dikaitkan dengan pelemahan daya beli masyarakat terlalu dibesar-besarkan.

Menteri Sekretaris Negara, Prasyetyo Hadi, melihat fenomena Rojali dan Rohana sebagai lecutan akibat kondisi perekonomian saat ini yang harus dibenahi.

"Saya terus terang tidak terlalu gembira dengan istilah itu. Menurut pendapat saya, istilah itu jangan dijadikan sebagai sebuah joke atau lelucon. Itu adalah sebuah lecutan bagi kita bahwa memang masih banyak yang harus kita perjuangkan, masih banyak yang harus kita benahi," kata Prasyetyo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025.

Prasyetyo mengakui, meski pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II-2025 mencapai 5,12 persen, tidak bisa menggambarkan secara menyeluruh kondisi kelompok masyarakat tertentu.

Ia menyadari masih ada masyarakat yang masih berada di desil 1-2 atau berada di garis kemiskinan dan miskin ekstrem. Kondisi tersebut lah yang memunculkan adanya fenomena Rojali dan Rohana.

Menurut Prasyetyo, istilah tersebut tidak bisa dianggap remeh sebagai lelucon, namun menjadi pengingat bahwa masih ada kelompok masyarakat yang harus bekerja keras untuk membeli sesuatu demi mendorong pertumbuhan

ekonomi lewat daya beli.

Konsumen Hati-hati

Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar, mengatakan fenomena Rojali dan Rohana merupakan respons wajar dari konsumen terhadap ketidakpastian ekonomi beberapa bulan terakhir.

Menurut Mahendra, kecenderungan masyarakat untuk menahan konsumsi dan bersikap lebih hati-hati merupakan reaksi alami terhadap situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

"Jadi, pada saat terjadi kondisi yang lebih tidak pasti beberapa bulan terakhir ini, tentu banyak pihak yang lebih mengambil posisi untuk menimbang-nimbang sebelum mengambil keputusan," katanya.

Perilaku konsumen tersebut tak jauh berbeda dari sikap produsen atau investor dalam menghadapi ketidakpas-

Tapi dengan kepastian yang sudah lebih jelas dengan hasil yang telah dicapai (sekarang), maka tentu sama dengan pihak produsen dan investor, konsumen pun akan memperoleh kepastian lebih baik terhadap keputusan untuk menentukan belanja lebih lanjut ke depan," katanya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) DKI Jakarta, Iwan Setiawan, mengatakan, meski ramai di jagad media sosial, namun khusus di Jakarta, fenomena tersebut tidak berdampak besar terhadap ekonomi secara keseluruhan karena daya beli masyarakat Jakarta yang resilien.

"Dari sisi purchasing power, Jakarta punya daya tahan atau resiliensi, masih cukup kuat," katanya, Jumat, 8 Agustus 2025.

Kantor Perwakilan BI DKI Jakarta mencatat konsumsi rumah tangga tumbuh kuat sebesar 5,13 persen (yoy), meski-



tian. Dalam kondisi seperti itu, semua pihak cenderung menunggu kejelasan sebelum melakukan langkah lanjutan, termasuk dalam hal pengeluaran atau investasi.

OJK optimistis, dengan membaiknya arah kebijakan ekonomi dan meredanya ketidakpastian global, maka perilaku konsumsi masyarakat akan kembali pulih secara bertahap. Maka dari itu, pentingnya sinyal kepastian bagi konsumen agar mereka merasa lebih percaya diri untuk kembali belanja.

"Saya rasa kalau itu terjadi di dalam konteks konsumen, saya rasa wajar saja.

pun melambat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar 5,36 persen.

"Konsumsi masih di level lebih dari 5 persen. Ini masih mendorong pertumbuhan karena pangsa konsumsi di Jakarta itu hampir 60 persen," katanya.

Sementara itu, konsumsi pemerintah pada triwulan II 2025 tumbuh 5,16 persen (yoy), melambat dari periode yang sama tahun lalu sebesar 9,22 persen (yoy), seiring normalisasi belanja pegawai dan belanja bansos setelah pada Triwulan I-2025.

Di sisi lain, hampir semua sektor utama

lapangan usaha di Jakarta juga mencatatkan kinerja yang baik.

Ekonomi Jakarta terutama ditopang oleh lapangan usaha perdagangan yang tumbuh 5,91 persen (yoy) lebih tinggi dari periode sebelumnya (4,35 persen yoy), didorong oleh meningkatnya aktivitas masyarakat, terutama pada periode libur anak sekolah, cuti bersama, dan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN).

Lapangan usaha informasi dan komunikasi juga tumbuh tinggi sebesar 5,65 persen (yoy) yang didorong oleh tetap tingginya penggunaan data dan internet, serta jumlah penonton bioskop pada periode libur anak sekolah.

BPS DKI Jakarta merilis perekonomian Jakarta tumbuh sebesar 5,18 persen pada Triwulan II-2025 (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional di angka 5,12 persen. DKI Jakarta juga tercatat menjadi penyumbang tertinggi struktur perekonomian nasional pada triwulan II-2025 yakni sebesar 16,61 persen.

Pengunjung Naik, Daya Beli Belum Tumbuh

Ketua Umum Asosiasi Pusat Perbelanjaan Indonesia (APPBI), Alphonzus Widjaja, mengatakan, jumlah pengunjung mal pada periode Januari hingga Juli 2025, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

"Pertumbuhannya kurang lebih 10 persen dibandingkan Januari-Juli tahun lalu," kata Alphonzus, Rabu, 6 Agustus 2025.

Berdasarkan data 400 pusat perbelanjaan yang bergabung dengan APBBI, rata-rata kunjungan lebih dari 50.000 orang per hari di setiap mal. Jika ditotalkan jumlah pengunjung pusat perbelanjaan berdasarkan hitungannya mencapai 20-30 juta orang per hari.

Meski tumbuh 10 persen, peningkatan jumlah pengunjung pusat perbelanjaan tahun ini masih berada di bawah target yang ditetapkan. APPBI menargetkan pertumbuhan kunjungan mal sebesar 20-30 persen per tahun.

"Sekarang hanya tercapai 10 persen.

Jadi, saya kira memang tetap tumbuh, tapi tidak signifikan bagi kami karena masih di bawah target. Memang betul (daya beli belum pulih)," ujarnya.

Terkait daya beli, ia menyebut fenomena Rojali dan Rohana yang terjadi di pusat perbelanjaan disebabkan oleh berubahnya fungsi pusat perbelanjaan. Meskipun bukan faktor utama, daya beli masyarakat tetap memengaruhi intensitas terjadinya Rojali dan Rohana karena berkaitan dengan kondisi ekonomi makro dan global.

"Bukan melulu soal daya beli. Rohana dan rojali pasti ada setiap waktu, tapi intensitasnya bisa bertambah dan berkurang," katanya.

Selain itu, ia juga membantah bahwa fenomena tersebut berkaitan dengan pergeseran pola

"Kelas menengah makin terhimpit oleh biaya hidup, terutama inflasi bahan pangan, harga perumahan, dan suku bunga yang tinggi. Mereka ke mal hanya untuk rekreasi atau refreshing, bukan belanja," kata Bhima.

Menurutnya, pendapatan kelas menengah yang tergerus cicilan dan inflasi membuat mereka lebih fokus memenuhi kebutuhan pokok. Apalagi, pusat perbelanjaan lebih banyak menawarkan barang sekunder dan tersier, seperti produk fesyen dan barang mewah.

"Ke mal itu cuma untuk cuci mata," ujarnya.

Selain tekanan ekonomi, Bhima menilai perubahan perilaku belanja akibat kemudahan bertransaksi di toko online juga memperkuat fenomena rojali.

"Fenomena ini jangka panjang. Malah belum ada tanda-tanda pemulihan. Jadi, pusat perbelanjaan lah yang harus menyesuaikan," kata Bhima.

Menurut dia, mal yang ingin bertahan



belanja masyarakat dari mal ke toko daring.

"Saya kira bukan karena online, tetapi sekarang masyarakat kalau belanja tidak hanya berbelanja. Mereka menginginkan pengalaman lain seperti makan dan minum. Ini yang harus diperhatikan oleh teman-teman peritel, harus cepat merespons gaya hidup masyarakat yang terus berubah," ujar dia.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menilai fenomena ini bukan hal baru. Namun, tren ini semakin nyata setelah pandemi Covid-19.

harus mengubah konsep, lebih menonjolkan tempat makan, hiburan, dan rekreasi keluarga.

"Mal-mal yang mengubah konsepnya itu yang bertahan, karena pengeluaran konsumen untuk rekreasi bisa menopang pendapatan mal," katanya.

Bhima juga memprediksi, tren rojali masih akan berlanjut hingga 2026.

"Tahun depan ini masih akan terjadi. Ada perang dagang, potensi PHK di sektor padat karya, daya beli yang menurun, dan efisiensi belanja pemerintah. Semua itu mengurangi ruang belanja kelas menengah," ujarnya. ●



RETRET KADIN INDONESIA MENGUJI JIWA KORSA PENGUSAHA

Lebih dari 200 pengusaha nasional berkumpul di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat sore, 8 Agustus 2025. Bukan mengenakan batik atau jas, kali ini semua mengenakan seragam loreng warna kelabu.

Para pengusaha ini akan mengikuti retreat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, hingga Minggu, 10 Agustus 2025. Karena itu, seragam ini akan dikenakan sampai retreat berakhir, Minggu sore. Sebelumnya, retreat pernah digelar pemerintah untuk para menteri Kabinet Merah Putih dan kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak 2024.

Para pengusaha fungsionaris dan senior Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini dikomandani oleh Ketua Umum Kadin, Anindya Novyan Bakrie. Para wakil ketua umum Kadin, seperti Franky Oesman Widjaja, Erwin Aksa, James T Riady, Mulyadi Jayabaya, Nita Yudi, Shinta Kamdani, dan Bambang Soesatyo, tampak mendengarkan arahan Presiden Prabowo yang melepas keberangkatan mereka dari Hambalang.

Para senior seperti Aburizal Bakrie, Tomy Winata, Hilmi Panigoro, dan Oesman Sapta Odang pun tampak mengenakan seragam loreng Komcad itu. Selain itu, masih ada Ketua Dewan Kehormatan Rosan P Roeslani yang juga

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Arsyad Rasjid, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

"Presiden Prabowo memberikan arahan sekaligus melepas keberangkatan peserta retreat tersebut," ujar Teddy.

Selepas mendengarkan arahan yang berlangsung pukul 15.30 sampai maghrib, para pengusaha pun langsung ke Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Menumpang pesawat Hercules C-130 milik TNI AU, sekitar pukul 20.00 WIB, mereka terbang ke Magelang menuju kawasan Akmil.

Retret ini, menurut Teddy, akan membentuk disiplin, nasionalisme, ketekunan, pengetahuan serta wawasan kebangsaan kepada para peserta.

Kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum penguatan komitmen antara pemerintah dan pelaku usaha untuk bersinergi dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya di tengah tantangan global.

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Ace Hasan Syadzily, menjelaskan, para peserta akan mendengarkan paparan terkait situasi geopolitik global dan bagaimana merespons situasi yang memengaruhi geoekonomi. Materi lainnya terkait empat konsensus nasional kebangsaan.

Terkait isu mutakhir, termasuk tantangan terkini, akan dibahas dalam diskusi-diskusi kelompok kecil.

"Supaya semua punya pemahaman utuh tentang tujuan nasional, situasi ekonomi saat ini, dan potensi-potensi apa yang bisa diperankan para pengusaha nasional ini, di tengah persaingan ekonomi global tersebut," tutur Ace, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Retret dinilai penting karena ketahanan nasional bukan hanya soal kemampuan dan kekuatan militer, melainkan juga daya tahan ekonomi. Tentu, para pengusaha pun diharapkan bisa mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo.

Sepanjang Sabtu, narasumber yang hadir selain Ace Hasan adalah Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin.

Dari retret, diharapkan para pengusaha tak hanya memikirkan soal cuan atau profit. Sebaliknya, mereka diharapkan bisa menjadi pengusaha yang memiliki komitmen untuk memperkuat ketahanan nasional di bidang ekonomi.

Selain itu, sebagai penggerak ekonomi, para pengusaha mau bekerja keras dan berusaha menciptakan lapangan kerja, mendorong pertumbuhan ekonomi berkualitas, dan menyukseskan program-program Asta Cita.

"Karena yang disusun dalam Asta Cita adalah membangun kemandirian ekonomi bangsa," tambah Ace.

Pertengahan Juni lalu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily. MoU bertajuk membangun ketahanan nasional berbasis dunia usaha itu, menurut Anindya, bertujuan menjadikan pengusaha Indonesia tidak hanya tangguh secara ekonomi, tetapi juga memiliki semangat juang kebangsaan.

"Kita ingin membentuk pengusaha-pengusaha pejuang dan pejuang-pejuang pengusaha," kata Anindya.

Selain itu, Kadin mengusung motto tabah, jujur, setia sebagai landasan nilai bagi dunia usaha nasional. Karena itu, pengusaha selalu optimistis, transparan, profesional, dan setia untuk Merah Putih.

Kerja sama ini, menurut Anindya, di-

harapkan dapat mempererat semangat kebangsaan dan menghasilkan rekomendasi konkret, termasuk di bidang deregulasi, investasi, perdagangan, serta ketenagakerjaan.

"Kita ingin retret ini jadi tempat kita bukan hanya menyampaikan masalah, melainkan juga memberi solusi," jelas Anindya.



fokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan program pementapan nilai-nilai kebangsaan. Kedua, pertukaran informasi, narasumber, serta kajian dan publikasi ilmiah. Ketiga, inisiatif lain yang relevan dan fleksibel sesuai kebutuhan kedua belah pihak.

Retret yang diselenggarakan Kadin bersama Lemhannas di Magelang di-

Anindya menambahkan, kegiatan ini menjadi platform strategis untuk merumuskan program-program quick win yang akan diimplementasikan oleh asosiasi pengusaha terbesar di Indonesia ini.

Kadin Indonesia telah menyusun empat program quick win yang fokus pada isu-isu krusial. Program-program tersebut meliputi dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis, Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG)

• INFO EKONOMI

Gotong Royong, upaya peningkatan kemampuan dan kompetensi tenaga kerja, serta mewujudkan ketersediaan rumah layak huni dan terjangkau bagi masyarakat.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Andi Yuslim Patrawi, menegaskan kegiatan retreat pengusaha yang digelar di Akmil Magelang bertujuan untuk memperkuat karakter, mental, serta komitmen kebangsaan para pelaku usaha nasional

Retret itu, menurut Andi, bukan sekadar ajang pertemuan bisnis, melainkan

tetapi juga berkontribusi dalam menjaga keberlanjutan dan kemandirian ekonomi bangsa. Karena itu, pendidikan karakter dalam retreat menjadi sangat penting.

"Yang paling utama adalah menanamkan jiwa kebangsaan dan persatuan. Ini menjadi bagian dari misi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah dalam melahirkan pejuang ekonomi berwawasan nasional," lanjutnya.

Andi berharap kegiatan ini menjadi momentum kebangkitan semangat pengusaha Indonesia untuk bersatu dan berjuang demi kepentingan na-

mereka mengikuti Retret Kadin Indonesia di Akmil Magelang.

"Tidak baik buat kehidupan bernegara jika hanya kita yang sejahtera dan makmur, sementara banyak orang yang hidup susah. Jika situasi ini dibiarkan, semua pihak akan rugi. Karena masalah sosial yang tidak dikehendaki akan terjadi," ungkap Prabowo.

Dia pun meminta pengusaha yang masuk kategori menengah dan besar harus membantu usaha kecil dan mikro serta rakyat yang tertinggal. Langkah ini dinilai akan kembali memberikan man-



ruang pembinaan untuk membentuk jiwa korsa serta kedisiplinan yang kuat di kalangan pengusaha agar lebih berperan dalam pembangunan ekonomi nasional.

"Dengan jiwa korsa terbentuk, maka karakter kita sebagai anak bangsa akan semakin peduli, kuat, dan bersatu. Dunia usaha butuh kedisiplinan, keberanian, dan kepemimpinan," ujar Andi.

Ia menjelaskan para pengusaha harus memiliki karakter petarung yang tidak hanya fokus pada keuntungan semata,

melainkan juga berkontribusi dalam membangun bangsa, bukan sekadar mengejar profit pribadi.

Saling Bantu

Presiden Prabowo Subianto meminta para pengusaha untuk tidak mementingkan diri sendiri serta membantu pihak lain. Menurutnya, hal itu menjadi kunci kesuksesan ekonomi nasional.

Pesan ini disampaikan Prabowo saat menjamu pengusaha Kadin Indonesia. Selama dua jam, Prabowo mewantiwanti pengusaha jelang keberangkatan

ke berbagai daerah.

"Jika semua rakyat sejahtera, usaha Anda semua akan berjalan lebih bagus. Ekonomi bertumbuh lebih cepat. Karena akan semakin banyak orang yang belanja produk Anda, belanja di mal, membeli properti, dan sebagainya," kata Prabowo.

Membantu yang kecil dan tertinggal untuk ikut maju adalah bagian dari semangat Indonesia Incorporated (Indonesia Inc). Konsep yang disinggung Prabowo ini digadang mampu memper-

cepat terwujudnya cita-cita proklamasi kemerdekaan RI, yakni masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

“Saya harap retreat nanti menghasilkan pengusaha pejuang yang bekerja dalam semangat Indonesia Incorporated,” tegasnya.

Butuh Komitmen Negara

Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Politik, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, menjelaskan, ancaman geopolitik global yang kian kompleks. Mu-

gagal menjaga iklim usaha dan stabilitas nasional, maka kita akan kehilangan kepercayaan dari para investor yang sudah susah payah kita bangun selama dua dekade terakhir,” ujar Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan kekhawatiran tersebut bukan tanpa alasan. Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat arus keluar dana asing mencapai Rp28,6 triliun selama kuartal pertama 2025.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat jatuh hingga 7,2 persen dalam satu hari perdagangan pada Maret lalu, memperlihatkan betapa sen-

hukum, keamanan, iklim politik yang stabil, serta transparansi kebijakan,” kata Ketua DPR RI ke-20 itu.

Bamsoet menjelaskan, negara harus siap menghadapi ancaman siber, kelangkaan energi, dan ketegangan lintas batas. Untuk itu, ketahanan ekonomi nasional harus dibangun di atas fondasi pertahanan nasional yang kokoh, baik dari segi militer, energi, pangan, hingga keamanan digital. Pemerintah perlu memperkuat ketahanan struktural.

Selain mendorong proyek strategis nasional, pemerintah juga membangun



lai dari krisis Laut China Selatan hingga fluktuasi harga minyak akibat perang Rusia-Ukraina, memberi tekanan besar terhadap ekonomi negara-negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Dalam situasi tersebut, dunia usaha Indonesia membutuhkan pijakan yang kokoh, yakni stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum.

“Stabilitas politik, keamanan dan kepastian hukum adalah syarat utama dalam membangun iklim usaha dan investasi yang sehat di Indonesia. Jika kita

sitifnya pasar terhadap ketidakpastian politik dan tensi global. Indeks tukar mata uang Rupiah juga sempat menyentuh level Rp16.700 per Dolar AS pada April 2025, tertinggi sejak krisis pandemi.

Lemahnya Rupiah menekan biaya impor bahan baku industri, sekaligus meningkatkan tekanan inflasi terhadap sektor riil. Oleh karena itu, Bamsoet menegaskan dunia usaha membutuhkan keyakinan.

“Dan keyakinan itu tumbuh dari komitmen negara dalam menjaga kepastian

sistem pertahanan ekonomi melalui perluasan pasar ekspor, penguatan logistik nasional, dan pengamanan energi nasional.

Menurut Bamsoet, KADIN terus mendorong pelaku usaha untuk memperkuat manajemen risiko.

“Mitigasi risiko bukan sekadar formalitas ISO atau pelatihan teknis. Ini kunci keberlanjutan bisnis. Karena ancaman bisa datang kapan saja, dari mana saja,” kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar tersebut. ●

LIFTING MIGAS ON THE RIGHT TRACK

Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Bahlil Lahadalia sudah kerap berbicara tentang lifting (pengambilan atau produksi) minyak bumi memenuhi target yang menjadi patokan penerimaan migas APBN. Minta tambahan anggaran juga.

Pada akhir Juni 2025, Presiden Prabowo berkelakar: Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang warga Papua bernasib baik karena menjadi menteri. Kelak yang bernasib baik itu juga menunjukkan kinerja positif sebagai menteri.

"Ini Menteri ESDM-nya juga dari Papua rupanya ya?" kata Presiden Prabowo sambil tertawa.

"Siap. Siap Bapak Presiden. Biasalah-olah Papua," jawab Bahlil disambut tawa banyak hadirin di acara dialog ringan dengan beberapa kepala daerah saat acara peresmian Pengoperasian dan Pembangunan Energi Terbarukan di 15 Provinsi yang dipusatkan di PLTP Blawan Ijen Unit 1, Bondowoso, Jawa Timur, Kamis, 26 Juni 2025..

sektor ESDM untuk APBN memang relatif tinggi, Bahlil menganggap kementerian lain parah. Toh Menteri ESDM yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu pun sekitar sebulan kemudian, akhir Juli 2025, mulai menunjukkan kinerja kementeriannya.

"Hari ini saya baru keluar dari kantor. Saya lihat di layar monitor yang online: Sudah mencapai 608.000 barel hari ini lifting kita, tetapi belum akumulatif ya," kata Bahlil dalam rangkaian acara CEO Forum 2025 dan Energi Mineral Festival, Rabu, 30 Juli 2025.

Bahlil meyakini target perbaikan lifting akan terlaksana sebagaimana arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang mencapai 900.000 bpd pada 2029—2030. "Ya, kita doakan, saya mohon sup-



"Nasib kau baik. Nasib kau baik, jadi menteri kau hahaha," lanjut Presiden.

Bahlil pun menjawab bahwa dirinya beruntung karena menjabat sebagai Menteri ESDM. Bukan menteri bidang lain.

"Masih agak baik Pak, karena Menteri ESDM. Kalau yang lain, parah juga hahaha," jawab Bahlil.

Boleh jadi karena potensi kontribusi

port bahwa insyaAllah atas berkat dan arahan serta perintah Bapak Presiden Prabowo untuk lifting kita harus bisa mencapai sesuai target APBN," tuturnya.

Dua hari sebelumnya, Bahlil lebih dulu menyampaikan optimisme terkait target lifting minyak dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 akan tercapai. Ia mengemukakan-

nya usai melaporkan perkembangan sektor energi langsung kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

“Saya baru selesai melaporkan ke Presiden. Pertama, soal lifting insya Allah akan mencapai target APBN 2025. Dan juga bicara strategi PNBP kita yang ditargetkan APBN, insya Allah tercapai,” kata Bahlil di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 28 Juli 2025.

Terkait capaian produksi minyak nasional, Bahlil menyebut rata-rata lifting minyak pada Juni dan Juli 2025 mencapai sekitar 602.000 barel per hari (bph). Angka tersebut menunjukkan pergerakan positif meski masih di bawah target jangka panjang pemerintah. “Lifting sekarang rata-rata 602.000 barel per hari Juni—Juli kemarin,” tandas Bahlil.

“Kita doakan, saya mohon dukungan, bahwa Insya Allah atas berkat dan

program prioritas dalam Asta Cita Bapak Presiden yaitu adalah kedaulatan energi. Sudah barang tentu ini bukan hanya menjadi slogan, tapi ini merupakan cita-cita mulia dari negara yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo,” ujar Bahlil dalam acara CEO Forum 2025 di

Prabowo, Bahlil menyatakan akan bekerja sama dengan KKKS untuk mencari terobosan dalam rangka peningkatan lifting, termasuk mencari akar permasalahan apabila terjadi perlambatan dalam perizinan, sekaligus mempercepat prosesnya. “Saya akan turun membantu Ba-



Ini Menteri ESDM-nya juga dari Papua rupanya ya?” kata Presiden Prabowo sambil tertawa. “Siap. Siap Bapak Presiden. Biasa olah-olah Papua.

arahan serta perintah bapak Presiden Prabowo Subianto, untuk lifting kita harus bisa mencapai target APBN,” ungkapnya.

Sedangkan di acara CEO Forum, Bahlil menegaskan akan mempercepat perizinan bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang kini masih dalam proses. Hal ini dilakukan dalam rangka mencapai target lifting migas pada APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari, yang juga menjadi program prioritas Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan kedaulatan energi.

“Kita semua tahu bahwa salah satu



Kantor SKK Migas Jakarta

Bahlil mengemukakan ingan potensi migas dengan seluruh konsesi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan lifting. Adapun dari 128 cekungan, baru terdapat 20 cekungan yang berproduksi. Hal ini mengindikasikan masih banyak potensi yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Kemudian, masih banyak Wilayah Kerja (WK) yang sudah memiliki Plan of Development (POD), namun tidak berjalan.

Maka, sesuai arahan dari Presiden

pak Ibu semua untuk proses perizinan. Tapi saya mohon bagi yang sudah selesai izinnya, dan atau yang tidak ada persoalan lagi, tolong segera jalan. Kalau tidak maka kami akan melakukan langkah-langkah yang terukur. Sudah barang tentu by regulasi,” ungkap Bahlil.

Selain itu, Bahlil juga berpesan agar ada pemberdayaan bagi masyarakat daerah. Pembinaan dan pemberian kesempatan bagi masyarakat setempat menjadi krusial agar keberadaan kekayaan migas di daerah memberikan

• INFO EKONOMI

dampak positif. Terkait dukungan fiskal untuk mewujudkan proyek hulu migas yang ekonomis, Bahlil menyampaikan saat ini sudah tidak masalah gross split ataupun cost recovery karena Internal Rate of Return (IRR) sudah dibuat ekonomis.

Pada CEO Forum 2025, para pimpinan tertinggi (CEO) KKKS industri hulu Migas kembali menegaskan komitmennya untuk dapat mencapai target lifting minyak dan gas 2025. Tak hanya itu, Bahlil beserta para CEO KKKS juga menandatangani Piagam SIAP Selamat yang menegaskan komitmen dan kepatuhan KKKS untuk menjalankan operasional

target kita di APBN 2025 adalah 605 ribu barel per hari. Sekarang di bulan Juni sudah 608,1 ribu barel per hari," ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin, 11 Agustus 2025.

"Sejak 2008-2024 dari data yang kami dapat dari Dirjen Migas, produksi tidak pernah mencapai target APBN. Atas kerja sama yang baik, sekarang di Juni produksinya sudah melampaui target APBN," sambungnya.

Secara akumulasi, total produksi minyak dan gas bumi (migas) pada semester I 2025 mencapai rata-rata 1.754,5 barel setara minyak per hari, atau 111,9 persen dari target APBN 2025 sebesar

wa Indonesia masih memiliki tantangan yang sangat besar dalam urusan lifting minyak dan gas bumi (migas). Pertama, karena kebanyakan sumur-sumur eksisting sudah terlalu tua dan ada sejak Indonesia belum merdeka.

Kedua, sumur yang sudah tidak aktif (idle well) pun masih banyak. Lalu, pengusahaan sektor migas disebutkan butuh investasi luar biasa besar.

"Tetapi kalau kita melihat dari upaya yang kita lakukan dengan KKKS, dengan teman-teman pengusaha, rasanya sih ada secercah harapan untuk kita menuju pada perbaikan lifting untuk mencapai target 2029-2030, yang harus



hulu migas dengan standar operasional dan keselamatan yang tinggi dan menerapkan Good Governance. (DKD)

Nah, menjelang peringatan HUT ke 80 Proklamasi, Bahlil menyampaikan realisasi produksi minyak sepanjang semester I 2025 mencapai 602,4 ribu barel per hari, atau 99,5 persen dari target APBN 2025 sebesar 605 ribu barel per hari.

Bahlil Lahadalia menyatakan, capaian produksi minyak pada Juni 2025 bahkan telah melampaui target APBN 2025, dengan rata-rata produksi sebesar 608,1 ribu barel per hari. "Untuk minyak,

1.610 barel setara minyak per hari. Sedangkan untuk gas bumi, Bahlil menyebutkan produksi pada semester I 2025 mencapai 1.199,7 ribu standar kaki kubik per hari, atau 119 persen dari target APBN 2025 sebesar 1.005 standar kaki kubik per hari.

Khusus pada Juni 2025, capaiannya sebesar 1.146,4 standar kaki kubik per hari. Sedangkan capaian lifting gas di bulan tersebut turun dibanding bulan sebelumnya, yang sebesar 1.211,3 standar kaki kubik per hari pada Mei 2025.

Namun, Bahlil memperingatkan bah-

menyumbang kurang lebih sekitar 900 ribu barel per hari. Ini yang jadi dorongan kita semua," ujarnya.

Lebih lanjut Bahlil mengemukakan kementeriaannya tidak kunjung meminta kenaikan anggaran meskipun menyumbang penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang besar. Ia menyebutkan, sepanjang semester I-2025 setoran PNBP dari sektor energi dan tambang mencapai Rp138,8 triliun.

Angka PNBP itu mencapai 54,5 persen dari jumlah pungutan yang ditargetkan dari Kementerian ESDM sampai

dengan akhir 2025 senilai Rp254,5 triliun. Bahlil menyebut target setoran PNBP dari sektor ESDM sebesar Rp254,5 triliun itu setara dengan 10 persen—12 persen target pendapatan negara tahun ini.

Selain itu, sektor ESDM juga menyumbang setoran perpajakan melalui pajak penghasilan (PPH) badan dari perusahaan migas. Jika digabungkan dengan setoran PPh badan, Bahlil menyatakan sektor ESDM menyumbang sekitar 15,5 persen dari total pendapatan negara.

“Sekalipun begini kami tetap tidak meminta tambah anggaran. Kalau tidak dikasih kita tidak minta. Namun, kalau enggak dikasih-kasih juga berarti udah

ditetapkan tahun ini sebesar Rp121 triliun. Sementara itu, setoran dari sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) serta sektor lainnya masing-masing sebesar Rp1,09 triliun dan Rp6,2 triliun.

“Bayangkan Bapak-Ibu semua, di tengah gejolak harga minyak turun, harga komoditas batu bara turun. Akan tetapi, kami harus berusaha tetap untuk mencapai Rp254,5 triliun rupiah,” ucap Bahlil.

Tambahan pula, serapan tenaga kerja di sektor migas, mineral, ketenagalistrikan dan energi baru terbarukan (EBT) mencapai 753.578 orang selama semester I-2025. Seiring itu, Kementerian

naik 28,75 persen dibandingkan dengan posisi investasi semester I-2024 di angka US\$6,3 miliar.

Selanjutnya, realisasi investasi pada sektor mineral mencapai US\$3,1 miliar sampai akhir Juni 2025. Realisasi investasi sektor mineral itu naik 29,17 persen dibandingkan dengan posisi investasi periode yang sama tahun sebelumnya di angka US\$2,4 miliar. Realisasi investasi pada sektor listrik sebesar US\$1,9 miliar dan EBT sebesar US\$0,8 miliar.

Toh anggaran Kementerian ESDM pada 2025 sudah dipangkas sebesar 42,41 persen atau sekitar Rp1,65 triliun dari pagu Tahun Anggaran 2025 yang



enggak tahu diri itu namanya,” ucap Bahlil.

Adapun, capaian PNBP sektor ESDM itu terjadi di tengah tren penurunan harga komoditas andalan Indonesia seperti batu bara, minyak mentah hingga mineral logam. Sebagian besar setoran PNBP itu berasal dari sektor mineral dan batu bara (mineral) yang menembus Rp74,2 triliun. Selanjutnya, setoran besar lainnya berasal dari sektor minyak dan gas bumi (migas) mencapai Rp57,3 triliun.

Namun, kontribusi dari sektor mineral masih terpaut jauh dari target yang

ESDM mencatat realisasi investasi pada semester I-2025 mencapai US\$13,9 miliar atau sekitar Rp225,5 triliun (asumsi kurs Rp16.250 per dolar AS).

Angka realisasi investasi itu naik sekitar 24,1 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat US\$11,2 miliar. Malahan, menurut Kementerian ESDM, realisasi investasi paruh pertama 2025 ini menjadi yang tertinggi dalam kurun lima tahun terakhir.

Berdasarkan sektornya, realisasi investasi migas mencatatkan kinerja signifikan dengan torehan US\$8,1 miliar atau

seharusnya bernilai Rp3,91 triliun. Sedangkan pada 2026 pagu anggaran Kementerian ESDM disetujui sebesar Rp8,11 triliun oleh Komisi XII DPR. Kesepakatan anggaran bersama dengan komisi yang mengurus bidang energi itu bakal menjadi usulan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

Nah, soal alokasi anggaran tentu sudah menjadi ranah politik meskipun jalin berkelindan dengan ekonomi. Toh Bahlil masih menteri dan ketua umum partai pula. Masih beruntung. ●



HUT ke-80 Republik Indonesia

PESTA RAKYAT DI ISTANA MENYATU DALAM KEMERDEKAAN

Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu, 17 Agustus 2025. Momentum bersejarah ini sekaligus menjadi peringatan ke-80 tahun kemerdekaan Indonesia yang tahun ini mengusung tema "Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju."

Upacara dimulai dengan laporan Komandan Upacara Kolonel Inf Amril Hairuman Tehupelasury, kepada Presiden Prabowo selaku Inspektur Upacara. Tak lama berselang, dentuman meriam sebanyak tujuh belas kali, disertai bunyi sirene panjang, menggema menandai dimulainya Peringatan Detik-Detik Proklamasi.

Momen khidmat terjadi ketika Presiden Prabowo membacakan langsung naskah proklamasi yang 80 tahun silam dikumandangkan oleh proklamator, Soekarno. Usai pembacaan, Kepala Negara memimpin segenap peserta upacara untuk mengheningkan cipta guna mengenang jasa para pahlawan. Selanjutnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar memandu pembacaan doa, menghadirkan suasana syahdu di halaman Istana Merdeka.

Prosesi berlanjut dengan pengibaran bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Tim "Indonesia Berdaulat."

Bianca Alessia Christabella Lantang, perwakilan Sulawesi Utara, dipercaya membawa bendera Merah Putih. Ia didampingi El Rayyi Mujahid Faqih dari Kalimantan Timur sebagai pembentang, Farrel Argantha Irawan dari DKI Jakarta sebagai pengerek, dan Arka Bintang Is'adkauthar dari Jawa Timur sebagai Komandan Kelompok 8.

Dengan diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, Sang Merah Putih pun perlahan naik dan berkibar dengan gagah di langit halaman Istana Merdeka, disambut penuh rasa bangga oleh seluruh hadirin. Selepas pengibaran, laporan terakhir komandan upacara kepada inspektur upacara menandai berakhirnya prosesi sakral Detik-Detik Proklamasi.

Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan persembahan lagu "Hari Merdeka" karya Husein Mutahar oleh Gita Bahana Nusantara (GBN). Tahun ini, tampil pula para pelajar dari Sekolah Rakyat yang turut bernyanyi bersama, menambah semarak dan kekhidmatan peringatan kemerdekaan.

Upacara bersejarah ini tidak hanya menjadi momentum mengenang proklamasi kemerdekaan, tetapi juga meneguhkan semangat persatuan bangsa di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo dan jajaran Menteri Kabinet Merah Putih kompak mengenakan pakaian adat dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Negara tampak mengenakan beskap dipadankan dengan wastra nusantara.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi tampil dengan pakaian adat asal Padang, Sumatera Barat. "Alasannya pertama, ya tentunya kita menghormati salah satu proklamator kita, Bung Hatta, karena berasal dari Sumatera Barat. Yang kedua, kebetulan saya orang Jawa. Dalam filosofi Jawa, Padang itu artinya terang. Jadi ini doa dan harapan bahwa ke depan Indonesia akan terang benderang," ujarnya.

Menteri Agama Nasaruddin Umar beserta istri mengenakan busana khas Bugis. "Ini Bone, songkok Bone dan insyaallah istri juga pakai Bugis. Pertama, saya dari Bugis ya," kata Nasaruddin.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto beserta istri mengenakan pakaian adat Sunda.

"Yang pertama ini adat Sunda, Priayi Sunda. Karena saya dari Sunda, istri saya dari Sunda. Tapi dulu para pejuang kemerdekaan, Tirta Adhi Soerjo, Cokroaminoto, bajunya juga seperti ini. Dan mereka-mereka inilah intelektual yang berjuang di fase-fase awal menuju kemerdekaan bangsa," ungkap Bima.

Keberagaman pakaian adat yang dikenakan Presiden serta jajaran menteri dan pejabat negara mencerminkan kekayaan budaya Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, tradisi dan identitas lokal berpadu dalam satu perayaan kebangsaan, memperlihatkan betapa majemuknya Indonesia namun tetap ber-satu sebagai bangsa.

Usai upacara, Presiden Prabowo menerima ucapan selamat dari para Presiden dan Wakil Presiden terdahulu. Momen penuh keakraban tersebut berlangsung di Ruang Kredensial, Istana Kepresidenan Jakarta, dan menjadi penanda kebersamaan lintas generasi dalam merawat semangat kebangsaan.

Satu per satu, para Presiden dan Wakil Presiden terdahulu bersalaman dengan Presiden Prabowo untuk mengucapkan selamat sembari berbincang singkat. Tidak hanya itu, Presiden beserta para

tetap optimis, kemudian melakukan sesuatu bersama-sama dengan persatuan, dengan kerukunan membangun Indonesia agar lebih maju lagi," ucap SBY.

Wakil Presiden Ke-6 RI, Try Sutrisno hadir dengan busana adat Indonesia yang kerap digunakan dalam acara resmi kenegaraan. Try Sutrisno turut menyampaikan rasa syukurnya dapat kembali mengikuti upacara di Istana Merdeka.

"Saya merasa bersyukur, berbahagia dan gembira karena saya lihat secara outlook semuanya, wajah-wajah yang



Presiden dan Wakil Presiden terdahulu tampak mengabadikan momen dalam sebuah foto bersama pada perayaan HUT tahun ini.

Presiden Ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku upacara di Istana kembali membangkitkan kenangan selama dirinya bertugas di tempat yang sama dan berharap HUT Ke-80 dapat menjadi momentum persatuan nasional.

"Rakyat Indonesia harus bersyukur,

hadir menyinarkan suatu kegembiraan akan memperingati, sekaligus ada harapan melihat masa depan yang seterusnya bagaimana," ujarnya.

Pada momen ini, Try Sutrisno pun menitipkan pesan khusus bagi generasi muda Indonesia sebagai penerus bangsa.

"Saya harapkan kepada generasi muda karena merupakan generasi penerus harapan bangsa. Saya harapkan generasi muda tergugahkan sehing-

• INFO ISTANA

ga dia terus belajar, belajar, dan belajar di manapun dia berada,” kata Try Sutrisno.

Di sisi lain, Wakil Presiden Ke-13 RI, Ma'ruf Amin memaknai peringatan HUT kali ini dapat membawa semangat baru dalam membangun bangsa. Ma'ruf turut memandang bahwa kemerdekaan harus benar-benar menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

“Kita kembali pada semangat bahwa kemerdekaan itu harus membawa kemakmuran, kemerdekaan itu rahmat karena membawa kemakmuran. Kalau tidak membawa kemakmuran belum menjadi rahmat. Supaya betul-betul

dengan ‘Tanah Airku’. Selanjutnya, penampilan diisi dengan suara merdu Cakra Khan dan Isyana Sarasvati lewat lagu ‘Rumah Kita - Negeriku’. Disusul penampilan Ikatan Pencak Silat Indonesia Jakarta, hingga Rossa yang membawakan lagu ‘Indonesia Pusaka’.

Usai upacara, kemeriahan belum berhenti. GBN dan Sekolah Rakyat kembali mempersembahkan lagu ‘Hari Merdeka’ yang menggugah rasa nasionalisme. Yang paling ditunggu adalah persembahan spesial bertajuk ‘Bhinneka Tunggal Ika’, yang menghadirkan keragaman seni dari seluruh penjuru Nusantara.

dibawakan langsung oleh pesilat sekaligus aktor Iko Uwais bersama para pesilat lainnya sebagai lambang kekuatan dan diplomasi budaya bangsa.

Tidak hanya itu, hadir pula penampilan anak-anak dari Miracle Dancers Family yang memadukan tarian tradisional dengan sentuhan modern, serta Musikal Dol dari Bengkulu yang menjadi simbol keberkasaan musik tradisi Nusantara.

“Terakhir kita singgung sedikit apa sih yang menjadi semangat anak-anak sekarang, termasuk ketika adik-adik kecil yang ikut lomba di Kabupaten Kuansing di Riau dengan pacu jalur yang ini viral



menjadi rahmat maka kita jadikan momentum untuk membangun Indonesia yang makmur,” tuturnya.

Semarak Kemerdekaan

Perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Halaman Istana Merdeka tidak hanya khidmat dengan upacara bendera. Sejak pagi, suasana Istana sudah semarak dengan lantunan musik, tarian, dan nyanyian yang menyatukan semangat kebangsaan.

Sebelum upacara dimulai, panggung seni terlebih dahulu dibuka dengan penampilan Gita Bahana Nusantara, dilanjutkan penampilan Endah Laras

Menurut Eko Supriyanto, Kurator Penari, konsep ini menjadi sangat istimewa karena baru pertama kali ditampilkan pada peringatan HUT RI.

“Belum pernah ada di pertunjukan di HUT RI tahun-tahun sebelumnya, dan ini karena 80 tahun nampaknya sudah saatnya kita juga menunjukkan yang sangat yakin bahwa kita memang sangat spesial,” ujar Eko.

Eko menyebut pagelaran ini menghadirkan lintas generasi, lintas usia, dan lintas daerah. Dari Tari Barong Bali yang sarat filosofi hidup, Tarian Merah Putih dengan payung sebagai simbol pengayoman, hingga pencak silat yang

sedunia, ya kita harus menyatakan diri bahwa negara juga hadir, dan kita juga akan terus mengembangkan budaya-budaya seperti yang ada di Riau dengan pacu jalur,” ucap Eko.

Di balik kekhidmatan upacara sakral tersebut, suasana tiba-tiba pecah penuh tawa dan sorak ketika lagu “Tabola Bale” dibawakan oleh Silet Open Up dan Diva Aurel.

Lagu yang memadukan musik khas Timur yang energik itu sejak bait pertama langsung mencuri perhatian. Tidak hanya tamu undangan, para peserta upacara pun mulai menggoyangkan badan mengikuti irama. Bahkan, Pres-

iden Prabowo yang duduk di mimbar kehormatan tampak ikut bergoyang mengikuti alunan musik.

Kemeriahan semakin terasa ketika Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya turun dari panggung kehormatan. Dengan penuh semangat, keduanya bergabung bergoyang bersama para pasukan upacara, membuat suasana lapangan Istana Merdeka berubah menjadi pesta rakyat yang penuh kegembiraan.

Sorak riuh pun terdengar ketika Presiden Prabowo kemudian bangun dari tempat duduknya dan turun ke lapangan, berjoget bersama dengan wajah sumringah. "Tabola Bale" yang dikenal enerjik benar-benar menyulut semangat kebersamaan. Dari pejabat negara, peserta upacara, hingga tamu undangan, semua larut dalam joget bersama di halaman istana.

Tak ayal, momentum ini menjadi salah satu potret unik dari peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dari upacara yang penuh khidmat hingga berlanjut pada perayaan meriah, semuanya menjadi simbol bahwa kemerdekaan bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga dirayakan dengan sukacita dan kebersamaan.

Di bawah langit Jakarta siang itu, Presiden, menteri, dan rakyat bergoyang dalam satu irama, menegaskan pesan bahwa semangat kemerdekaan adalah tentang persatuan, kegembiraan, dan cinta tanah air.

Halaman tengah Istana Merdeka pun menjadi saksi kebersamaan rakyat dan pemimpin bangsa usai berlangsungnya Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Seusai upacara, masyarakat yang hadir tidak langsung beranjak pulang.

Mereka menuju halaman tengah untuk menikmati suasana pesta rakyat yang untuk pertama kalinya digelar di lingkungan Istana sebagai bagian dari perayaan hari kemerdekaan. Pesta rakyat ini menghadirkan puluhan stan makanan yang disiapkan oleh para pedagang dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari sekitar Istana.

Hidangan khas Nusantara tersaji berjejer, mulai dari sate, soto ayam, mie goreng Jawa, hingga aneka kudapan tradisional lainnya. Kursi-kursi di antara pohon-pohon rindang telah disiapkan

agar masyarakat bisa menikmati hidangan sambil ditemani alunan musik dari grup musik Ndarboy Genk yang membuat suasana makin meriah dan hangat.

Gelaran pesta rakyat di halaman tengah Istana ini menjadi simbol keterbukaan dan kebersamaan. Di tengah peringatan kemerdekaan yang penuh khidmat, masyarakat bisa bergembira, berbagi makanan, dan merayakan semangat persatuan. Sambil menyanyikan lagu kebangsaan, masyarakat

kesempatan menjadi bagian dari paduan suara pada upacara kenegaraan di Istana Merdeka adalah kebanggaan yang sulit tergantikan. Menurutnya, dukungan dari keluarga pun menjadi penyemangat tersendiri baginya.

"Tentunya senang sekali dan juga bangga dengan kesempatan yang mungkin tidak bisa semua orang dapat. Pokoknya senang sekali. Ini pertama kalinya ke Istana Merdeka sudah berparti-



tap hidangan tradisional, masyarakat dari berbagai kalangan melebur tanpa sekat yang membuktikan bahwa kemerdekaan bukan hanya milik negara, tetapi juga milik seluruh rakyat Indonesia.

Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia juga menghadirkan pengalaman tak terlupakan bagi para pelajar Sekolah Rakyat dan masyarakat yang hadir secara langsung. Mereka datang dengan antusiasme, rasa bangga, sekaligus harapan untuk Indonesia yang lebih maju.

Bagi Laela Ali, siswi Sekolah Rakyat,

sipasi menjadi paduan suara," ungkap Laela.

Tidak kalah berkesan bagi Vikar Ziyad Rasya, pelajar Sekolah Rakyat yang sejak kecil mengidolakan pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka). Ia mengaku terharu bisa diundang oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya untuk menyaksikan langsung jalannya upacara dari halaman Istana.

"Saya senang sekali dapat melihat upacara langsung. Biasanya di rumah lihat di TV akhirnya kesampaian di Istana," tutur Rasya. ●



SALAH SASARAN PENERIMA BANSOS

Pegawai BUMN hingga Pemain Judi Online

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap sejumlah temuan anomali dalam rekening penerima bantuan yang disalurkan Kementerian Sosial, termasuk penerima yang masih bermain judi online hingga memiliki saldo puluhan juta rupiah.

Kepala PPATK, Ivan Yustianandana, mengatakan, dari sekitar 10 juta rekening yang dianalisis, sebanyak 1,7 juta tidak teridentifikasi menerima bansos, sementara 8,3 juta sisanya tercatat menerima bansos.

"Namun dari jumlah tersebut, kami masih menemukan sekitar 78 ribu penerima bansos yang pada semester I 2025 terindikasi aktif bermain judi online," kata Ivan usai pertemuan dengan

Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025.

PPATK juga mendeteksi sejumlah rekening penerima dengan status pekerjaan tidak wajar, seperti 27.932 orang berstatus pegawai BUMN, 7.479 dokter, dan lebih dari 6.000 orang berprofesi sebagai eksekutif atau manajerial, yang seluruhnya masuk dalam daftar penerima bansos.

Selain itu, ditemukan pula 56 rekening penerima bansos dengan saldo di atas Rp50 juta.

"Ini jadi catatan penting yang kami sampaikan ke Kemensos untuk dilakukan verifikasi ulang dan ground-checking," ujar Ivan.

Menurut dia, seluruh temuan ini telah diserahkan ke Kemensos untuk ditindaklanjuti sesuai arahan Presiden melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Akurasi Data Bantuan Sosial.

Pemetaan saldo penerima pun dibagi PPATK dalam kategori nominal, mulai dari Rp1 juta hingga lebih dari Rp50 juta.

"Langkah ini kami lakukan untuk mendukung transparansi dan memastikan bahwa bantuan sosial benar-be-

nar diterima oleh mereka yang berhak," katanya.

Kementerian Sosial sendiri telah mencoret sebanyak 228 ribu data penerima bantuan sosial dari daftar distribusi karena dinilai tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana hasil kolaborasi dengan PPATK.

Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menjelaskan, langkah ini merupakan bagian dari pembenahan menyeluruh untuk memastikan bansos tersalurkan secara tepat sasaran.

"Kami menindaklanjuti hasil analisis PPATK. Dari 600 ribu lebih penerima yang terindikasi tidak layak, 228 ribu sudah kami coret dan mereka tidak menerima lagi karena ada anomali seperti terlibat judi online," ujarnya.

Sisanya, lebih dari 375 ribu data penerima sedang dalam tahap pendalaman, termasuk pemeriksaan profil rekening, identitas pekerjaan, hingga aktivitas mencurigakan seperti judi daring atau saldo besar yang tak sesuai kategori penerima bantuan.

Terkait temuan ribuan rekening penerima manfaat bansos yang terindikasi tidak wajar karena terdata sebagai pegawai BUMN, dokter dan manajer perusahaan, Gus Ipul menyebut sedang dalam proses pendalaman oleh Kementerian Sosial bersama PPATK dan otoritas terkait lainnya tingkat pusat maupun daerah.

Verifikasi tersebut akan dilakukan secara hati-hati agar tidak ada bantuan dari Kementerian Sosial yang salah sasaran. Jika terbukti penerima tersebut tidak layak, maka rekening akan diblokir dan bantuannya akan dialihkan kepada yang lebih berhak.

"Kami tidak ingin terburu-buru. Butuh waktu karena prinsipnya harus akuntabel, kalau tidak sesuai semua kami evaluasi," cetusnya.

Sebagaimana peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 tentang



Program Keluarga Harapan (PKH), pihak yang layak menerima manfaat di antaranya masyarakat miskin dan miskin ekstrem yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang sekarang menjadi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Gus Ipul juga menyatakan tidak ditemukan satupun penerima bansos di dalam 10 juta rekening dormant, setelah proses pencocokan nomor kependudukan yang dilakukan bersama PPAK.

Menurut dia, temuan tersebut menunjukkan pentingnya verifikasi berlapis dalam proses penyaluran bansos agar tidak ada kebocoran atau bantuan salah sasaran.

Rekening dormant yang dimaksud adalah rekening pasif yang memiliki saldo signifikan, namun tidak menunjukkan aktivitas penarikan bantuan selama periode waktu tertentu.

"Kalau rekening itu tidak aktif selama lebih dari tiga bulan plus 15 hari, maka sesuai ketentuan, dana harus dikembalikan ke negara," kata Mensos.

Dia menyatakan, verifikasi yang dilakukan nantinya tidak hanya menasar rekening penerima, tetapi juga anggota Keluarga Penerima Manfaat (KPM) akan mulai disisir dalam tahap lanjutan kerja sama dengan PPAK.

Langkah verifikasi ganda tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi nasional untuk pengelolaan bantuan sosial yang lebih akurat, inklusif, dan berbasis bukti.

Mensos juga menyampaikan rencana strategis ke depan, yaitu melakukan skrining rekening secara menyeluruh sebelum penyaluran bansos tahap berikutnya di triwulan ketiga tahun ini.

"Kami ingin penerima bansos berikutnya sudah tersaring dari awal. Ini bagian dari evaluasi internal kami," katanya.

Dia juga menyebut, langkah ini sejalan dengan arahan Presiden melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2025 agar bansos diberikan hanya kepada masyarakat yang benar-benar berhak, berdasarkan data yang akurat, mutakhir, dan

terverifikasi.

"Kami berkomitmen penuh terhadap prinsip keadilan dan akuntabilitas. Apabila setelah dilakukan verifikasi ternyata rekening tidak sesuai, maka bansos tidak akan lagi diberikan. Bahkan bisa kami blokir, yang terindikasi judi online akan digantikan penerima baru yang layak," tegasnya.

Kementerian Sosial juga akan menggandeng lebih banyak lembaga dan instansi dalam proses validasi ke depan, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan proses distribusi bansos berjalan transparan dan terpercaya.



Sebelumnya, Mensos sudah meminta Bank Indonesia untuk memeriksa rekening penerima manfaat bantuan sosial yang diduga anomali atau janggal guna memastikan dana bantuan tersebut tepat sasaran.

Kemensos telah memadankan data NIK dan rekening penerima bansos dengan data NIK warga berafiliasi dengan judi online yang ditelusuri oleh PPAK.

"Kami akan meluncur ke BI untuk minta bantuan memeriksa rekening-rekening penerima bansos. Jika ada saldo yang anomali, misalnya penerima bansos saldonya Rp5 juta itu kan anomali. Kita akan periksa lebih lanjut," kata Mensos di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025.

Menurut Mensos, pihaknya akan memeriksa lebih lanjut rekening penerima bansos yang anomali. Contohnya yang

memiliki saldo Rp5 juta hingga dana bansos yang disimpan lebih dari tiga bulan.

Mensos menilai peruntukan dana bansos dapat terukur. Contohnya dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari, sehingga dinilai janggal jika dana bansos tersebut masih disimpan lebih dari tiga bulan.

Jika setelah ditelusuri pemilik rekening tersebut tidak layak menerima bansos, Kemensos akan mengalihkan kuota bansos tersebut untuk penerima yang lebih berhak.

"Tidak mungkin (bansos) ini bisa disimpan lebih dari tiga bulan. Kalau sam-

pai tiga bulan (disimpan), ini ada keanehan yang perlu kita telusuri lebih lanjut. Kalau memang nanti terbukti anomali dan tidak layak menerima bansos, akan kita alihkan lagi kepada mereka yang lebih berhak," kata Mensos.

Mensos menambahkan, pihaknya telah melakukan pengalihan sejumlah bansos kepada mereka yang lebih tepat sasaran berdasarkan pemutakhiran DTSEN yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Pengalihan bansos itu dilakukan karena setelah melakukan pemutakhiran DTSEN dan peninjauan langsung ke lapangan, terdapat hampir dua juta KPM dinilai tidak layak menerima bansos.

Mensos menegaskan, jumlah bansos tidak dikurangi, melainkan dialihkan kepada penerima yang lebih berhak dan berada pada desil 1, 2, 3, dan 4.

"Bansosnya tidak dikurangi, bahkan Presiden malah memberikan penebalan bansos untuk 18 juta lebih KPM," katanya. ●

ANCAMAN KIAN KOMPLEKS STRUKTUR TNI MAKIN BESAR

Presiden Prabowo Subianto baru saja meresmikan puluhan komando dan ratusan satuan tempur baru di tubuh TNI yang menandai ekspansi kuantitatif terbesar dalam sejarah TNI modern.

Banyak yang berharap, langkah itu dapat memperkuat pertahanan nasional sampai-sampai rela memberikan dukungan politik dan anggaran. Namun, tidak sedikit pula yang menilai penambahan satuan di tubuh TNI ini justru tidak relevan dengan karakter ancaman zaman yang kini lebih bersifat non-tradisional.

Upacara peresmian satuan baru TNI itu digelar di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI AD, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Minggu, 10 Agustus

Daerah Angkatan Udara (Kodau).

Di jajaran pasukan tempur, dibentuk 20 Brigade Teritorial Pembangunan, 6 Grup Komando Pasukan Khusus (Kopassus), 1 Brigade Infanteri Marinir, dan 1 Resimen Korps Pasukan Gerak Cepat (Kopasgat).

Pada tingkat satuan paling bawah, ekspansi ini mencakup pembentukan 100 Batalyon Teritorial Pembangunan serta 10 batalyon elite yang terdiri dari 5 Batalyon Infanteri Marinir dan 5 Batalyon Komando Kopasgat.

Presiden Prabowo melantik sejumlah



2025. Peresmian ini menandai ekspansi kekuatan di tiga matra yang secara total membentuk sekitar 162 komando dan satuan baru.

Rinciannya meliputi penguatan komando teritorial dengan penambahan 6 Komando Daerah Militer (Kodam), 14 Komando Pangkalan Utama Angkatan Laut (Lantamal), dan 3 Komando

perwira tinggi untuk mengisi jabatan-jabatan baru di TNI. Pelantikan ini merupakan tindak lanjut penerbitan Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi TNI yang merevisi Perpres Nomor 66 Tahun 2019. Perpres baru mengatur 420 jabatan diisi oleh perwira tinggi TNI, bertambah 49 dari perpres sebelumnya yang berjumlah

371 jabatan.

Salah satu perwira tinggi yang dilantik Presiden Prabowo adalah Jenderal Tandyo Budi Revita. Lulusan Akademi Militer tahun 1991 tersebut mengisi jabatan yang selama 25 tahun terakhir kosong, yakni Wakil Panglima TNI. Sebelum dilantik sebagai Wakil Panglima TNI, Tandyo menjabat Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Darat.

Presiden juga melantik empat perwira tinggi TNI untuk menempati pimpinan dalam satuan baru. Letnan Jenderal Dion Afriadi dilantik sebagai Panglima Komando Pasukan Khusus.

Kemudian, Letnan Jenderal Marinir Endi Supardi yang sebelumnya menjabat Komandan Marinir diangkat sebagai Panglima Korps Marinir. Sementara, Marsekal Madya Deny Muis yang sebelumnya adalah Komandan Pasukan Gerak Cepat (Dankopasgat) diangkat sebagai Panglima Korps Pasukan Gerak Cepat. Adapun Marsekal Madya Andyawan Martono Putra dilantik sebagai Panglima Komando Pertahanan Udara Nasional.

Selain itu, Prabowo juga melantik tiga kepala badan di Kementerian Pertahanan. Untuk Kepala Badan Logistik Pertahanan, Presiden melantik Marsekal Madya Yusuf Jauhari yang semula merupakan Kepala Badan Sarana dan Pertahanan. Kemudian, Mayjen Gabriel Lema yang semula Asisten Operasi Panglima TNI diangkat menjadi Kepala Badan Cadangan Nasional.

Ada pula Laksamana Muda Supo Dwi Diantara yang sebelumnya menjabat Dirjen Perencanaan Pertahanan Kemhan menjadi Kepala Badan Pemeliharaan dan Perawatan.

Enam pangdam baru

Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga telah melantik perwira tinggi untuk mengisi jabatan enam Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) baru. Mayor Jenderal Agus Hadi Waluyo yang sebelumnya menjabat Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan dilantik sebagai Pangdam XIX/Tuanku Tambusai.

Pangdam XX/Tuanku Imam Bonjol diisi oleh Mayjen TNI Arief Gajah Mada yang sebelumnya menjabat Asisten Personel KSAD. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen Kristomei Sianturi diangkat

sebagai Pangdam XXI/Radin Inten. Kemudian, jabatan Pangdam XXII/Tambun Bungai dipercayakan kepada Mayjen Zainul Arifin yang sebelumnya menjabat Wakil Rektor Universitas Pertahanan.

Presiden juga melantik Mayjen Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar yang sebelumnya menjabat Asisten Latihan KSAD sebagai Pangdam XXIII/Palaka Wira. Terakhir, Mayjen TNI Lucky Avianto dilantik sebagai Pangdam XXIV/

buahmu adalah bagaikan anak kandungmu sendiri. Pimpin dengan baik, jaga mereka dengan baik, latih mereka dengan baik, latih mereka dengan keras tapi tidak dengan kekejaman," kata Presiden.

Kepada seluruh prajurit TNI, Prabowo juga mengingatkan bahwa mereka adalah tentara rakyat. Mereka lahir dari rakyat, sehingga TNI merupakan anak kandung rakyat. TNI harus mengabdikan untuk



Mandala Trikora.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memerintahkan agar panglima, komandan, dan orang-orang yang telah dipilih sebagai pemimpin harus berada di barisan terdepan untuk menjadi contoh. Mereka harus berada di tempat paling berbahaya dan tempat paling kritis. Tidak boleh ada komandan pasukan yang memimpin dari belakang.

"Saya titip saudara-saudara sekalian jaga pasukanmu sebaik-baiknya. Bina anak buahmu sebaik-baiknya, anak

rakyat, membela rakyat, dan harus siap mati demi rakyat. Hubungan dengan rakyat juga harus berlangsung harmonis karena Indonesia memiliki pertahanan rakyat semesta.

Pembentukan enam komando daerah militer (Kodam) baru merupakan bagian dari rencana strategis untuk memenuhi konsep sistem pertahanan semesta. Karena itu, anggaran untuk satuan teritorial baru itu juga sudah dialokasikan di dalam pos anggaran Kementerian Pertahanan.

• INFO NASIONAL

"Kalau sudah diresmikan, berarti sudah diperhitungkan anggarannya," kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen Wahyu Yudhayana, Senin, 11 Agustus 2025.

Wahyu menegaskan, pembentukan kodam baru sesuai dengan rencana sistem pertahanan rakyat semesta dan konsep pertahanan pulau-pulau besar. Esensinya, pembentukan kodam untuk mendukung doktrin pertahanan RI yang kini disebut dengan Trisula Nusantara.

Dengan penambahan kodam baru itu, TNI AD diharapkan memiliki kece-

mendukung pemerintah daerah.

Menurut Wahyu, enam kodam yang baru dibentuk itu akan diisi oleh prajurit baru dan lama. Sebagaimana rekrutmen rutin, akan ada personel TNI AD yang pensiun dan masuk. Rekrutmen baru ini akan dicampur dengan personel yang sudah ada di satuan.

"Jadi, biar ada yang sudah pengalaman baik di tingkat regu, kompi, sehingga mereka bisa membantu personel yang baru untuk pembinaan dan kesiapan," kata Wahyu.

Wahyu menegaskan, tidak akan ada

itu, proses operasional keenam kodam baru itu sudah dimulai.

Rencana pembentukan kodam, menurut Wahyu, sudah lama dikomunikasikan TNI dengan pemda. "Esensinya ini memang kekuatan pendukung dan pendamping untuk kesejahteraan masyarakat," tuturnya.

Ia juga menjelaskan tentang konsep mengembangkan organisasi Kopassus dari yang tadinya memiliki tiga grup, kini jadi enam grup. Dasarnya adalah karena Indonesia menganut konsep pertahanan pulau-pulau besar. Setiap satu pulau besar ditempatkan satu grup Kopassus.

Sebab, dalam hakikat ancaman tertentu, Kopassus harus bisa mengatasi dengan melakukan tindakan awal. Dengan demikian, harus ada grup di wilayahnya.

"Tidak seperti sekarang terpusat di Jawa. Esensinya, terkait respons kita mengatasi ancaman," kata Wahyu.

Wakil Panglima TNI

Teka-teki dan spekulasi mengenai sosok yang akan mengisi jabatan wakil panglima TNI akhirnya terjawab. Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Tandyo Budi Revita sebagai Wakil Panglima TNI, jabatan yang sudah 25 tahun kosong.

Sosoknya mungkin tidak sering menjadi sorotan utama media. Namun, dibalik jejaknya yang cenderung senyap, terbentang lintasan karier militer yang cemerlang dan nyaris tanpa kontroversi.

Pelantikan itu menjadi puncak dari dedikasi panjang Jenderal Tandyo, prajurit yang matang di berbagai medan penugasan. Penunjukannya mengisi kembali posisi strategis yang berfungsi sebagai penyeimbang dan penyokong utama tugas-tugas Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Lahir di Surakarta 56 tahun silam, Tandyo adalah abiturien Akademi Militer 1991 dari kecabangan infanteri. Kecabangan ini membawanya langsung ke palagan tempur dan menjadikannya saksi berbagai operasi penting dalam negeri. Seperti perwira seangkatannya, ia kenyang pengalaman dalam operasi di Timor Timur, Aceh, hingga Irian Jaya (kini Papua).

Pengalaman tempur yang solid inilah



patan merespons isu-isu pertahanan. Komponen pendukung, seperti rantai komando, pergeseran pasukan, dan dukungan logistik, diharapkan bisa meningkatkan efektivitas dan kecepatan respons, terutama dengan adanya kodam sebagai kompartemen strategis. Kodam juga diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan tugas-tugas operasi militer selain perang (OMSP) dalam

penambahan prajurit baru untuk enam kodam yang baru dibentuk. Ini karena di wilayah tersebut sudah ada korem.

Saat ini, TNI AD hanya melakukan reorganisasi sesuai dengan pangkat, kualifikasi, korps bidang tugas. Sesuai reorganisasi, akan dilakukan tour of duty dan tour of area sebagai bagian dari pembinaan untuk menambah pengalaman dan pengetahuan prajurit. Selain

yang menjadi fondasi Tandyo sebelum dipercaya dalam penugasan krusial sebagai Komandan Satuan Tugas Batalyon Mekanis Kontingen Garuda di Lebanon pada 2006-2007. Penugasan ini juga merupakan sebuah bukti pengakuan atas kemampuannya di level internasional.

Dari palagan operasi, Tandyo beralih ke spektrum teritorial. Ia dipercaya memegang tongkat komando mulai dari Komandan Korem 142/Taroada Tarogau hingga Panglima Kodam IV/Diponegoro. Saat menjabat pangdam di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta, wilayah dengan dinamika sosial-politik yang tinggi, ia berhasil menjaga stabilitas dan netralitas institusi, terutama selama periode krusial Pemilu 2024.

Alih-alih larut dalam polemik, Tandyo memilih fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu inisiatifnya yang menonjol adalah program "TNI Manunggal Air". Secara masif TNI membangun titik-titik air bersih untuk mengatasi kekeringan di berbagai daerah di wilayah Jateng. Ini adalah cerminan kepemimpinannya yang bekerja untuk menghasilkan karya nyata.

Sebelum kembali ke Mabes Angkatan Darat sebagai Wakil KSAD pada akhir 2023, ia ditarik ke jantung kebijakan pertahanan negara, yakni sebagai Kepala Badan Diklat dan Dirjen Potensi Pertahanan di Kementerian Pertahanan. Pengalaman ini memberinya pemahaman holistik tentang arsitektur pertahanan, dari pengembangan prajurit di lapangan hingga perumusan strategi di tingkat nasional.

Harta kekayaan

Sepanjang perjalanan kariernya yang membentang lebih dari tiga dekade, nama Tandyo Budi Revita bersih dari isu-isu negatif. Ia membangun reputasi sebagai seorang profesional yang bekerja lurus sesuai tugas pokoknya.

Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang disampaikan pada 25 Maret 2025 untuk periode 2024, total harta kekayaannya tercatat sebesar Rp 6,69 miliar. Angka tersebut merupakan hasil dari total aset senilai Rp9,19 miliar dikurangi utang sebesar Rp2,5 miliar.

Aset terbesar Jenderal Tandyo, yang

saat pelaporan masih menjabat Wakil KSAD, berupa tanah dan bangunan dengan nilai total Rp5,84 miliar. Portofolio aset lainnya terdiri atas kas dan setara kas senilai Rp2,37 miliar, alat transportasi dan mesin senilai Rp518 juta, harta bergerak lainnya Rp380 juta, serta surat berharga senilai Rp77,9 juta. Di dalam garasinya tercatat, antara lain satu unit mobil Jeep Rubicon dan motor Kawasaki KLV.

Perkuat soliditas

Ketua DPR, Puan Maharani, berharap jajaran pimpinan baru TNI dapat memperkuat soliditas internal. Para perwira tinggi harus mampu meningkatkan kesiapan menghadapi berbagai tantangan pertahanan nasional, baik dari dalam

oleh integritas dan semangat pengabdian prajurit kepada bangsa dan negara. Kita harus memastikan bahwa TNI tetap menjadi institusi yang dipercaya rakyat," kata Puan.

Wakil Ketua Komisi I DPR Sukamta, berharap para perwira tinggi yang baru dilantik itu dapat menghadapi tantangan dan ancaman yang semakin kompleks.

Menurut dia, salah satu tantangan yang dihadapi ke depan adalah meningkatkan kemampuan tempur berbasis teknologi mutakhir, termasuk penguasaan drone tempur, siber, dan kecerdasan buatan.

Tantangan lain adalah kesiapsiagaan menghadapi ancaman asimetris, seperti terorisme, infiltrasi intelijen asing, penye-



negeri maupun dinamika global.

"Dengan pelantikan jajaran pimpinan TNI yang baru, saya berharap TNI semakin solid, profesional, dan siap menghadapi berbagai tantangan," katanya.

Di tengah situasi dunia yang diliputi konflik, TNI harus menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan nasional. Namun, TNI harus tetap mengedepankan semangat perdamaian. DPR akan terus mendukung TNI dalam penguatan sektor pertahanan.

Kekuatan TNI tidak hanya terletak pada teknologi atau kekuatan persenjataan. Dedikasi dan integritas para prajurit yang menjaga keutuhan NKRI juga menjadi kekuatan bagi TNI dalam menjaga keamanan nasional.

"Kekuatan militer bukan hanya ditentukan oleh alutsista, melainkan juga

lundupan senjata, dan kejahatan lintas negara memerlukan respons cepat dan presisi tinggi.

Selain itu, juga pengamanan wilayah strategis untuk memastikan kedaulatan di wilayah perbatasan, laut lepas, dan ruang udara dari potensi ancaman eksternal maupun konflik terbuka.

"Tantangan terakhir, penguatan operasi gabungan antar matra untuk membangun interoperabilitas darat-laut-udara agar operasi gabungan berjalan efektif dan responsif," kata Sukamta.

Melihat tantangan yang begitu kompleks, Sukamta menegaskan, pihaknya akan mendorong DPR untuk memberikan dukungan politik dan anggaran. Menurutnya, kebijakan DPR akan terus diarahkan untuk memperkuat TNI, termasuk pasukan elite. ●

BENDERA ONE PIECE DAN BURUKNYA KOMUNIKASI PEMERINTAH

Menjelang peringatan Kemerdekaan RI ke-80, pemerintah kembali menggaungkan semangat persatuan. Pesan itu tergambar jelas dalam logo HUT RI.

Angka "80" berbentuk simbol infinity berupa dua lingkaran saling terhubung tanpa ujung dipilih Presiden Prabowo Subianto untuk melambangkan persatuan yang abadi.

Namun, riak berbeda datang dari selembar kain hitam bergambar tengkorak Jolly Roger bertopi jerami. Bendera kru "Bajak Laut Topi Jerami" pimpinan Monkey D Luffy dari serial anime "One Piece" itu berkibar di rumah, kendaraan, hingga

tiran. Penggemar One Piece yang dikenal sebagai "Nakama" juga menganggap One Piece sebagai simbol untuk menolak ketimpangan sosial, melawan sistem yang korup, serta menyuarakan kebebasan berpikir dan bertindak.

Nada tegas pertama datang dari Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, Jumat, 1 Agustus 2025. Dalam keterangan tertulis, ia mengingatkan ada konsekuensi pidana bagi tindakan yang mencederai kehormatan bendera Merah Putih. Pemerintah, katanya, akan bertindak tegas dan terukur jika ada unsur kesengajaan dan provokasi, demi menjaga ketertiban dan kewibawaan simbol negara.

Budi bahkan mengutip Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebang-

bentuk makar.

Menurut Pigai, pelarangan itu sejalan dengan aturan internasional dan kovenan PBB tentang Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi Indonesia.

Namun, sehari berselang, suara berbeda muncul dari lingkaran dalam Istana. Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menyampaikan bahwa pemerintah tidak mempermasalahkan pengibaran bendera One Piece.

Pernyataan itu ia tegaskan dua kali, Senin, 4 Agustus 2025, usai bertemu asosiasi pengemudi logistik nusantara di DPR, dan Selasa, 5 Agustus 2025, saat mendampingi Presiden Prabowo di Istana.

Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo tidak keberatan selama bendera tersebut tidak dibenturkan atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih. Pemerintah bahkan menegaskan tidak ada perintah untuk merazia bendera maupun lambang One Piece.

"Kalau sebagai bentuk ekspresi, enggak ada masalah. Tapi jangan dibawa, dibentur-benturkan, disandingkan, atau dipertentangkan dengan bendera Merah Putih. Enggak sehat, tidak seharusnya seperti ini, kita sebagai anak bangsa, bendera Merah Putih itu satu-satunya," ujarnya.

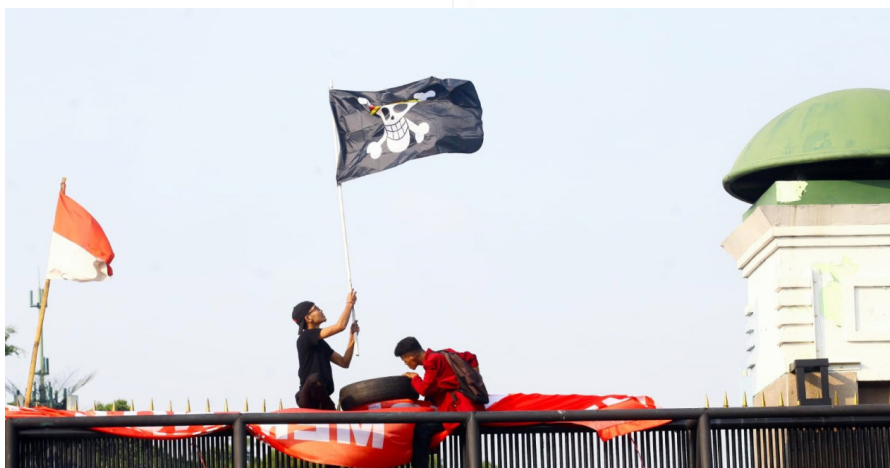
Nada senada juga disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer.

Bima menyebut pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari ekspresi publik dalam negara demokrasi. Immanuel bahkan terlihat mengenakan kaos One Piece. Menurutnya, sikap menstigma pengibar bendera One Piece hanya akan memperlebar jarak antara rakyat dan negara.

"Mereka hormat pada Merah Putih, tapi kecewa pada cara pengurus negara menjalankan amanah," katanya.

Trending di Media Sosial

Unggah bendera One Piece sempat



linimasa media sosial. Fenomena ini mendadak menjadi perbincangan nasional, memancing respons pemerintah.

Alih-alih satu suara, pemerintah justru menampilkan nada berbeda. Sejumlah menteri dan wakil menteri memberikan tafsir yang berseberangan. Ada yang menganggapnya pelanggaran hukum, tetapi ada pula yang melihatnya sekadar ekspresi di negara demokrasi.

Padahal, merujuk pada pesan moral dari serial anime "One Piece", tokoh utama Monkey D Luffy dikenal memiliki semangat kebebasan, antipenindasan, dan keberanian melawan otoritas yang

saan: "Setiap orang dilarang mengibarkan Bendera Negara di bawah bendera atau lambang apa pun."

Namun, bila dicek, Pasal 24 tidak memiliki ayat, melainkan poin a hingga e berisi larangan penggunaan bendera negara. Artinya, kutipan yang digunakan Budi tidak sesuai dengan rumusan pasal di UU tersebut.

Nada serupa disuarakan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, Minggu, 3 Agustus 2025. Ia menilai negara berhak melarang pengibaran bendera One Piece karena dianggap melanggar hukum, bahkan bisa dikategorikan sebagai

menjadi trending di media sosial, seperti Instagram, X, Tiktok, hingga Facebook. Tak jarang, ada yang mengganti foto profil di media sosial mereka menjadi lambang One Piece.

Pada Senin siang, 4 Agustus 2025, terdapat 74.900 cuitan tentang One Piece di media sosial X. Percakapan itu membuat topik "One Piece" menempati posisi trending nomor ke-11 di Indonesia.

Sebagian konten di media sosial itu berisi unggahan ulang video-video bendera One Piece yang dipasang di sejumlah daerah. Namun, sebagian lainnya mempertanyakan respons pemerintah dan anggota DPR yang melarang pengibaran bendera tersebut.

Hal ini terjadi karena sejumlah menteri dan anggota DPR melontarkan larangan dan ancaman pidana terhadap pengibar bendera One Piece. Sejumlah warga yang mengibarkan bendera pun didatangi aparat.

Analisis Drone Emprit, Nova Mujahid, mengatakan, hasil pemantauan di media sosial X menemukan ajakan untuk memasang bendera One Piece pertama kali muncul pada 26 Juli 2025. Ajakan itu disampaikan oleh satu akun X ketika mengomentari unggahan gambar logo HUT Ke-80 RI.

Pada mulanya, ada pengguna X yang berkomentar bahwa ia akan mengibarkan bendera Belanda sebagai tanda matinya pemerintahan Indonesia. Pengguna lainnya lantas menimpali akan mengibarkan bendera Jepang. Akhirnya, ada yang menuliskan agar mengibarkan bendera One Piece sebagai bentuk candaan atau lucu-lucuan.

"Ajakan untuk mengibarkan bendera One Piece sudah ada sebelum pemerintah mengimbau mengibarkan bendera Merah Putih selama bulan Agustus, tetapi konteksnya hanya lucu-lucuan saja," ujar Nova.

Drone Emprit mencatat, kata One Piece telah masuk dalam 50 besar trending topic di Indonesia sejak 31 Juli 2025. Perbincangan soal One Piece mencapai puncaknya pada 1 Agustus dan terus bertahan hingga kini.

Namun, sejak awal bulan ini, kata Nova, muncul pemaknaan baru terhadap bendera One Piece, dari yang awalnya sekadar lucu-lucuan menjadi simbol kritik sosial. Bendera One Piece dianggap

mewakili keresahan publik atas berbagai permasalahan, seperti pembekuan rekening yang tidak digunakan selama tiga bulan, penyitaan tanah yang mengganggu selama dua tahun, dan sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan.

"Kisah One Piece dianggap representatif untuk menggambarkan kondisi yang dialami sebagian masyarakat," tutur Nova.

Ia mencatat ada sekitar 15.000 unggahan tentang One Piece selama satu pekan terakhir di berbagai kanal media sosial. Percakapan paling banyak terjadi di X dengan lebih dari 10.700 unggahan dan jumlah engagement mencapai lebih dari 2 miliar. Disusul Tiktok dengan 239 konten masuk dalam for you page (FYP) dan menghasilkan 108 juta engagement.

Peningkatan jumlah konten pada umumnya berisi respons masyarakat terhadap sikap pemerintah yang melarang pengibaran bendera One Piece.

Sikap pemerintah itu lantas dibalas oleh publik dengan menyebarkan gambar Wakil Presiden Gibran Rakabuming

tah lebai dan tidak paham makna cerita One Piece," tutur Nova.

Masalah Komunikasi Publik

Perbedaan sikap ini memperlihatkan absennya narasi tunggal pemerintah. Ironisnya, sebagian aparat penegak hukum di daerah sudah bersikap reaktif dengan menurunkan bendera One Piece yang berkibar.

Di ruang publik, ketidaksinkronan itu sekaligus menimbulkan tanda tanya: apakah bendera One Piece adalah bentuk ekspresi yang sah, atau pelanggaran hukum yang harus ditindak?

Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, mengatakan, perbedaan pandangan dari sejumlah menteri dan wakil menteri menunjukkan masih adanya problem dari komunikasi publik pemerintah. Perbedaan pandangan, bahkan komentar yang berlebihan, justru membuat isu soal bendera One Piece kian mendapatkan gaung di masyarakat.

Apalagi, respons pejabat negara terka-



yang pernah menggunakan pin berlogo One Piece. Sebelum dilantik pada 20 Oktober 2024, Gibran mengenakan pin berlogo One Piece, antara lain saat Silaturahmi Desa Bersatu pada 19 November 2023, deklarasi Pemilu Damai pada 27 November 2023, dan saat debat cawapres pada 21 Januari 2024.

Menurut Nova, tidak ada unggahan yang mengajak masyarakat untuk markar atau bertindak kriminal. Masyarakat menganalogikan bendera One Piece layaknya bendera organisasi masyarakat atau klub sepak bola.

"Justru publik menganggap pemerin-

dang dimaknai oleh aparat di daerah sebagai bentuk instruksi. Padahal, sikap asli pemerintah sejatinya tidak menolak, bahkan memerintahkan penghentian razia bendera One Piece yang dikibarkan masyarakat.

"Fenomena ini biasa saja. Justru menjadi punya ruang publisitas karena dikomentari secara berlebihan oleh opinion maker dan opinion leader dari pemerintah sendiri. Sehingga kemudian isu ini mendapatkan resonansinya atau gaungnya," ujarnya, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Menurutnya, pemerintah semes-

BAYANGAN KOOPTASI DI KONGRES PERSATUAN PWI

Dualisme kepemimpinan di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) diharapkan berakhir melalui Kongres PWI Persatuan. Agenda Kongres sudah terjadwal berlangsung di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada akhir Agustus 2025. Ada kemungkinan kooptasi (penyerapan) oleh kekuasaan?

Kemungkinan kooptasi memang terbuka. Karena itu, peneliti Sejarah Merdeka Institute Arief Gunawan mengingatkan jurnalis-jurnalis di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) agar tetap menjaga integritas dan persatuan menjelang pelaksanaan Kongres Persatuan PWI 2025.

"Kita memiliki sejarah panjang PWI sejak lahir tahun 1946 atau setahun setelah kemerdekaan RI. Dalam perjalanannya, PWI pernah terjadi perpecahan seperti sekarang," ujar Arief

Gunawan kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 13 Agustus 2025.

Namun, ungkap Arief, perpecahan dan dualisme kepemimpinan di PWI saat itu terjadi karena dipicu oleh perbedaan sikap politik, yakni antara Rosihan Anwar dan BM Diah. "Bukan karena masalah uang," tegasnya.

Rosihan Anwar dan BM Diah, lanjut Arief, sama-sama pendiri Harian Merdeka tahun 1945, bersama Joe-soef Isak. Namun, di tahun 1946 mereka beda pandangan politik. Rosihan mendukung Kabinet Sjahrir, sementara BM Diah kritis dan keras.

Perseteteruan mereka masih terbawa meski sudah lewat 24 tahun, yakni pada Kongres PWI XIV di Palembang, 14 - 19 Oktober 1970. PWI terbelah menjadi dua kubu, kubu Rosihan dan kubu BM Diah. Perpecahan baru bisa diselesaikan tiga tahun kemudian, yakni pada Kongres PWI "Integrasi" XV di Tretes, Malang, Jawa Timur, 30 November - 1 Desember 1973.

"Tiga tahun terjadi dualisme kepemimpinan di PWI. Saat itu, pemerintah melalui Operasi Khusus (Opsus) jaman Ali Moertopo ikut mengobok-obok PWI," ujar Arief.

Untuk itu, Arief berharap, jangan

sampai dualisme kepemimpinan PWI saat ini membuka peluang bagi pemerintah untuk kembali "mengobok-obok" organisasi profesi wartawan tertua di Indonesia itu. "Kisruh PWI saat ini hendaknya terhindar dari take over pemerintah. Bahaya kalau yang jadi ketumnya malah buzzer ternak Moelyono, karena di-drop dari atas. Soalnya posisi komisararis sekarang sudah banyak diduduki para buzzer ternak Mulyono. Waspada mereka menjalar ke PWI," tuturnya.

Arief menambahkan, PWI dan persuratkabaran nasional lahir dari elan romantik, penuh bumbu cerita patriotik. Sebelum ada perjuangan bersenjata, tokoh pergerakan dulu menggunakan koran dan organisasi kewartawanan sebagai alat perjuangan.

Wartawannya cukup banyak yang masuk keluar bui kolonial, hidup melarat karena lebih mengidentikkan diri sebagai pejuang ketimbang pedagang. Aspek bisnis tentu saja perlu, tetapi kewartawanan bukan jalan yang pas untuk mencari dan menumpuk kekayaan. Menurut dia, kewartawanan adalah vocatio (panggilan), pengabdian yang tiada henti-hentinya karena dituntun oleh naluri.

Di paruh pertama tahun 1950-an pers nasional dan organisasi kewartawanan seperti PWI dicirikan oleh personal journalism dengan tokoh-tokoh seperti Mochtar Lubis (Indonesia Raya), BM Diah (Merdeka), Suardi Tasrif (Abadi), dan Rosihan Anwar (Pedoman). Mereka berteman tapi juga berantem, dan sanggup bersilat lidah dengan penguasa. Umumnya pengendali meja redaksi saat itu ialah person of character (insan yang berwatak).

Sejauh ini, Kongres Persatuan PWI dijadwalkan berlangsung pada 29-30 Agustus 2025. "Hari ini secara resmi kami putuskan Kongres Persatuan PWI 2025 diselenggarakan di BPPTIK Komdigi, Cikarang, Bekasi. Sebenarnya ada beberapa alternatif tempat kongres,



dan semua sudah kami tinjau juga. Termasuk BPPTIK di Cikarang, Bekasi, salah satu tempat diklat milik Komdigi itu," ucap Ketua Panitia Pelaksana (Organizing Committee/OC) Kongres PWI 2025, Marthen Selamat Susanto sesuai rapat OC di Hall Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Juli 2025.

Panitia kongres, sambungnya, telah melakukan audiensi dan komunikasi intensif dengan berbagai institusi negara untuk memperkuat dukungan terhadap agenda persatuan ini. Antara lain pertemuan bersama Wakil Menteri Kementerian Komunikasi dan Digital Nezar Patria, yang sekaligus memberikan fasilitas tempatnya untuk Kongres Persatuan, Audiensi dengan Kapuspen TNI Mayjen TNI Kristomei Sianturi, Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas, dan Kadiv Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho.

Wakil Ketua OC, Raja Par lindungan Pane. Raja Pane optimistis Kongres PWI 2025 akan terselenggara sesuai harapan. Menurut dia, Kongres Persatuan PWI 2025 merupakan forum penting, menandai rekonsiliasi dan penyatuan kembali seluruh elemen di tubuh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi wartawan tertua dan terbesar di tanah air. Melalui momentum ini, PWI diharapkan kembali solid dan mampu menjalankan peran strategisnya sebagai organisasi profesi sekaligus mitra demokrasi.

Sedangkan para calon ketua umum yang akan dipilih dalam Kongres sudah beredar di media. Setidaknya, tujuh nama disebut akan mencalonkan diri di Kongres Cikarang itu. Mereka adalah Hendry Ch Bangun (Ketum PWI hasil Kongres Bandung), Zulmansyah Sekedang (Ketum PWI hasil KLB Jakarta), Atal S. Depari (Ketum PWI Pusat 2018-2023), Teguh Santosa (Ketua Bidang Luar Negeri PWI periode 2013-2018 dan anggota Dewan Kehormatan PWI periode 2018-2020), Akhmad Munir (anggota Dewan Kehormatan PWI kubu Zulmansyah), Johnny Hardjojo (Ketua Dewan Penasihat PWI Jaya), dan Rusdy Nurdiansyah (Ketua PWI Kota Depok).

Terkait dengan itu, figur media nasional terkemuka Dahlan Iskan mengemukakan Ketua Umum PWI

hasil Kongres Persatuan pada 29-30 Agustus 2025 di Cikarang, Jawa Barat hendaknya merupakan tokoh netral. "Tentu saya ingin tokoh netral," ujar tokoh pers Dahlan Iskan kepada wartawan, Jumat, 8 Agustus 2025.

Kongres Persatuan PWI 2025 merupakan hasil kesepakatan dari Ketua

ikut maju dalam pemilihan. "Tokoh-tokoh utama dari kedua kubu itu bisa didudukkan sebagai penasihat," ujar Dahlan Iskan.

Dahlan Iskan juga berharap, pemilihan Ketum PWI dilakukan secara transparan dan bersih dari praktik-praktik money politics. "Saya merin-



Umum PWI Kongres XXV-2023 Bandung, Hendry CH Bangun dan Ketum Umum KLB PWI 2024, Zulmansyah Sekedang.

Kongres ini akan memilih Ketua Umum PWI periode 2025-2030 setelah konflik internal yang melahirkan dualisme kepemimpinan di tubuh organisasi wartawan tertua di Indonesia itu.

Agar tidak memunculkan potensi konflik lagi, Dahlan Iskan menyarankan agar dua Ketum PWI tersebut tidak

dukungan pemilihan yang tidak diwarnai pengaruh uang atau fasilitas tertentu. Sayang kalau money politic menjang sampai ke organisasi wartawan," ujarnya.

Nah, jika sudah menyangkut money politics, kooptasi semakin terbuka. Bukan saja dari penguasa, melainkan juga dari pengusaha. Di masa revolusi teknologi informasi Abad XXI, bisnis dan media bersifat komplementer. Bisa juga menjadi dua sisi dari koin yang sama. ●

NEGARA NGELUH BAYAR GAJI GURU DAN DOSEN

“Menjadi dosen atau guru tidak dihargai karena gajinya enggak besar. Apakah semua harus dari keuangan negara ataukah ada partisipasi masyarakat?”

Kalimat tersebut merupakan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam acara Sains dan Teknologi sebagai Fondasi Kedaulatan Fiskal dan Transformasi Nasional di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), 8 Agustus 2025, yang viral di media sosial.

Pernyataan ini mengaduk kegelisahan lama: gaji rendah pendidik, tanggung jawab besar, dan peran negara yang kian merosot terhadap urgensi sektor pendidikan, terutama pendidikan tinggi.

Dalam pernyataannya, Sri Mulyani mengakui kemampuan menggaji guru dan dosen dengan layak masih menjadi tantangan. Ia menilai negara punya keterbatasan anggaran, sehingga hanya sanggup memberikan gaji kecil kepada guru dan dosen.

Masalah gaji kecil inilah, kata Sri Mulyani, yang jadi salah satu faktor yang membuat banyak orang enggan memilih guru dan dosen sebagai profesi.

“Banyak di media sosial, saya selalu mengatakan menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai, karena gajinya enggak besar. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara,” kata Sri Mulyani.

Namun, ia lantas mempertanyakan apakah gaji guru dan dosen harus bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), atau sebaliknya apakah publik juga bisa berpartisipasi dan masuk dalam sistem penggajian ini.

Sayangnya, Bendahara Negara itu tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana skema jika sistem penggajian guru dan dosen dilakukan dengan partisipasi publik.

Perlu diketahui, sesuai amanat konstitusi, pada 2025 pemerintah mengalokasikan 20 persen dari belanja negara untuk anggaran pendidikan, yakni mencapai Rp724,3 triliun. Anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai hal, mulai dari memberikan bantuan langsung kepada siswa dan mahasiswa, gaji dan tunjangan kinerja guru dan dosen, hingga pembangunan sarana dan prasarana pendidikan serta penelitian.

Selain gaji, Sri Mulyani juga menyoroti tunjangan kinerja dosen yang sempat ramai beberapa waktu lalu hingga terjadinya aksi demonstrasi. Menurutnya, pemberian tunjangan tidak bisa diberikan secara cuma-cuma, melainkan harus didasarkan pada kinerja dosen yang bersangkutan.

manfaat langsung untuk murid, mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Klaster kedua difokuskan untuk membiayai gaji dan tunjangan guru serta dosen. Anggaran pada klaster kedua mencakup belanja gaji dan tunjangan kinerja. Sedangkan, klaster ketiga dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan.

Dalam pidatonya, Sri Mulyani menyebutkan, tunjangan profesi guru non-PNS telah disalurkan kepada 477.700 guru, sementara program sertifikasi menysasar 666.900 guru.

Selain itu, dana pendidikan juga menopang sejumlah program strategis lainnya, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, Program Indonesia Pintar



“Dosen juga harus diukur kinerjanya dan inilah yang mungkin jadi salah satu ujian bagi Indonesia. Are we rewarding the achievement (Apakah kita menghargai pencapaian) atau are we going to distributing the money for the seek of just equality (apakah kita mendistribusikan uang untuk mencari kesetaraan yang adil)?” lanjutnya.

Sebagai informasi, pemerintah mengalokasikan dana pendidikan dalam tiga klaster utama. Klaster pertama menysasar

(PIP), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN), beasiswa LPDP, dan digitalisasi pembelajaran.

Ironi Pengajar Indonesia

Masalah gaji guru dan dosen di Indonesia ternyata bukan isapan jempol belaka. Data yang dikumpulkan Tim Jurnalisme Data Harian Kompas melalui survei kualitatif pada 4-23 April 2025 menunjukkan potret yang memprihatinkan.

Gaji pokok dosen PTN di Indonesia rata-rata hanya setara 1,3 kali Upah Minimum Provinsi (UMP). Jika dikonversikan ke beras, nilainya hanya sekitar 143 kilogram.

Perbandingan ini jauh tertinggal dari sejumlah negara tetangga, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, hingga Kamboja. Di Kamboja, gaji dosen perguruan tinggi publik mencapai 6,6 kali upah minimum. Angka ini juga jauh di bawah Thailand (4,1 kali), Vietnam (3,42 kali), Malaysia (3,41 kali), dan Singapura (1,48 kali).

Temuan lain yang tak kalah mengejutkan adalah beban kerja dosen PTN di Indonesia yang sangat tinggi. Sepanjang 2024, rata-rata jam kerja mereka mencapai 69,64 jam per minggu.

Data ini diperoleh dari survei dengan responden yang tersebar di 23 provinsi, yang menggambarkan realitas bahwa dedikasi tinggi para dosen tidak diiringi dengan imbalan finansial yang sepadan.

Selain itu, berdasarkan survei Harian Kompas pada Mei lalu terhadap 36 dosen di 23 provinsi ditemukan fakta 52,8 persen dosen PTN pernah menomboki biaya penelitian dari kantong pribadi, dengan rata-rata pengeluaran mencapai Rp44,18 juta per penelitian. Dana pribadi ini bisa berkisar dari 5-100 persen dari total kebutuhan.

Lalu, 30,6 persen biaya penelitian dialokasikan untuk publikasi ilmiah (jurnal internasional, open access). Sisanya digunakan untuk perjalanan (observasi), alat penelitian, dan tenaga pendukung, di mana semuanya memicu beban finansial tambahan.

Data lainnya, berdasarkan riset UGM, UI, dan Unram (2023), ditemukan 42 persen dosen hanya berpenghasilan di bawah Rp3 juta per bulan. Lebih memprihatinkan, dosen swasta rata-rata hanya mendapatkan Rp45.000 per jam, atau kurang dari Rp900.000 per bulan.

Sementara, survei lain dari Kompas menyebutkan, gaji bersih dosen muda, lulusan S2, hanya sekitar Rp3 juta per bulan. Itu setara dengan hanya 143 kg beras per bulan.

Ketua Komisi X DPR, Hetifah Sjaifudian, menyatakan, pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait pendapatan guru dan dosen di Indonesia yang kecil dinilai sebagai pancingan bagi se-

mua pihak, bahwa pembiayaan pendidikan memerlukan komitmen besar dari semua masyarakat, terutama komitmen dari negara.

"Perhatian negara terhadap gaji guru dan dosen sebenarnya cukup besar, terlihat dari berbagai skema tunjangan, seperti tunjangan profesi, tunjangan

atif dan berkelanjutan, termasuk membuka ruang partisipasi masyarakat dan sektor swasta, tentu dengan regulasi yang memastikan mutu, pemerataan, dan perlindungan bagi tenaga pendidik," ujar Hetifah.

Komisi X DPR sendiri berkomitmen mendorong agar alokasi anggaran



khusus untuk wilayah 3T, dan tunjangan kehormatan dosen," kata Hetifah, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, meskipun anggaran tersebut besar secara total, distribusi dan efektivitas penggunaannya masih menjadi tantangan. Sehingga kesejahteraan guru dan dosen belum merata dan belum sepenuhnya sebanding dengan beban tugas serta tanggung jawab mereka.

"Selain itu, kita juga harus mengembangkan model pembiayaan yang kre-

pendidikan 20 persen dari APBN benar-benar digunakan secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan dosen tanpa mengurangi prioritas lainnya. Seperti prioritas pada peningkatan kualitas pembelajaran dan infrastruktur pendidikan.

"Kami juga akan mengawal agar reformasi sistem remunerasi tenaga pendidik berjalan seiring dengan peningkatan kompetensi, sehingga gaji yang layak sejalan dengan peningkatan profesionalisme," ujar dia. ●

BERSIH-BERSIH GENG SOLO MENDAGRI TITO DIGANTI MUZANI

Rumor mengenai pergantian Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kembali menyeruak di platform media sosial. Tito disebut-sebut bakal digantikan politikus senior Partai Gerindra yang juga Ketua MPR, Ahmad Muzani.

Namun, kabar itu langsung dibantah Menteri Sekretaris Negara yang juga juru bicara Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo Hadi. Ia menyebut isu menggeser Muzani menggantikan Tito tak masuk akal.

"Secara logika umum kan, ya, agak kurang ketemu juga kan. Dia (Muzani) sekarang kan Ketua MPR. Masa kemudian menjadi menteri?" kata Prasetyo kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 4 Agustus 2025.

Rumor mengenai reshuffle Tito muncul seiring pengumuman susunan pengurus baru DPP Partai Gerindra periode 2025-2030 pada 4 Agustus 2025 di Jakarta. Di struktur partai, Ahmad Muzani mendapat jabatan baru sebagai Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra. Tak

lagi sesibuk saat jadi Sekjen Gerindra, Muzani disebut tengah disiapkan mengisi kursi Mendagri.

Analisis politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Bakir Ihsan, berpendapat reshuffle Tito sangat mungkin terjadi. Pasalnya, Kemendagri adalah bagian dari posisi triumvirat, selain Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan, yang lazim diduduki orang dekat presiden.

Di sisi lain, Tito bukan orang dekat Prabowo dan bukan bagian dari Partai Gerindra. Tito lebih merepresentasikan kekuatan politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Sedangkan, Muzani adalah orang dekat Prabowo yang memiliki rekam jejak politik di internal Partai Gerindra.

"Mendagri merupakan kementerian yang sangat strategis karena mengurus semua urusan dalam negeri. Karena itu, menteri yang mendudukinya juga harus orang yang strategis bagi kelancaran kerja presiden," kata Bakir.

Menurut Bakir, kemunculan rumor reshuffle Tito sejalan dengan dinamika politik yang terjadi belakangan. Dalam sejumlah isu, Prabowo terlihat berseberangan dengan kepentingan politis Jokowi, termasuk saat memberikan abolisi untuk Tom Lembong.

"Tito bukan orang partai. Ia tidak me-

iliki backing kuat secara organisasi, kecuali 'orangnya' Jokowi. Peluang pergantian sangat besar terjadi pada orang yang bukan orangnya presiden, terlebih yang tidak memiliki dukungan partai," kata Bakir.

Tito juga telah lama bercokol di lingkaran kekuasaan. Pada era Jokowi, Tito pernah menjabat sebagai Kapolri sebelum akhirnya digeser ke posisi Mendagri usai Pilpres 2019. Tito disebut-sebut sebagai bagian dari Geng Solo.

Direktur Eksekutif Center for Indonesian Governance and Development Policy, Cusdiawan, menduga ada beberapa hal yang menjadi alasan munculnya isu tersebut.

Pertama, dilatarbelakangi oleh orang-orang di sekitar Istana sebagai kelanjutan dari rangkaian peristiwa yang menunjukkan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi.

"Meski di satu sisi terkadang keduanya masih berupaya menunjukkan kedekatan dan menangkis tuduhan keretakan, tapi pada sisi lain naturalnya seorang pemimpin politik jelas tidak menyukai ketika publik menilai kepemimpinan mereka masih ada bayang-bayang sosok lain. Dan sinyal ini saya kira dibaca oleh orang-orang sekeliling Istana itu sendiri," kata Cusdiawan, Kamis, 7 Agustus 2025.

Kemungkinan keduanya, isu tersebut muncul dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan Presiden Prabowo atas kinerja Mendagri Tito Karnavian.

"Terlebih lagi sebelumnya Pak Tito mendapat sorotan publik yang cukup tajam menyoal polemik Aceh-Sumut. Jadi kemungkinan Pak Prabowo semacam melakukan cek ombak dengan melampar isu tersebut karena ingin tahu bagaimana respons publik itu sendiri pada satu sisi, dan respons lingkaran Pak Jokowi pada sisi lain, mengingat selama ini Pak Tito dianggap sebagai elite yang berada dalam lingkaran Pak Jokowi," ujarnya.

Direktur Politic and Public Policy Studie (P3S), Jerry Massie, menyebutkan langkah lebih baik jika isu tersebut



benar adanya. Ia bahkan menilai Tito sebagai Geng Solo yang lebih tunduk dan mendengar arahan Jokowi dibandingkan Prabowo.

"Belum lama kan dia blunder, menunjukkan ketidakkompetenan di bidang yang dipimpinnya. Misal, soal 4 pulau yang diserahkan ke Sumut. Padahal secara geografis masuk wilayah Aceh," kata Jerry, Selasa, 5 Agustus 2025.

Jerry menilai, Tito selama masa kepemimpinannya lebih banyak membuat kegaduhan dibandingkan mengeluarkan kebijakan yang baik.

"Mendagri ini mirip Menkes Budi Sadikin, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Pokoknya mereka ini gonta-ganti bikin gaduh dalam kabinet dengan sejumlah ocehan sampah," ujarnya.

Dia menyebut sosok Ahmad Muzani yang dirumorkan akan menggantikan Tito adalah sosok berpengalaman, karena sebelumnya pernah menjabat sebagai Sekjen Partai Gerindra selama dua dekade.

Selain Muzani, dia menyebut Riza Patria juga layak dinominasikan sebagai Mendagri pengganti Tito. Riza memiliki track record yang mumpuni.

"Memang sudah saatnya bersih-bersih menteri titipan Jokowi. Mereka sejauh ini, saya nilai, bermain 2 kaki bahkan 4 kaki," tegasnya.

Pengamat Pemerintahan, Muhammad Akbar Maulana, menyebut isu itu sebagai momen untuk menguji daya tahan demokrasi Indonesia terhadap praktik kekuasaan yang saat ini semakin akrab dengan istilah bagi-bagi jabatan. Isu ini bisa bermakna dua. Hanya sekadar isu liar atau justru sinyal kuat dari konfigurasi politik baru pasca kemenangan pasangan Prabowo-Gibran.

"Publik tentu berhak tahu, dan lebih dari itu, berhak mengkritisi," kata Akbar, Kamis, 7 Agustus 2025.

Ia mengemukakan, di permukaan, ini tampak sebagai manuver internal partai. Tapi di baliknya, aroma penataan ulang kekuasaan tak bisa disangkal.

"Pertanyaannya, apakah pencopotan ini hanya soal etika struktural atau justru bagian dari skenario politik yang lebih besar? Rumor bahwa Muzani disiapkan menjadi Menteri Dalam Negeri tentu membuat publik berspekulasi lebih jauh.

Apalagi jika melihat posisi Tito Karnavian yang dinilai lebih condong pada Geng Solo, dan kerap dianggap lebih loyal pada Jokowi ketimbang pada Prabowo sebagai Presiden terpilih," ungkapnya.

Akademisi Universitas Pamulang ini menyatakan pergantian pejabat tinggi seperti Mendagri bukanlah masalah selama dilakukan secara transparan, berbasis kinerja, dan mengedepankan kepentingan negara, bukan partai.

"Tapi inilah ironi politik kita, rotasi elite kerap terjadi bukan karena capaian atau kegagalan kebijakan, melainkan karena kebutuhan akomodasi politik semacam kompensasi simbolik yang dibungkus rapi

dengar.

"Maka, jika alasan pergantian adalah minimnya kinerja, publik mungkin bisa memaklumi. Tapi jika alasan sebenarnya adalah konsolidasi kekuasaan, maka ini menjadi bentuk pengerdilan demokrasi dalam balutan transisi kekuasaan," ujarnya.

Dia menyebut, Ahmad Muzani tentu punya rekam jejak panjang di Partai Gerindra dan dikenal sebagai politisi yang tenang, namun strategis. Namun, Akbar menilai, jika benar dia masuk kabinet, maka muncul kekhawatiran baru, apakah netralitasnya tetap terjaga atau justru akan mempertebal warna partai dalam



dengan narasi meritokrasi," imbuhnya.

Publik sangat memahami bahwa posisi Mendagri sangat strategis. Mendagri bukan sekadar pengatur administrasi daerah, melainkan penjaga gawang jalannya sistem desentralisasi, pemilu, dan otonomi daerah. Dari ruang itu pula, kekuatan politik pusat bisa mengatur irama di daerah.

"Maka wajar bila posisi ini menjadi rebutan. Tapi publik perlu bertanya, apakah pergantian ini akan memperkuat demokrasi lokal atau justru melanggengkan kendali pusat yang makin elitis?" kata Akbar.

Jika melihat kinerja Tito selama ini, kritik memang banyak. Tidak ada terobosan kebijakan yang benar-benar membekas. Bahkan, dalam isu-isu strategis seperti netralitas ASN dalam pemilu, pengawasan atas pelanggaran pemda, hingga reformasi birokrasi di tingkat lokal, suara Kemendagri nyaris tidak ter-

birokrasi.

Ia menyebutkan, dalam sistem presidensial, kabinet seharusnya menjadi eksekutor program negara, bukan perpanjangan tangan partai.

"Kita tidak anti terhadap politisi partai yang masuk kabinet. Demokrasi memang butuh keterwakilan politik. Tapi yang kita perlukan adalah figur yang mampu berdiri di atas semua kepentingan, bukan hanya loyal pada satu kekuasaan. Jika menteri hanya menjadi juru bicara ketua umum, maka yang hilang adalah pelayanan publik yang adil dan objektif. Maka, publik harus waspada," terang Akbar.

"Kita tidak bisa menyerahkan begitu saja ruang-ruang strategis negara kepada permainan elite tanpa pengawasan. Rakyat punya hak untuk tahu alasan di balik tiap rotasi, punya kewajiban untuk mengawasi, dan punya kekuatan untuk bersuara," pungkasnya. ●

BERSANDING

Gunawan Effendi

Ini persoalan lama, namun muncul kembali di media sosial dan menjadi bahasan pula di media arus utama: Mengapa Singapura lebih menjadi pilihan sebagai kantor pusat perusahaan multinasional maupun lokal meskipun sebagian besar operasinya berada di Indonesia. Jawaban atau alasannya juga sama dengan wacana belasan tahun sebelumnya, yakni efisiensi pajak dan kemudahan berbisnis.

Terkait itu, satu unggahan di media sosial facebook pada akhir Juli 2025 menyebutkan, *Singapura dikenal memiliki tarif pajak penghasilan badan (PPh badan) yang jauh lebih rendah, yakni sekitar 17 persen, bahkan bisa lebih rendah lagi dengan berbagai insentif. Sementara di Indonesia, tarif PPh badan bisa mencapai 22 persen. Selisih ini terlihat kecil di atas kertas, tapi berdampak besar ketika diterapkan dalam skala miliaran hingga triliunan rupiah.*

Perusahaan juga memanfaatkan skema transfer pricing, yaitu mengatur biaya antar entitas grup lintas negara. Contohnya, perusahaan di Indonesia membayar "jasa manajemen" atau "royalti" ke kantor pusat di Singapura. Alhasil, laba bersih di Indonesia terlihat lebih kecil, sehingga pajak yang dibayarkan pun berkurang. Karena ada perjanjian penghindaran pajak berganda (Double Taxation Agreement), strategi ini legal dan sah secara hukum internasional.

Reputasi Singapura sebagai negara dengan sistem hukum yang kuat, birokrasi yang efisien, dan iklim bisnis yang stabil juga menjadi alasan utama. Banyak investor global merasa lebih aman menyimpan keuntungan di sana. Selain itu, infrastruktur keuangan dan teknologi Singapura memungkinkan pengelolaan bisnis lintas negara dengan efisien.

Namun, strategi ini membawa dampak signifikan bagi Indonesia. Tenaga kerja, sumber daya alam, dan aktivitas bisnis memang terjadi di Tanah Air, tapi pajak justru dinikmati negara lain. Potensi penerimaan negara bisa berkurang drastis. Meski legal, praktik ini menunjukkan pentingnya reformasi kebijakan pajak internasional dan penguatan pengawasan fiskal dalam era ekonomi global.

Sebenarnya wacana semacam ini pernah muncul beberapa tahun silam, di awal masa pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla pada 2015 misalnya. Jadi, desakan penurunan tarif PPh (Pajak Penghasilan) Badan bagi korporasi multinasional

maupun lokal dan peningkatan insentif berupa kemudahan berbisnis memang soal lama. Namun, hingga Presiden Joko Widodo mengakhiri dua periode pemerintahannya, dengan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin pada 2019, penurunan tarif PPh Badan tak pernah terjadi.

Belakangan wacana penurunan PPh Badan pun muncul kembali dari Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi Hashim S. Djojohadikusumo yang juga Adinda dari Presiden RI Prabowo Subianto. Wacana ini muncul dalam acara Asian Insights Conference 2025 Bank DBS Indonesia di Jakarta pada akhir Mei 2025. Hashim mengatakan sudah ada pembicaraan di internal pemerintah soal rencana tersebut. Saat ini, wacana itu sedang dimatangkan. Menurut dia, ketimbang menaikkan tarif pajak, pemerintah justru berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan menjadi sama seperti tarif yang berlaku di Singapura guna mendorong kepatuhan para wajib pajak.

Nah, pada awal Juli 2025, dalam Rapat Kerja Menteri Keuangan, Menteri PPN, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner OJK bersama Komisi XI DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan rasio pajak (tax ratio) di kisaran 10,08 persen hingga 10,45 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2026.

Sri Mulyani mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terus dijaga secara berkelanjutan melalui berbagai reformasi pada sisi pendapatan, termasuk penerapan Core Tax, bea dan cukai, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Sementara itu, untuk 2025 rasio pajak diproyeksikan sebesar 10,03 persen PDB. Angka tersebut lebih rendah dari target di dalam APBN 2025 yang sebesar 10,24 persen, dan realisasi pada 2024 yang mencapai 10,08 persen.

Nah, apakah ini tanda-tanda tarif PPh Badan benar-benar akan turun? Belum ada kepastian.

Toh perbandingan tarif PPh badan dan kemudahan berbisnis dengan Singapura saja belumlah proporsional mengingat skala ekonomi Indonesia yang jauh lebih besar. Lebih pas jika Kawasan Ekonomi Khusus di Batam, Kepulauan Riau bersanding (kolaborasi) dan bersaing (kompetisi) dengan Singapura serta Johor, Malaysia sekaligus. Itu yang menjadi pilihan Indonesia sejauh ini. ●



EKONOMI MULAI MENGGERILAT

Pertumbuhan ekonomi tampak kian meningkat pada kuartal (triwulan) kedua (April-Juni) 2025. Kurang yakin? Silakan ajukan data pembandingan

Badan Pusat Statistik yang mengumumkannya. Beberapa ekonom meragukannya. Namun, pemerintah menjelaskannya. Ya, BPS mengumumkan beberapa indikator positif perekonomian.

Beberapa antaranya, ekonomi Indonesia triwulan II (April-Juni) 2025 dibandingkan dengan triwulan I (Januari-Maret) 2025 mengalami pertumbuhan 4,04 persen (q-to-q). "Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,53 persen. Dari sisi

luaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,67 persen.

Ekonomi Indonesia semester I-2025 terhadap semester I-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 4,99 persen (c-to-c). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,59 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 8,57 persen.

Laju pertumbuhan ekonomi pada periode April-Juni 2025 itu meningkat dari kuartal sebelumnya. Tercatat laju

busi 2,64 persen terhadap pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025. Selain itu, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) atau investasi berkontribusi 2,06 persen terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian, konsumsi pemerintah berkontribusi -0,22 persen, net ekspor berkontribusi 0,22 persen, dan sumber pertumbuhan ekonomi lainnya berkontribusi 0,22 persen.

Jika dilihat secara kuartal ke kuartal (quarter to quarter/qtq), laju pertumbuhan ekonomi pada kuartal II-2024 mencapai 4,04 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibanding kuartal pertama tahun 2025, yang berkontraksi 0,98



pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,05 persen," ungkap Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Moh. Edy Mahmud dalam keterangan resmi Selasa, 5 Agustus 2025.

Sedangkan pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2024, pertumbuhan mencapai 5,12 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Lainnya mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,31 persen. Sementara dari sisi penge-

pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025 hanya 4,87 persen secara yoy.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2025 juga lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2024 mencapai 5,05 persen secara tahunan. "Pertumbuhan secara tahunan ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kuartal II-2024," ujar Edy.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Edy mengemukakan, konsumsi rumah tangga berkontri-

persen. "Pertumbuhan ekonomi secara quarter to quarter sejalan dengan pola musiman yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, yaitu pertumbuhan kuartal II lebih tinggi dibandingkan kuartal I," ucap Edy.

BPS mencatat pula, pada triwulan II-2025, provinsi-provinsi di Pulau Jawa masih menjadi motor utama perekonomian Indonesia secara spasial, dengan kontribusi sebesar 56,94 persen terhadap PDB nasional dan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,24 persen (y-on-y). Selain itu, BPS mengemukakan, perekonomian Indonesia berdasarkan

besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2025 mencapai Rp5.947,0 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp3.396,3 triliun.

PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu. PDB harga konstan digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu negara dari waktu ke waktu tanpa dipengaruhi oleh fluktuasi harga (inflasi atau deflasi). Dengan kata lain, PDB harga konstan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang pertumbuhan ekonomi riil, bukan hanya pertumbuhan yang disebabkan oleh perubahan harga.

Toh pertumbuhan triwulan II 2025 yang mencapai 5,24 persen dibandingkan dengan angka pada periode yang sama tahun sebelumnya menjadi banyak ulasan terutama dari kalangan ekonom. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, misalnya, menyoroti sejumlah kejanggalan (anomali) dalam data.

“Pengumuman pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 penuh kejanggalan dan tanda tanya publik. Saya tidak percaya dengan data yang disampaikan (BPS) mewakili kondisi ekonomi yang sebenarnya,” kata Nailul, Selasa, 5 Agustus 2025.

Menurut dia, sekurangnya ada tiga kejanggalan dalam data yang disampaikan oleh BPS mengenai pertumbuhan ekonomi RI pada kuartal II (April-Juni) 2025 itu. Pertama, pertumbuhan ekonomi kuartal dua lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya, saat terdapat momen Ramadan dan Lebaran. Secara historis, pertumbuhan kuartal tertinggi lazimnya terjadi pada masa momen Lebaran.

“Kuartal I-2025 saja hanya tumbuh 4,87 persen, jadi cukup janggal ketika pertumbuhan kuartal II mencapai 5,12 persen,” ujar Nailul dalam keterangan tertulis pada Selasa, 5 Agustus 2025,

Kejanggalan kedua, data pertumbu-

han industri pengolahan. Berdasarkan data BPS, lapangan usaha industri pengolahan tumbuh 5,68 persen secara tahunan dan memiliki andil 1,13 persen dalam pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Sedangkan, data PMI (Purchasing Manager Index) manufaktur Indonesia terkontraksi di bawah 50 poin selama periode April-Juni 2025. “Artinya, perusahaan tidak melakukan ekspansi

tumbuh 4,96 persen. Menurut data BPS, konsumsi rumah tangga menyumbang 54,25 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Konsumsi rumah tangga juga memiliki andil 2,64 persen dari keseluruhan pertumbuhan ekonomi. Padahal, kata Nailul, tidak ada momen yang membuat konsumsi rumah tangga meningkat tajam.

“Ketidaksinkronan antara data per-



secara signifikan,” ungkap Nailul.

Tambahan pula, lanjut Nailul, kondisi industri manufaktur juga tengah memburuk. Hal ini ditandai salah satunya oleh jumlah tenaga kerja yang kena PHK yang meningkat 32 persen secara tahunan selama periode Januari-Juni.

Kejanggalan ketiga, tampak dari konsumsi rumah tangga yang hanya

tumbuhan ekonomi dengan leading indikator, membuat saya pribadi tidak percaya terhadap data yang dirilis oleh BPS,” ujar Nailul. Oleh sebab itu, ia meminta BPS menjelaskan secara detail metodologi yang digunakan, termasuk indeks untuk menarik angka nilai tambah bruto sektoral serta pengeluaran.

• INFO KHUSUS

Senada dengan itu Direktur Eksekutif Bhima Yudhistira pernah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 berada di kisaran 4,5-4,7

persen yoy, bahkan lebih rendah dari realisasi kuartal I-2025 yang sebesar 4,87 persen. Menurut dia, lesunya daya beli masyarakat jadi penyebab

utama.

“Pertumbuhan kuartal II-2025 di kisaran 4,5-4,7 persen yoy, karena tidak ada lagi pendorong musiman setelah Lebaran. Daya beli sedang lesu,” ujar Bhima.

Lemahnya daya beli ini juga berdampak pada sektor manufaktur. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat berada di angka 49,2 pada Juli 2025. Meski membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang sempat anjlok ke 46,9, posisi ini masih di bawah ambang batas 50-yang berarti aktivitas manufaktur masih mengalami kontraksi.

Sedangkan Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal. Ia memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 akan berada di bawah 5 persen, tepatnya pada kisaran 4,7-4,8 persen yoy. Alasannya serupa: konsumsi rumah tangga yang melemah. “CORE memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 melambat ke kisaran 4,7-4,8 persen, turun dari 4,87 persen pada kuartal I,” ujarnya.

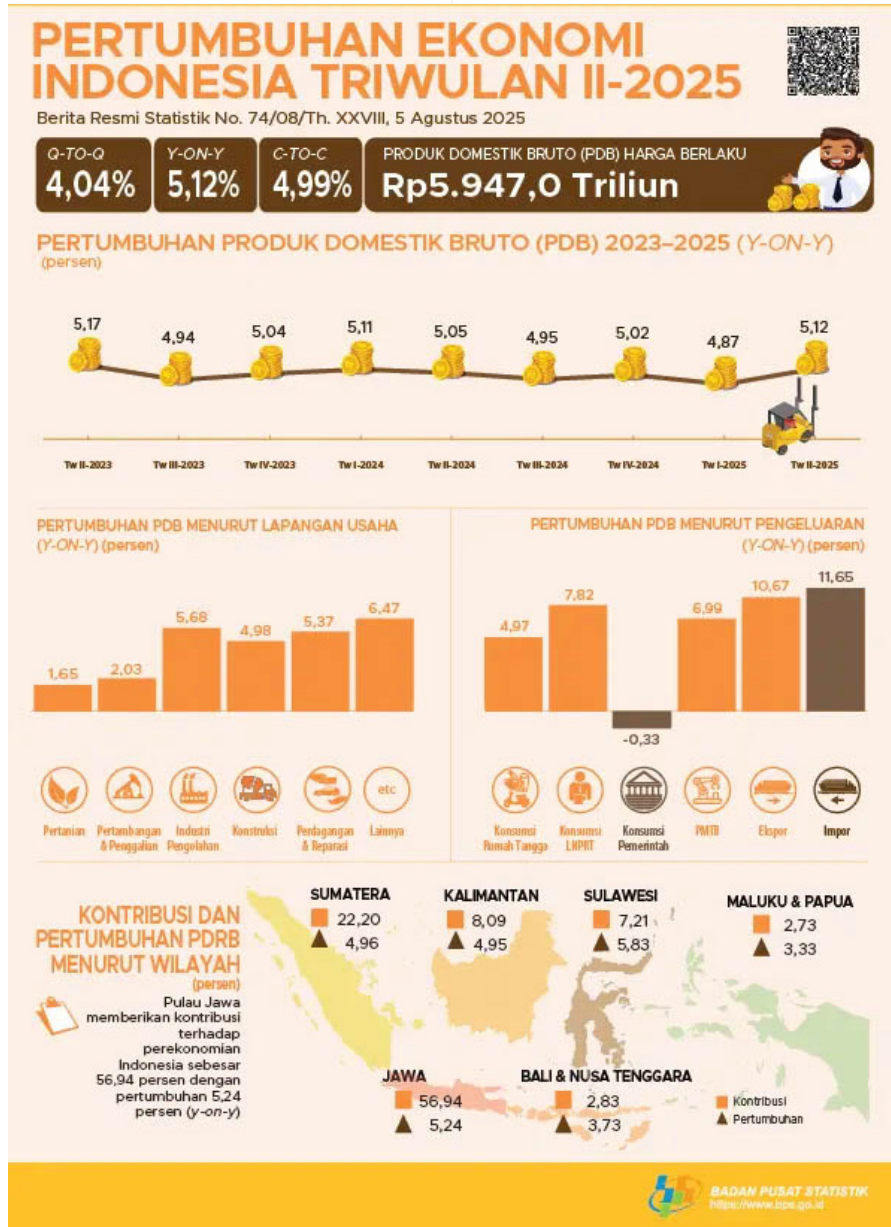
Faisal juga menilai stimulus pemerintah belum cukup kuat untuk mendorong pertumbuhan. Di sisi lain, kontribusi dari net ekspor pun makin mengecil, karena surplus neraca perdagangan terus menyusut selama kuartal II. “Kontribusinya terhadap pertumbuhan jadi lebih rendah. Kami juga prediksi belanja pemerintah masih minus. Di kuartal I minus, dan di kuartal II kami prediksi minus 1 persen, jadi kontraksi. Itu yang juga memperlambat laju ekonomi,” jelasnya.

Menanggapi berbagai ulasan itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengemukakan. pertumbuhan ekonomi dihitung oleh BPS berdasarkan gabungan beberapa komponen yang berkontribusi terhadap pergerakan ekonomi nasional, seperti belanja rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi. Menurut Prasetyo, tidak ada yang janggal dalam perhitungan BPS karena seluruh komponen yang seharusnya diperhitungkan memang sudah tercakup.

“Tentunya kalau hari ini BPS secara resmi sampaikan pertumbuhan



(BPS) akan mengumumkan: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (Produk Domestik Bruto) Triwulan II 2025.



ekonomi kita, ya pastilah di situ berisi seluruh komponen tadi, tidak hanya satu atau dua komponen,” ujar Prasetyo saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 5 Agustus 2025.

Ia menegaskan, secara teknis, perhitungan pertumbuhan ekonomi sepenuhnya menjadi domain BPS. Pemerintah, lanjutnya, hanya berperan menciptakan ekosistem yang memungkinkan seluruh komponen tersebut bisa tumbuh. Pemerintah sama sekali tidak melakukan intervensi terhadap proses perhitungannya.

“Kalau secara teknis perhitungan

tangga pada kuartal II-2025 tumbuh 4,97 persen, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 4,93 persen. Kemudian Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) tumbuh sebesar 6,99 persen.

Pertumbuhan juga terjadi untuk transaksi di marketplace sebesar 7,55 persen pada kuartal II-2025 dibandingkan kuartal I-2025. Airlangga pun menepis gejala yang di media sosial disebut rombongan hanya nanya (rohana) dan rombongan jarang beli (rojali) untuk pengunjung pusat perbelanjaan di kota-kota besar.

transaksi menggunakan uang elektronik (e-money) sebesar 67,91 persen yoy dan kartu kredit 7,61 persen yoy. Pada saat yang sama, kata Airlangga, transaksi menggunakan kartu debit justru berkontraksi 0,96 persen.

Jumlah transaksi di e-commerce juga meningkat pesat dari 280 juta transaksi pada 2018 menjadi 3,23 miliar transaksi pada 2024. Sejumlah produk yang pertumbuhan pembelannya paling besar ialah produk kosmetik dan perawatan pribadi sebesar hampir 16,95 persen yoy atau senilai Rp 67,6 triliun serta produk rumah tangga dan kantor tumbuh 29,38



tentunya ada di BPS. Kita sebagai pemerintah kan tugasnya tadi menciptakan ekosistem yang memungkinkan komponen tadi bertumbuh. Cara hitung seperti apa, kan domainnya hanya di BPS,” tegas Prasetyo.

Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan, tak ada manipulasi statistik dari angka pertumbuhan yang dikemukakan BPS itu. Mana ada?!” jawab Airlangga di kantornya, Selasa, 5 Agustus 2025 usai penjelasan resmi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Kan sudah diumumkan, dan tadi sudah dijelaskan,” kata Airlangga.

Ia menjelaskan konsumsi rumah

Menurut dia, munculnya fenomena rohana dan rojali ini bukan karena daya beli masyarakat yang belum pulih, melainkan terjadinya perubahan perilaku belanja masyarakat dari offline ke online. “Kita lihat konsumsi daripada masyarakat ini terlihat shifting belanjanya lari ke belanja online. Ini menunjukkan bahwa terkait dengan isu Rohana dan Rojali ini isu yang dituip-tuip. Jadi faktanya berbeda dan tentu ini yang harus kita lihat,” ujarnya.

Mengutip data BPS, Airlangga menyebutkan pertumbuhan transaksi online di e-retail dan marketplace tumbuh 7,55 persen di Kuartal II 2025. Tanda-tanda perubahan perilaku belanja ini juga dapat dilihat dari pertumbuhan

persen yoy atau senilai Rp 72,8 triliun. “Lalu kita lihat kinerja keuangan sektor retail dari tiga perusahaan, seluruhnya semester I ini pertumbuhannya 4,99 persen, 6,85 persen, dan 12,87 persen,” tambahnya.

Selain itu, perjalanan wisatawan nusantara meningkat akibat berbagai diskon yang diberikan pemerintah. “Perjalanan wisatawan Nusantara tumbuh 22,3 persen. Kemudian year on year jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta dari Februari (2024) ke Februari (2025) mendekati 3,6 juta,” imbuhnya.

Nah, mungkin juga perlu jalan-jalan untuk melihat kondisi riil perekonomian nasional. Dari kawasan pantai hingga pegunungan sekalian. ●



RUANG FISKAL MASIH LEBAR

Kuartal II (April-Juni) berlanjut dengan Kuartal III (Juli-September) dan masuk ke Semester II 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, pada Semester II (Juli-Desember) 2025, ruang fiskal (keleluasan anggaran) masih lebar. Selebar apa?

Gambarannya, realisasi belanja fiskal (anggaran) Semester I (Januari-Juni) 2025 ternyata belum mencapai 40 persen. Jadi, lebih dari 60 persen Anggaran Belanja 2025 yang dapat menggelontor pada Juli-Desember 2025. Untuk enam bulan terakhir pada 2025 ini, Bu Menkeu memastikan pemerintah akan menggelontorkan anggaran belanja senilai Rp 2.121 triliun.

"APBN pada tahun kedua semester kedua ini masih ada 2.121 triliun. Rencananya akan dibelanjakan dalam enam bulan," ujar Menkeu Ani dalam konferensi pers, Selasa, 5 Agustus 2025

Secara tidak langsung, Bu Menkeu mengakui belanja anggaran pada semester I memang agak seret, antara lain lantaran efisiensi. Data Kementerian Keuangan mencatat, sepanjang semester pertama 2025 pemerintah

baru membelanjakan Rp 1.407,1 triliun atau sekitar 38,8 persen dari APBN. Rinciannya, belanja pemerintah pusat Rp 1.006,5 triliun dan transfer ke daerah Rp 400,6 triliun.

Jadi, masih sekitar 61,2 persen belanja APBN yang dapat direalisasikan pada semester kedua 2025. Toh Bu Menkeu menegaskan realisasi belanja ini tetap mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Pemerintah, kata dia, akan memastikan kualitas pengeluaran negara terjaga agar belanja tersebut benar-benar memberikan dampak ekonomi yang konkret.

"Kita tetap melihat kualitas belanja, harus tetap baik, tetap beroperasi sehingga angka Rp 2.121 triliun benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ungkap Bu Menkeu.

la menegaskan pula akan mengoptimalkan peranan APBN untuk terus mendukung perekonomian melalui fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi

sebagaimana pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II 2025.

Pada periode April-Juni 2025 itu, dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh 4,97 persen didukung inflasi yang terjaga pada tingkat 2,18 persen. Selanjutnya belanja masyarakat meningkat terutama di sektor transportasi, restoran, dan akomodasi, seiring libur sekolah dan hari besar keagamaan yang disertai stimulus pemerintah seperti diskon tarif transportasi dan penurunan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

"Sehingga pada masa libur sekolah dan hari besar keagamaan belanja fiskal mampu menstimulus perekonomian melalui insentif maupun signaling dari pemerintah dan support dari APBN," kata Bu Menkeu.

Di sis lain, investasi (PMTB, pembentukan modal tetap bruto) mencatat kenaikan signifikan 6,99 persen, pertumbuhan tertinggi sejak triwulan II/2021. Investasi bangunan tumbuh 4,89 pers-

en, sementara investasi mesin melonjak 25,3 persen. Realisasi investasi langsung mencapai Rp477,7 triliun, didorong pertumbuhan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar 30,5 persen (yoy). Belanja modal pemerintah juga meningkat 30,37 persen, utamanya pada peralatan dan mesin.

“Kita harap ini menggambarkan adanya optimisme dan rencana untuk investasi ke depan, terutama ditopang dengan policy-policy pemerintah untuk mempermudah iklim usaha, deregulasi, dan memperbaiki berbagai iklim investasi di Indonesia,” ungkap Menkeu Ani.

Harap maklum PMTB adalah total angka riil investasi dalam bentuk belanja barang. PMTB juga dapat menjadi fakta konkret berhadapan dengan purchasing manager index (PMI) yang hanya berdasarkan survei.

Sementara itu, ekspor barang tumbuh 10,67 persen, sementara ekspor jasa naik 11,17 persen berkat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara. Di sisi lain, impor bahan baku dan barang modal yang tumbuh 12,17 persen diharapkan memperkuat produksi manufaktur di periode berikutnya.

Dari sisi produksi, sektor industri pengolahan tumbuh 5,68 persen, didukung hilirisasi dan peningkatan permintaan domestik. Industri logam dasar tumbuh 14,9 persen, industri makanan dan minuman naik 6,2 persen, industri kimia dan farmasi tumbuh 9,4 persen, serta sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan 13,82 persen. Sektor perdagangan naik 5,37 persen, konstruksi 4,98 persen, transportasi dan pergudangan 8,52 persen, serta informasi dan komunikasi 7,92 persen.

Bu Menkeu optimistis momentum pertumbuhan akan terjaga di semester II 2025, seiring percepatan belanja pemerintah, penyaluran berbagai stimulus, program makan bergizi gratis, pembangunan sekolah rakyat, penyediaan hunian layak, serta stabilisasi harga pangan.

“World Economic Outlook IMF untuk tahun 2025 direvisi ke atas dari 2,8 persen menjadi 3 persen. Dengan

perbaiki outlook dari perekonomian kita di kuartal III dan IV sambil terus menjaga momentum kuartal II yang sangat baik, ini diharapkan akan bisa memberikan optimisme dari perekonomian Indonesia di dalam menghadapi kondisi yang memang masih cukup menantang secara global,” kata Menkeu.

Peranan APBN akan terus diandalkan dalam melakukan fungsi counter-cyclical, terutama mengantisipasi pelemahan ekonomi yang muncul akibat situasi dunia yang bergejolak. APBN juga senantiasa berperan penting dalam menjaga stabilitas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

Nah, khusus untuk Kuartal III (Juli-September) 2025, masih kata Menkeu Ani, pemerintah menyiapkan stimulus senilai Rp10,8 triliun demi menjaga momentum pertumbuhan ekonomi

nasional. Stimulus pemacu kegiatan ekonomi ini kelak akan mengalir dalam berbagai program insentif.

“Masih ada Rp10,8 triliun stimulus aktivitas ekonomi yang akan terlaksana di triwulan III yang kita harapkan juga akan memberikan momentum pada bulan Juli yang baru saja kita lewati, dan nanti di bulan Agustus ini diharapkan momentumnya (pertumbuhan ekonomi) tetap terjaga,” kata Bu Menkeu.

Menkeu mengemukakan pula belanja pemerintah akan semakin terakselerasi di kuartal III 2025. Ia menyebut sebanyak 200 gedung sekolah rakyat akan mulai dibangun pada September. Kemudian, program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) juga terus berjalan dan ditargetkan mencapai 220 ribu unit rumah pada kuartal III, serta 350 ribu unit hingga akhir tahun.



• INFO KHUSUS

Pemerintah juga melanjutkan insentif PPN ditanggung pemerintah (PPN DTP) 100 persen untuk pembelian rumah hingga Rp2 miliar. Kemudian, dari sisi pembiayaan UMKM, pemerintah juga mendorong penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) yang ditargetkan mencapai Rp287,8 triliun sepanjang semester kedua 2025.

Selain itu, stimulus tambahan tengah disiapkan menjelang libur Natal dan tahun baru untuk mendorong konsumsi masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui bahwa strategi

program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto semisal makan bergizi gratis (MBG), pembangunan sekolah rakyat, koperasi desa merah putih, serta FLPP. "Kami juga memberikan dukungan untuk stabilisasi harga pangan, karena konsumsi penting sekali, telah diinjeksi dengan Rp16,6 triliun untuk stabilisasi beras saja dan Rp5 triliun untuk stabilisasi harga jagung serta deregulasi di sektor pertanian untuk pupuk yang menyebabkan musim tanam bisa terjaga dengan ketersediaan pupuk yang bersubsidi," ucapnya.

Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kuartal II 2025 mencatatkan pertumbuhan tertinggi sebesar 13,53 persen dibandingkan triwulan sebelumnya yang hanya mencatat 9,74 persen. Sedangkan nilai tambah sektor pertanian naik signifikan, dari Rp361,5 triliun pada triwulan I menjadi Rp410,4 triliun pada triwulan II-2025.

Indikasinya, sebagaimana catatan BPS, total produksi beras sepanjang Januari hingga Juni 2025 mencapai 19,16 juta ton, meningkat 13,53 persen dibanding periode yang sama ta-



akselerasi pertumbuhan ekonomi semester II 2025 bakal difokuskan pada penguatan konsumsi, investasi, dan penciptaan lapangan kerja.

Ia mengemukakan untuk pariwisata, pemerintah juga menyiapkan insentif PPN DTP untuk tiket pesawat, diskon moda transportasi publik, serta rangkaian gelaran wisata nasional menjelang akhir tahun sebagai bagian dari stimulus konsumsi. Sedangkan program MBG, koperasi merah putih, dan pembangunan tiga juta rumah menjadi bagian utama untuk mendorong sektor konstruksi dan penyerapan tenaga kerja.

Bu Menkeu mengakui kebanyakan stimulus akan mengarah ke percepatan atau akselerasi pelaksanaan

Dalam kaitan itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan sektor pertanian tetap solid dan mampu menunjukkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. "Di tengah ketidakpastian global, sektor pertanian tampil sebagai tulang punggung ekonomi nasional," kata Pak Mentan, Kamis, 7 Agustus 2025

Memang, kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 13,83 persen, menjadikannya sektor kedua terbesar setelah industri pengolahan sehingga sanggup mendukung pertumbuhan ekonomi nasional 5,12 persen secara tahunan (yoy) dan 4,04 persen dari kuartal sebelumnya pada Kuartal II 2025.

hun sebelumnya. Malah untuk triwulan III potensi produksi beras diperkirakan sebesar 9,08 juta, meningkat 11,17 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Di bawah arahan Presiden Prabowo, pemerintah berkomitmen kuat terhadap kemandirian pangan, keberpihakan kepada petani, serta kebijakan yang berdampak langsung di lapangan menjadi landasan utama bagi pembangunan pertanian nasional yang berkelanjutan dan berdaulat," tandas Andi Amran.

Ruang fiskal, terutama keleluasaan belanja anggaran, pantas mendapat sambutan hangat. Terlebih jika manfaat alokasinya langsung dirasakan segenap lapisan masyarakat. ●

MEMBUKA BLOKIR ANGGARAN KUNCINYA

Boleh jadi banyak yang masih bertanya-tanya, bagaimana pertumbuhan ekonomi pada Kuartal II (April-Juni) 2025 naik menjadi 5,12 dari periode yang sama pada 2024. Salah satu penjelasannya adalah pembukaan blokir anggaran belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Di akhir April 2025 itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan realisasi belanja negara, yang sebelumnya sempat tertahan, telah terakselerasi mencapai Rp516,1 triliun per akhir Maret 2025. Ya setelah blokir anggaran K/L dibuka.

Pada Maret 2025 saja pemerintah telah membelanjakan Rp200 triliun dari APBN, lebih tinggi dari rata-rata dua bulan sebelumnya. "Ini menggambarkan pada Maret terjadi akselerasi belanja. Kabinet yang baru sudah fokus menjalankan programnya, sudah tidak transisi," ujar Bu Menkeu dalam konferensi pers APBN Kita, Rabu, 30 April 2025.

Lebih panjang lebar Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengungkapkan memang pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah membuka blokir anggaran senilai Rp86,6 triliun. Tujuannya agar Kementerian/Lembaga (K/L) dapat kembali melakukan belanja untuk program prioritas pemerintah.

Kebijakan blokir anggaran tersebut merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. "Pada 7 Maret, Menteri Keuangan telah melaporkan kepada Bapak Presiden bahwa pelaksanaan Inpres ini telah kami selesaikan. Dan untuk

itu meminta izin untuk melakukan re-focusing, relokasi, pembukaan blokir dan berbagai macam supaya belanja Kementerian/Lembaga kemudian bisa lebih tajam, bisa dilakukan reprioritisasi sesuai dengan prioritas-prioritas pemerintah," kata Wamenkeu Suahasil.

Lebih rinci, Wamenkeu Suahasil menjelaskan bahwa efisiensi belanja 2025 telah dilakukan terhadap 99 Kementerian dan Lembaga sebesar Rp256,1 triliun, serta transfer ke dae-

hasil.

Efek langsung dari pembukaan blokir ini tercermin dalam akselerasi realisasi belanja Kementerian/Lembaga. Wamenkeu Suahasil mengatakan realisasi belanja pada Januari 2025 sebesar Rp24,4 triliun, pada Februari 2025 sebesar Rp83,6 triliun, dan pada Maret 2025 meningkat signifikan menjadi Rp196,1 triliun.

"Ini yang kita bilang terjadi akselerasi belanja. Sudah sekitar 16,9 persen dari total belanja yang ada di dalam



rah sebesar Rp50,6 triliun. "Sampai dengan 25 April, Kementerian Keuangan bekerja dengan seluruh Kementerian/Lembaga telah melakukan penajaman, relokasi anggaran, telah melakukan proses buka blokir dan sesuai dengan hasil efisiensi belanja sesuai arahan Presiden untuk prioritas pembangunan nasional. Kalau besarnya adalah Rp86,6 triliun sudah dilakukan buka blokir sehingga bisa belanja lagi," kata Wamenkeu Sua-

APBN. Ini inline dengan persentase pendapatan dan juga persentase belanja negaranya. Ini akan kita pantau terus sehingga K/L bisa terus belanja dan kemudian meningkatkan seluruh dukungan kepada prioritas-prioritas pembangunan," tandasnya.

Alhasil, pada akhir Triwulan II 2025 terlihat hasilnya. Kita masuki Triwulan III atau awal Semester II dengan seksama. Beserta ruang fiskal yang masih lebar pula. ●

MENYISAKAN PERTARUHAN LEGITIMASI

Reaksi kritis sudah mendapat tanggapan. Tapi, masih tersisa pertarungan legitimasi.

Sisi lain pertumbuhan ekonomi Kuartal II 2025 mencapai 5,12 persen dari periode yang sama pada 2024 adalah pertarungan legitimasi pemerintah. Salah satu pengertian legitimasi adalah pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap kewenangan, keputusan, atau kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin atau lembaga.

Beriringan dengan pengumuman pemerintah tentang pertumbuhan ekonomi yang membaik menjelang peringatan ulang tahun ke-80 Proklamasi Kemerdekaan, tanggapan-tanggapan kritis juga beredar di berbagai media. Baik di media mainstream maupun media sosial.

percaya terhadap data yang dirilis oleh BPS,” ujar Nailul, Rabu, 6 Agustus 2025. Oleh sebab itu, ia meminta BPS menjelaskan secara detail metodologi yang digunakan, termasuk indeks untuk menarik angka nilai tambah bruto sektoral serta pengeluaran.

Senada dengan itu Direktur Eksekutif Bhima Yudhistira pernah memperkirakan pertumbuhan ekonomi Triwulan II-2025 berada di kisaran 4,5-4,7 persen yoy, bahkan lebih rendah dari realisasi kuartal I-2025 yang sebesar 4,87 persen. Menurut dia, lesunya daya beli masyarakat jadi penyebab utama.

“Pertumbuhan kuartal II-2025 di kisaran 4,5-4,7 persen yoy, karena tidak ada lagi pendorong musiman setelah

tions Statistical Commission. Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira mengungkapkan, inisiatif CELIOS ini menjadi upaya menjaga kredibilitas data BPS yang selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum.

Ia menjelaskan, surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada kuartal ke-II 2025 yang sebesar 5,12 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). CELIOS berharap United Nations Statistics Division (UNSD) dan UN Statistical Commission segera melakukan investigasi teknis atas metode penghitungan PDB Indonesia, khususnya Triwulan II 2025.

Dalam hal ini CELIOS berupaya melihat ulang seluruh indikator yang disampaikan BPS, dan menemukan industri manufaktur tumbuh tinggi, padahal PMI Manufaktur tercatat kontraksi pada periode yang sama. Porsi manufaktur terhadap PDB juga rendah yakni 18,67 persen dibandingkan dengan angka kuartal ke-I 2025 yang tercatat 19,25 persen, artinya deindustrialisasi prematur terus terjadi. Selain itu, data PHK massal terus meningkat, dan industri padat karya terpuak oleh naiknya berbagai beban biaya.

“Jadi apa dasarnya industri manufaktur bisa tumbuh 5,68 persen yoy? Data yang tidak sinkron tentu harus dijawab dengan transparansi.” ungkap Bhima dalam keterangan resminya, Jumat, 8 Agustus 2025.

Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS, Media Wahyudi Askar menambahkan, jika terjadi tekanan institusional atau intervensi dalam penyusunan data oleh BPS, itu bertentangan dengan Fundamental Principles of Official Statistics yang diadopsi oleh Komisi Statistik PBB.

Menurut dia, data yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, tetapi berdampak langsung terhadap kredibilitas internasional Indonesia, dan



Sebut saja misalnya lembaga penelitian independen Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang sejak pengumuman keluar sudah bersikap skeptis, meragukan statistik mengenai pertumbuhan ekonomi Kuartal II 2025. Secara pribadi, Direktur Ekonomi Digital pada Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyatakan tidak percaya dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait dengan pertumbuhan ekonomi kuartal II/2025 mencapai 5,12 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy).

“Ketidaksinkronan antara data pertumbuhan ekonomi dengan leading indikator, membuat saya pribadi tidak

Lebaran. Daya beli sedang lesu,” ujar Bhima.

Lemahnya daya beli ini juga berdampak pada sektor manufaktur. Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat berada di angka 49,2 pada Juli 2025. Meski membaik dibandingkan bulan sebelumnya yang sempat anjlok ke 46,9, posisi ini masih di bawah ambang batas 50-yang berarti aktivitas manufaktur masih mengalami kontraksi.

Lebih dari itu, rupanya CELIOS secara kelembagaan mengirim surat permintaan investigasi pada Badan Statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Na-

kesejahteraan rakyat. "Data ekonomi yang tidak akurat, khususnya jika pertumbuhan dibiarkan-lebihkan, dapat menyesatkan pengambilan kebijakan. Bayangkan, dengan data yang tidak akurat, pemerintah bisa keliru menunda stimulus, subsidi, atau perlindungan sosial karena menganggap ekonomi baik-baik saja. Pelaku usaha, baik itu besar dan UMKM, para investor dan masyarakat pasti akan bingung dan terkena dampak negatif," kata Media.



Toh sikap kritis CELIOS itu juga sudah mendapat tanggapan dari ekonom yang menjadi Tenaga Ahli Kantor Komunikasi Kepresidenan/Presidential Communication Office (PCO) Fithra Faisal. Ia menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2025 sebesar 5,12 persen tidak hanya dipengaruhi konsumsi dan industri pengolahan, tetapi juga investasi melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB).

Fithra Faisal mengemukakan pula pentingnya memahami hubungan antara PMTB dan Purchasing Manager Index (PMI) serta fenomena lag (beda) di antara keduanya. "PMTB tumbuh 6,99 persen. Ini signifikan, karena di kuartal I cuma 2,12 persen. Banyak yang membandingkan dengan PMI Manufacturing, tapi ini harus dilihat cara menghitungnya dan juga timelinenya," jelas Fithra kepada media, Rabu, 6 Agustus 2025.

Ia menjelaskan PMI adalah indikator awal berbasis survei yang mengukur optimisme pelaku usaha, sementara PMTB adalah realisasi investasi. "PMI itu survei untuk menentukan mood pembelian yang dilakukan kepada para purchasing manager. Beda dengan PMTB yang betul-betul actual. Memang PMI serving as leading indicator," ujarnya.

Fithra menegaskan adanya jeda waktu antara optimisme PMI dan realisasi PMTB. "Kalau kita bandingkan timelinenya, ada lag-nya. Contohnya di kuartal I, PMI Manufacturing selalu di atas 50, bahkan Februari 53 karena

antisipasi jelang Lebaran. Tapi itu baru terefleksi di perhitungan kuartal II. Makanya aktivitas PMTB di kuartal II lumayan," kata Fithra.

Ia menilai hal ini juga menjelaskan mengapa kontraksi PMI di kuartal II tidak serta-merta menurunkan PMTB. "Banyak yang meragukan kok ini nggak tally. Bukannya nggak tally, memang ada lag-nya. Biasanya ini akan dibawa ke kuartal ketiga. Jadi kemungkinan di kuartal ketiga PMTB-nya tidak akan setinggi kuartal II," jelasnya.

Lebih lanjut, Fithra memaparkan komponen PMTB yang paling signifikan. "Kalau dari sisi bangunan kontribusinya 74 persen, tumbuh 4,89



persen. Tapi yang menarik adalah belanja mesin naik 25,3 persen, aktivitas belanja modal pemerintah juga naik 30,37 persen. Ini karena ada industri strategis seperti PAL, Pindad yang beli alat-alat mesin," paparnya.

Fithra menambahkan bahwa efek belanja modal pemerintah sudah terlihat nyata. "Secara time series, kontribusi belanja mesin sekitar 9-10 persen. Jadi ini memang signifikan. Kalau dihitung, nggak aneh karena aktivitasnya memang kelihatan," kata dia.

Ia menutup dengan penekanan pada efektivitas belanja. "Hikmahnya, kalau investasi tepat sasaran dengan efek pengganda yang kuat, itu bisa

mendorong ekonomi. Nggak mesti spending yang besar sekali, tapi tepat guna," tandasnya.

Di luar ekonom yang berafiliasi dengan pemerintah, Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) melalui Chief Economist Indonesia dan India HSBC Global Research, Pranjul Bhandari, yakin bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II-2025 memang mencapai 5,12 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), sebagaimana laporan BPS. Ia menjelaskan, sektor informal dan konsumen massal menjadi pendorong perbaikan kondisi ekonomi dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya.

Investasi, sambungnya, juga tumbuh solid sekitar tujuh persen; sebagian besar terpacu oleh belanja modal pemerintah yang cukup tinggi. Sedangkan konsumsi rumah tangga, tambah

Bhandari, tetap tangguh dengan pertumbuhan sekitar lima persen.

"Jadi ketika data PDB kuartal Juni keluar beberapa hari lalu, kami tidak terlalu terkejut. Pertumbuhan tercatat 5,1 persen, naik dari 4,9 persen pada kuartal Maret," kata Bhandari dalam media briefing secara daring, Jumat, 8 Agustus 2025.

Ia mengakui banyak yang bertanya, apakah benar perekonomian Indonesia sedang menguat? "Jawaban saya adalah ya!" ujarnya.

Toh Bhandari menegaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025 itu belum cukup untuk menutup kesenjangan keluaran (out-

• INFO KHUSUS

put gap) perekonomian. "Kita membutuhkan pertumbuhan yang lebih tinggi dan lebih lama agar output gap ini tertutup. Jadi, meskipun kuartal Juni cukup baik, kita perlu angka yang lebih tinggi lagi dalam beberapa kuartal ke depan," tekannya.

Oleh karena itu, dia menekankan, investasi korporasi menjadi kunci untuk mendorong kapasitas ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bergaji tinggi. Namun saat ini, banyak perusahaan masih memilih menabung ketimbang menanamkan modal baru.

Bhandari turut melihat peluang jangka menengah bagi Indonesia dari pergeseran rantai pasok global, meski dalam jangka pendek ekspor ke Amerika Serikat (AS) tertekan tarif tinggi sekitar 19-20 persen. Kondisi ini berpotensi mengurangi pertumbuhan sekitar 0,3 poin persentase, tetapi

volumenya kecil dan perlu diperbesar. Misalnya, hanya 9 persen ekspor Indonesia yang masuk ke AS. Untuk ekspor pakaian jadi, nilainya hanya 25 persen dari ekspor Vietnam. Jadi Indonesia sebenarnya sudah memproduksi barang-barang ini, tetapi perlu ditingkatkan skalanya," jelasnya.

Di samping itu, agar peluang tersebut terwujud, ia menilai Indonesia perlu mempercepat reformasi, mulai dari pembangunan infrastruktur, perluasan perjanjian dagang dengan negara maju, pengembangan tenaga kerja terampil, hingga penyederhanaan prosedur bisnis. "Jika semua ini bisa dilakukan dengan baik, dalam 2-3 tahun peluang ini bisa menarik investasi asing langsung [FDI] dan mendorong pertumbuhan," tandasnya.

Nah, selain soal pertumbuhan dan prospek ekonomi, muncul pula sikap

lan. Ketakutan tersebut terjadi imbas pemeriksaan dari penegak hukum terkait mutu, kualitas, hingga kasus oplosan beras. Ombudsman pun menyatakan telah terjadi kelangkaan beras di penggilingan padi dan ritel modern.

"Yang mencolok, beberapa penggilingan padi di wilayah itu dan 10 sudah tutup sekarang," kata Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika. Jumat, 8 Agustus 2025.

Apa penyebab tutupnya? "Selain persaingan juga karena kondisi yang sekarang terjadi, ada ketakutan," ungkap Yeka

la menyatakan hendaknya pemerintah mengedepankan aspek pembinaan sebelum memberikan sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang terlibat dalam kasus beras oplosan. "Sebelumnya pemerintah tidak melakukan pembinaan dan pengawasan. Tiba-tiba sekarang langsung diperlakukan (proses hukum). Jadi Om-



sekaligus membuka peluang Indonesia menarik manufaktur baru di sektor barang konsumsi seperti tekstil, pakaian, alas kaki, dan furniture.

"Perusahaan multinasional mencari lokasi baru untuk memproduksi dan menjual. Saya rasa, setelah badai tarif mereda, Indonesia bisa mendapat manfaat. Alasannya, saat ini ekspor Indonesia ke Tiongkok hampir 100 persen komoditas."

"Namun ekspor Indonesia ke negara maju seperti AS atau Uni Eropa berisi lebih banyak barang konsumsi seperti tekstil, furniture, alas kaki—hanya saja

kritis tentang kondisi perberasan Indonesia yang menurut versi pemerintah menunjang pertumbuhan dan aktivitas ekonomi. Malah Ombudsman, lembaga negara yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik oleh penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk BUMN, BUMD, dan badan swasta yang mendapat tugas layanan publik, ikut angkat bicara soal perberasan.

Mengemukakan temuan lapangan, Ombudsman RI melaporkan terdapat 10 penggilingan padi di Karawang, Jawa Barat tutup karena takut jua-



Yang mencolok, beberapa penggilingan padi. Ada 23 penggilingan padi di wilayah itu dan 10 sudah tutup sekarang.

budsman mengedepankan langkah-langkah ultimum remedium," ujarnya.

Yeka juga menyarankan agar pemerintah dapat menghapus HET beras premium sehingga pihak swasta dapat menyediakan beras sesuai dengan mekanisme pasar. Pemerintah, kata dia, bisa mengevaluasinya dengan melakukan operasi pasar dan menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ketika harga beras sudah sangat mahal.

Ringkasnya, langkah dan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian dan penyediaan pangan berimplikasi pada pertarungan legitimasi. Jalin kelindannya semoga sudah banyak yang memahami. • Editor: GE

info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI



INFO PASANG IKLAN
NUR AISAH
0815-1157-6312

IKLAN BACK COVER

RP 75.000.000

IKLAN DISPLAY/HAL

RP 50.000.000

IKLAN ADVERTORIAL/HAL

RP 65.000.000

CENTER SPREAD

RP 80.000.000

*Kami Hadir
 Memberikan
 info Tersebut*

▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**

▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**

▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**

▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**



SRI MULYANI MINTA BELANJA APBD DIPACU

